



DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA 2015



BADAN PUSAT STATISTIK

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA 2015

<http://www.bps.go.id>

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS BERAS INDONESIA 2015

ISBN : 978-979-064-891-3
Nomor Publikasi : 06130.1502
Katalog BPS : 8201008
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 138 halaman

Naskah:
Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Gambar Kulit:
Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi di Indonesia Tahun 2015. Pemilihan komoditas yang diteliti didasarkan pada pertimbangan memiliki kontribusi output yang besar dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output* (I-O) 2005 dan bobot pada perhitungan inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2015 ditetapkan 5 komoditas yang diteliti yaitu beras, cabai merah, bawang merah, jagung pipilan, dan daging ayam ras.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas beras yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen. Informasi yang disajikan adalah peta penjualan produksi, pola penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola distribusi perdagangan, serta Marjin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2015

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Badan Pusat Statistik



tk

Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo M.Sc.
NIP. 19570411 198003 1 001

<http://www.bps.go.id>

ABSTRAKSI

Pola distribusi komoditas saat ini diduga masih bermasalah., hal ini terlihat dari adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, serta ketersediaan barang yang kurang mencukupi pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar. Selain itu kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga), dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Publikasi ini menganalisa distribusi perdagangan dalam negeri komoditas beras di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 152 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditas beras secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi yang merupakan sentra produksi padi nasional, seperti: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, fungsi usaha perdagangan mendapatkan pasokan beras dari wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi. Sementara untuk provinsi-provinsi yang bukan sentra produksi padi nasional, seperti: Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, fungsi usaha perdagangan mendapatkan pasokan beras dari wilayah kabupaten/kota di luar provinsi. Daerah-daerah tersebut mendapatkan pasokan beras dari provinsi-provinsi yang mempunyai produksi padi berlimpah, seperti dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Keywords: *pola, peta, distribusi, beras, margin*

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Identifikasi Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Cakupan Komoditas	2
1.6 Cakupan Wilayah	2
1.7 Metodologi	3
1.8 Konsep dan Definisi	4
BAB II ULASAN RINGKAS.....	7
2.1 Gambaran Umum	7
2.2 Provinsi Aceh.....	10
2.3 Provinsi Sumatera Utara.....	14
2.4 Provinsi Sumatera Barat.....	18
2.5 Provinsi Riau	22
2.6 Provinsi Jambi	25
2.7 Provinsi Sumatera Selatan.....	28
2.8 Provinsi Bengkulu	32
2.9 Provinsi Lampung	35
2.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	38
2.11 Provinsi Kepulauan Riau	40
2.12 Provinsi DKI Jakarta.....	42
2.13 Provinsi Jawa Barat.....	45
2.14 Provinsi Jawa Tengah	49
2.15 Provinsi D.I. Yogyakarta.....	53
2.16 Provinsi Jawa Timur.....	57
2.17 Provinsi Banten	61

2.18	Provinsi Bali.....	65
2.19	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	69
2.20	Provinsi Nusa Tenggara Timur	72
2.21	Provinsi Kalimantan Barat.....	75
2.22	Provinsi Kalimantan Tengah	78
2.23	Provinsi Kalimantan Selatan.....	82
2.24	Provinsi Kalimantan Timur	86
2.25	Provinsi Kalimantan Utara	90
2.26	Provinsi Sulawesi Utara	93
2.27	Provinsi Sulawesi Tengah	95
2.28	Provinsi Sulawesi Selatan	98
2.29	Provinsi Sulawesi Tenggara	102
2.30	Provinsi Gorontalo	106
2.31	Provinsi Sulawesi Barat	110
2.32	Provinsi Maluku	114
2.33	Provinsi Maluku Utara	116
2.34	Provinsi Papua Barat.....	118
2.35	Provinsi Papua.....	120
2.36	Indonesia.....	123
BAB III KESIMPULAN.....		126
LAMPIRAN.....		128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditas	3
Tabel 2. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi 2014	8
Tabel 3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Aceh	13
Tabel 4. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sumatera Utara	17
Tabel 5. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sumatera Barat	21
Tabel 6. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Riau	24
Tabel 7. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jambi	27
Tabel 8. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sumatera Selatan	31
Tabel 9. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Bengkulu	34
Tabel 10. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Lampung	37
Tabel 11. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Tabel 12. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kepulauan Riau	41
Tabel 13. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 14. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Barat	48
Tabel 15. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Tengah ..	52
Tabel 16. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi DI Yogyakarta	56
Tabel 17. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Timur	60
Tabel 18. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Banten	64
Tabel 19. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Bali	68
Tabel 20. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat	71
Tabel 21. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur	74
Tabel 22. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Barat	77
Tabel 23. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	81
Tabel 24. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Selatan	85

Tabel 25. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Timur	89
Tabel 26. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Utara.....	92
Tabel 27. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Utara	94
Tabel 28. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Tengah	97
Tabel 29. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Selatan.....	101
Tabel 30. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara	105
Tabel 31. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Gorontalo	109
Tabel 32. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Barat	113
Tabel 33. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Maluku.....	115
Tabel 34. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Maluku Utara	117
Tabel 35. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Papua Barat .	119
Tabel 36. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Papua.....	122
Tabel 37. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2014	7
Gambar 2. Pola Distribusi Secara Umum	9
Gambar 3. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Aceh	10
Gambar 4. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh.....	11
Gambar 5. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Aceh	11
Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh	12
Gambar 7. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Utara.....	14
Gambar 8. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara	15
Gambar 9. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Utara	15
Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara.....	16
Gambar 11. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Barat.....	18
Gambar 12. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat	19
Gambar 13. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Barat	19
Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat.....	20
Gambar 15. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Riau	22
Gambar 16. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau	23
Gambar 17. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Riau	23
Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau.....	24
Gambar 19. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jambi.....	25
Gambar 20. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi	26
Gambar 21. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jambi	26
Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi	27
Gambar 23. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Selatan.....	28
Gambar 24. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan	28
Gambar 25. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Selatan	29
Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan	30
Gambar 27. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bengkulu	32
Gambar 28. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu.....	33
Gambar 29. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bengkulu	33
Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu	34
Gambar 31. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Lampung	35

Gambar 32. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung.....	35
Gambar 33. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Lampung	36
Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung	37
Gambar 35. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	38
Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Gambar 37. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau	40
Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau	41
Gambar 39. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta.....	42
Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta	43
Gambar 41. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat	45
Gambar 42. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat.....	46
Gambar 43. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat.....	46
Gambar 44. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat	47
Gambar 45. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Tengah.....	49
Gambar 46. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah	50
Gambar 47. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Tengah	50
Gambar 48. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah.....	51
Gambar 49. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	53
Gambar 50. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta	54
Gambar 51. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta	55
Gambar 52. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	56
Gambar 53. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Timur	57
Gambar 54. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur	58
Gambar 55. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Timur.....	58
Gambar 56. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur	59
Gambar 57. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Banten.....	61
Gambar 58. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten	61
Gambar 59. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Banten	62
Gambar 60. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten.....	63
Gambar 61. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bali	65
Gambar 62. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali.....	65
Gambar 63. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bali.....	66
Gambar 64. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali	67
Gambar 65. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat	69

Gambar 66. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	69
Gambar 67. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat	70
Gambar 68. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	71
Gambar 69. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur	72
Gambar 70. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	72
Gambar 71. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	73
Gambar 72. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur	73
Gambar 73. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Barat.....	75
Gambar 74. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat.....	76
Gambar 75. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Barat.....	76
Gambar 76. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat	77
Gambar 77. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	78
Gambar 78. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	79
Gambar 79. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Tengah	79
Gambar 80. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah.....	80
Gambar 81. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Selatan	82
Gambar 82. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan.....	83
Gambar 83. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Selatan.....	83
Gambar 84. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan	84
Gambar 85. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Timur.....	86
Gambar 86. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur	86
Gambar 87. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Timur	87
Gambar 88. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur	88
Gambar 89. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara.....	90
Gambar 90. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara	91
Gambar 91. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara.....	93
Gambar 92. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara	94
Gambar 93. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tengah	95
Gambar 94. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah	96
Gambar 95. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tengah	96
Gambar 96. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah.....	97
Gambar 97. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan	98
Gambar 98. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan.....	99
Gambar 99. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan	99

Gambar 100. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan	100
Gambar 101. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara	102
Gambar 102. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara	103
Gambar 103. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara	103
Gambar 104. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	104
Gambar 105. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Gorontalo	106
Gambar 106. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo.....	107
Gambar 107. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Gorontalo.....	107
Gambar 108. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo	108
Gambar 109. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Barat.....	110
Gambar 110. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat	111
Gambar 111. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Barat.....	111
Gambar 112. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat	112
Gambar 113. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku	114
Gambar 114. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku	115
Gambar 115. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara	116
Gambar 116. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara.....	117
Gambar 117. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat	118
Gambar 118. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat	119
Gambar 119. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua.....	120
Gambar 120. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua	121
Gambar 121. Pola Penjualan Produksi Beras di Indonesia	123
Gambar 122. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDP15-PEDAGANG.....	129
Lampiran 2: Daftar VPDP15-PRODUSEN.....	134
Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan.....	138

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu barang mulai dari produsen hingga ke konsumen. Rantai ini mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Rantai distribusi yang baik mampu menggerakkan suatu barang dari produsen ke konsumen dengan biaya yang serendah-rendahnya dan mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pola distribusi beras saat ini diduga masih bermasalah, hal ini terlihat dari adanya disparitas harga yang tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Selain itu ketersediaan barang kebutuhan yang tidak mencukupi pada saat dibutuhkan dan kurang tersedianya alternatif pilihan, rasa kepuasan yang belum merata antara produsen, lembaga-lembaga usaha perdagangan (dalam tata niaga) dan konsumen juga menjadi masalah dalam distribusi barang.

Untuk mengetahui dimana letak permasalahan tersebut dipandang perlu untuk dilakukan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas. Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya beras. Kegiatan ini dilakukan karena hasilnya dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran pola distribusi perdagangan dalam negeri dan dapat dibangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik.

Hasil Survei Poldis Perdagangan 2015 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditas-komoditas terpilih dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan survei selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2015 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola distribusi beras kualitas medium dan premium mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.
- b. Bagaimana pola penjualan beras kualitas medium dan premium dari suatu wilayah ke wilayah lain.

1.4 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2015 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan Pola Penjualan Produksi.
- b. Mendapatkan Pola Distribusi Perdagangan.
- c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- e. Memperoleh data tentang margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

1.5 Cakupan Komoditas

Penentuan komoditas dalam survei ini adalah komoditas strategis, yaitu komoditas-komoditas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- c. Komoditas yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.
- d. Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

1.6 Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah survei meliputi 152 kabupaten/kota di 34 provinsi dengan jumlah sampel produsen maupun pedagang sebanyak 1193 perusahaan.

1.7 Metodologi

a. Cakupan KBLI Komoditas Beras

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditas

Komoditas	KBLI 2009	KBLI 2005	Deskripsi
-1	-2	-3	-4
Beras Premium dan Beras Medium	10631	15311	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras
	46311	51220, 53220, 54220	Perdagangan besar beras
	47111	52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di supermarket/minimarket
	47112	52112	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional)
	47221	52221	Perdagangan eceran beras
	47821	52521	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar beras

b. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen beras, kerangka sampel berasal dari:

- a) Direktori industri penggilingan padi hasil PIPA2012 dengan kriteria:
 - Blok II.2 R4: Tempat perusahaan/usaha industri penggilingan padi : tetap dan keliling,
 - Blok II.2 R5a: Skala perusahaan/usaha industri penggilingan padi: skala besar (> 3 ton beras/jam) dan skala sedang (1,5 – 3 ton beras/jam).
- b) Sumber Lain : berasal dari internet

Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari:

- a) SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Dari data tersebut dapat ditentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, dan pengecer dengan pendekatan berdasarkan hasil dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan

- Rincian 8 (menurut penjualan barang). Sedangkan untuk perusahaan SE06-UMB yang nonresponse, tidak dapat dilakukan penentuan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha.
- b) Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
 - c) Direktori perusahaan ekspor impor
 - d) Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
 - e) Sumber Lain : berasal dari internet.

c. Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan komoditas terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditas. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah.

Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

1.8 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia Tahun 2015, antara lain:

- **Perdagangan** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk , bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).
- Dua pelaku utama dalam kegiatan perdagangan adalah **pedagang besar** dan **pedagang eceran**. Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang besar lain yang bertindak sebagai agen, broker dan/atau kepada pemakai industri, lembaga swasta ,dan pemakai komersial dimana volume yang dijual tidak sama dengan volume yang diperdagangkan pada konsumen akhir. Pada umumnya selain melakukan aktivitas pembelian dan penjualan, beberapa kategori pedagang besar juga melakukan penentuan harga, penyimpanan, promosi, hingga pemasaran barang dalam partai besar. Pada Survei POLDIS 2015, ada beberapa kategori fungsi kelembagaan pedagang besar dan menengah yang termasuk dalam cakupan penelitian, antara lain:
 1. **Distributor** adalah unit usaha yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung dan bertindak atas nama sendiri, sehingga risiko keberlangsungan kegiatan juga ditanggung sendiri. Distributor biasanya juga diberikan hak/wewenang khusus terhadap hasil produksi dari produsen. Sementara itu, **Sub**

Distributor adalah unit usaha yang ditunjuk langsung oleh distributor untuk melakukan kegiatan distribusi hingga ke pengecer. Idealnya jangkauan kegiatan Sub Distributor lebih sempit dibandingkan Distributor.

2. **Pedagang pengepul (*assembler*)** tergolong sebagai pedagang besar (bersifat perorangan atau lembaga) yang biasanya membeli komoditas dari produsen secara langsung untuk dijual kembali ke fungsi kelembagaan lainnya. Pedagang pengepul seringkali ditemui pada produk-produk hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternakan yang membawa sendiri komoditas yang diperdagangkan ke beberapa pusat-pusat pasar.
 3. **Agen** didefinisikan sebagai pihak (perorangan/badan usaha) yang melakukan penjualan/pemasaran barang atas nama *prinsipal* (pihak yang memakai jasa agen, biasanya adalah distributor utama) ke wilayah dagang-wilayah dagang tertentu dari prinsipal. Agen cenderung bersifat independen, memiliki hak pengendalian barang yang sangat terbatas untuk komoditas yang diperdagangkan karena terikat pada kontrak/perjanjian dengan *prinsipal* yang diwakilinya. Pendapatan agen diperoleh dari komisi berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dijualnya.
 4. **Pedagang Grosir** termasuk pedagang level menengah-besar yang bersifat *cash and carry*, dimana transaksi (partai besar) biasanya dilakukan langsung di lokasinya berada dan proses transaksi sebagian besar dilakukan tanpa pengantaran (barang diambil sendiri oleh pembeli). Secara garis besar, ada dua karakteristik penjualan dari pedagang grosir, yaitu yang menjual berbagai jenis komoditas (*general line wholesaler*) dan yang khusus menjual komoditas secara spesifik (*specity wholesaler*).
 5. **Importir** adalah unit usaha yang kegiatan utamanya menyalurkan barang (pembelian, penerimaan dan/atau pemasukan barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima. Sedangkan **Eksportir** adalah unit usaha perusahaan yang memiliki fungsi dalam menyalurkan (penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.
- **Pedagang Eceran (*retailer*)** adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang dan jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk kepentingan konsumsi pribadi atau nonbisnis dalam volume eceran / satuan. Termasuk di dalamnya adalah **Supermarket**, yang tergolong sebagai *selfservice retailing*. *The Food Marketing Institute* mendefinisikan supermarket sebagai pengecer dengan diversifikasi produk yang lebih luas dan memposisikan pembelinya memilih produk (utamanya makanan) yang dibutuhkan secara mandiri dengan pelayanan yang terbatas (pelayanan diberikan hanya pada pembayaran dan pembungkusan).
 - Cakupan **konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lainnya, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lainnya yang dimaksud dalam survei ini, antara lain: rumah makan, restoran, usaha *catering*, hotel, sekolah, dan rumah sakit. Sementara untuk industri pengolahan dapat

didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengubah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, seperti: tepung beras, makanan ringan, industri pembuatan sosis atau *nudget* dan lainnya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, yayasan jompo, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

- **Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Marjin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.
- **Marjin Perdagangan (MP)** adalah nilai MPP yang telah dikurangi dengan biaya pengangkutan barang (marjin transportasi).

<http://www.bps.go.id>

BAB II ULASAN RINGKAS

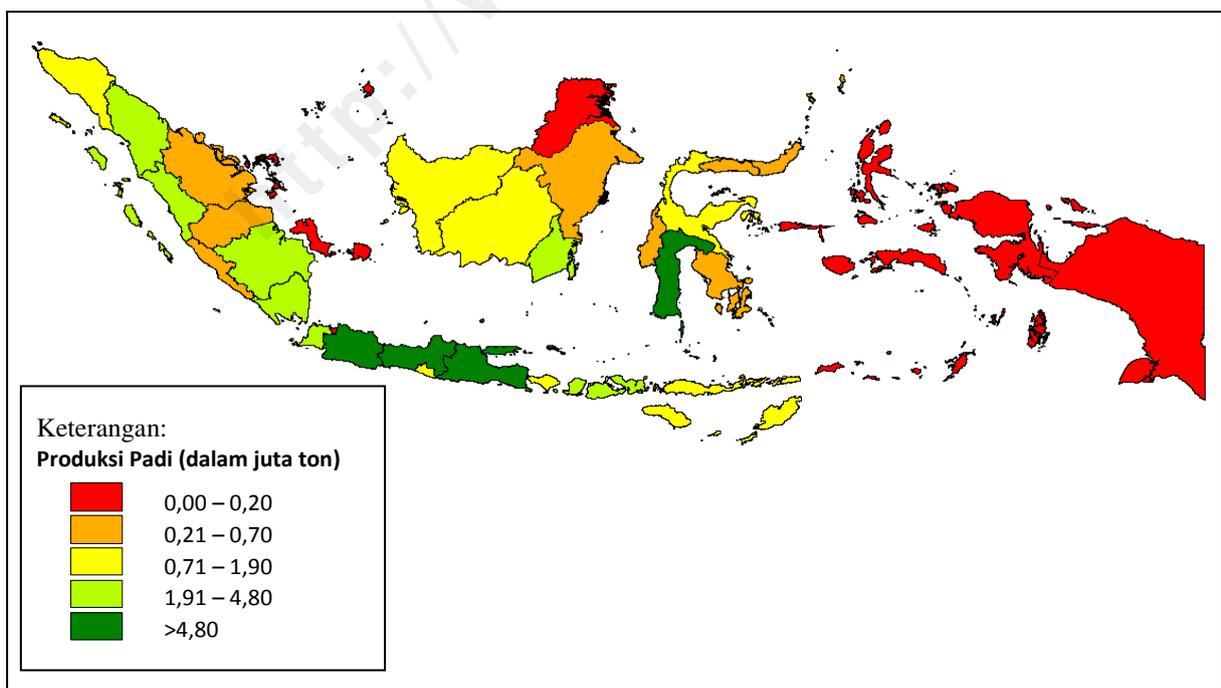
2.1 Gambaran Umum

Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam (Jawa: merang). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling dengan mesin sehingga bagian luarnya (kulit gabah/sekam) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang disebut beras.

Penduduk Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi untuk mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok utama. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 konsumsi beras rata-rata perkapita selama seminggu adalah 1,673 kg, beras ketan 0,003 kg, dan tepung beras 0,005 kg. Selain merupakan negara pengonsumsi beras, Indonesia juga merupakan negara produsen beras. Hal ini didukung oleh kondisi alam, iklim, dan topografi yang mendukung dilakukannya usaha tani padi di Indonesia.

Beras merupakan salah satu komoditas pangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ketersediaan komoditas tersebut sebagai makanan pokok bagi hampir seluruh bangsa Indonesia harus tetap terjaga sepanjang tahun. Produksi padi pada tahun 2014 di Indonesia diperkirakan mencapai 70,85 juta ton gabah kering giling (GKG) dan sekitar 51,75% diantaranya diproduksi di Pulau Jawa. (*Sumber : Publikasi Produksi Tanaman Pangan 2014*)

Gambar 1. Peta Sebaran Produksi Padi di Indonesia Tahun 2014



Sumber : Publikasi Produksi Tanaman Pangan 2014, Badan Pusat Statistik

Sentra produksi padi pada tahun 2014 adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Keempat provinsi tersebut masing-masing memproduksi sebesar 11,64 juta ton; 9,65 juta ton; 12,40 juta ton; dan 5,43 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2014. Peta sebaran produksi padi di Indonesia secara lengkap dapat disajikan pada Gambar 1.

Tabel 2. Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi 2014

Provinsi	Padi		
	Luas Panen (Hektar)	Produktivitas (Kuintal/Hektar)	Produksi (Ton GKG)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Aceh	376.137	48,39	1.820.062
2. Sumatera Utara	717.318	50,62	3.631.039
3. Sumatera Barat	503.198	50,06	2.519.020
4. Riau	106.037	36,35	385.475
5. Jambi	145.990	45,53	664.720
6. Sumatera Selatan	810.900	45,26	3.670.435
7. Bengkulu	147.572	40,20	593.194
8. Lampung	648.731	51,18	3.320.064
9. Kepulauan Bangka Belitung	9.943	23,62	23.481
10. Kepulauan Riau	385	36,44	1.403
11. DKI Jakarta	1.400	53,86	7.541
12. Jawa Barat	1.979.799	58,82	11.644.899
13. Jawa Tengah	1.800.908	53,57	9.648.104
14. D.I. Yogyakarta	158.903	57,87	919.573
15. Jawa Timur	2.072.630	59,81	12.397.049
16. Banten	386.398	52,95	2.045.883
17. Bali	142.697	60,12	857.944
18. Nusa Tenggara Barat	433.712	48,80	2.116.637
19. Nusa Tenggara Timur	246.750	33,46	825.728
20. Kalimantan Barat	452.242	30,35	1.372.695
21. Kalimantan Tengah	242.488	34,57	838.207
22. Kalimantan Selatan	498.133	42,05	2.094.590
23. Kalimantan Timur	100.262	42,55	426.567
24. Kalimantan Utara	32.072	36,05	115.620
25. Sulawesi Utara	130.428	48,91	637.927
26. Gorontalo	219.613	46,54	1.022.054
27. Sulawesi Tengah	1.040.024	52,17	5.426.097
28. Sulawesi Selatan	140.408	46,84	657.617
29. Sulawesi Barat	62.690	50,20	314.704
30. Sulawesi Tenggara	94.351	47,65	449.621
31. Maluku	21.623	47,52	102.761
32. Maluku Utara	21.192	34,01	72.074
33. Papua	6.880	40,21	27.665
34. Papua Barat	45.493	43,09	196.015
Jawa	6.400.038	57,29	36.663.049
Luar Jawa	7.397.269	46,21	34.183.416
Indonesia	13.797.307	51,35	70.846.465

Dari Tabel 2 terlihat bahwa sentra produksi padi di Pulau Jawa terpusat di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Jumlah produksi padi dari ketiga provinsi tersebut saja mencapai 47,55 persen dari total jumlah produksi padi Indonesia. Selain di Pulau Jawa, di luar Jawa pun banyak terdapat sentra-sentra produksi padi. Provinsi-provinsi di luar Jawa yang merupakan sentra produksi padi nasional, antara lain: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Daerah sentra produksi yang tidak merata inilah yang memerlukan aktivitas distribusi yang baik agar beras dapat terdistribusi dengan merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Aktivitas distribusi secara umum melibatkan produsen, intermedier sampai akhirnya bisa sampai di tangan konsumen. Yang dimaksud intermedier dalam rantai distribusi barang ini dapat berupa pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, subagen, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Sedangkan dari sisi konsumen, dapat berupa industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga.



Gambar 2. Pola Distribusi Secara Umum

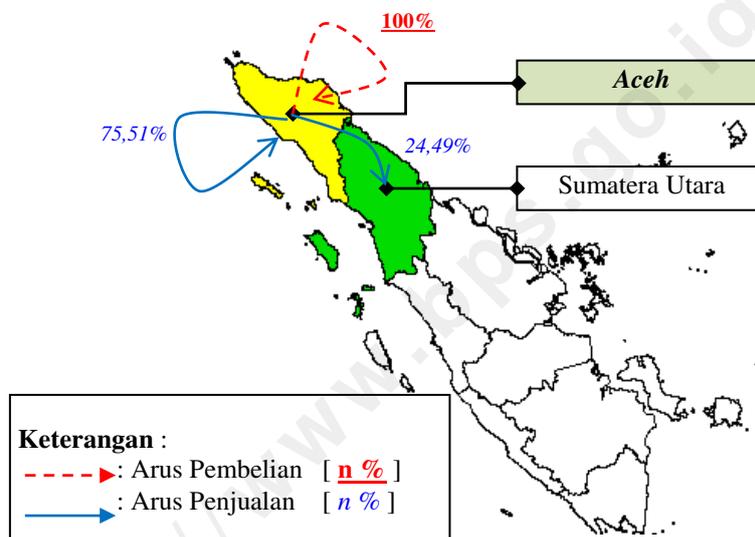
Dari hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2015, selanjutnya akan dipaparkan hasil pengamatan lapangan berupa peta penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola penjualan produksi, pola distribusi perdagangan dan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di masing-masing provinsi di Indonesia.

2.2 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.

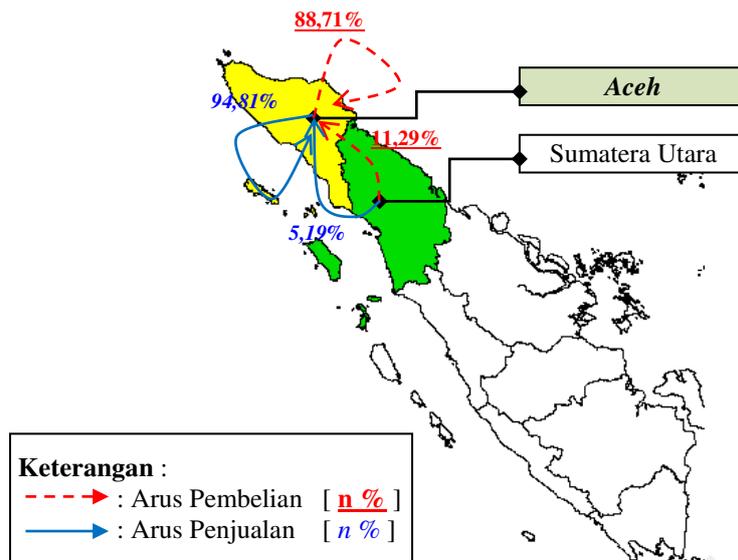
2.2.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras di Provinsi Aceh memperoleh gabah padi dari dalam Provinsi Aceh sendiri. Beras hasil penggilingan tersebut kemudian 75,51 persen untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Provinsi Aceh dan 24,49 persen sisanya dijual ke Provinsi Sumatera Utara. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Aceh secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Aceh

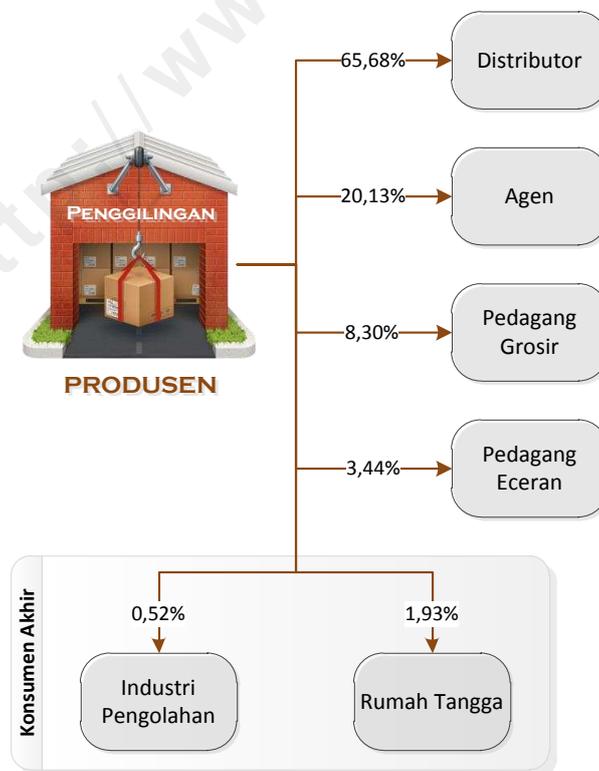
Hasil survei di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang pemasok beras di wilayah Provinsi Aceh berasal dari dalam wilayah Provinsi Aceh sendiri, yaitu sebesar 88,71 persen. Sementara sisanya dipasok dari Provinsi Sumatera Utara. Pasokan beras tersebut kemudian hampir seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Aceh sendiri, sementara 5,19 persen sisanya dijual ke Provinsi Sumatera Utara. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Aceh disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh

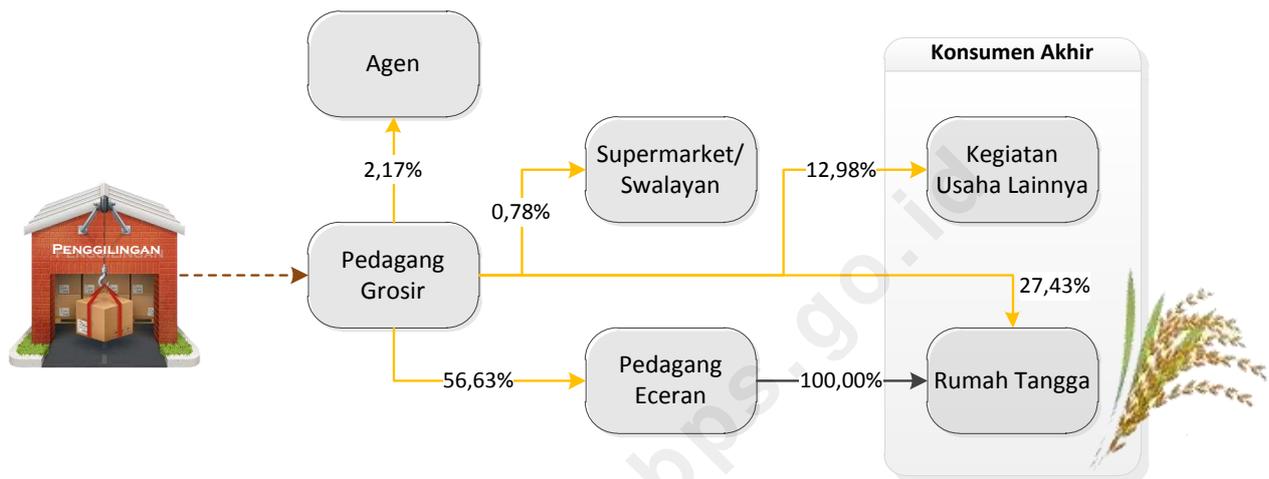
2.2.2 Pola Distribusi

Penggilingan padi yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, menjual sebagian besar hasil produksinya ke distributor, yaitu sebesar 65,68 persen dan agen sebesar 20,13 persen. Sementara itu, sisa produksinya dijual ke pedagang grosir, pedagang eceran, maupun dijual langsung ke konsumen akhir yang meliputi industri pengolahan dan rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Aceh secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 5. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Aceh

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pola perdagangan beras di Provinsi Aceh melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Pedagang grosir beras di Aceh memiliki rantai penjualan yang cukup luas. Selain menjual ke pedagang eceran, kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga, pedagang grosir juga menjual sebagian kecil berasnya ke agen dan supermarket/swalayan. Porsi penjualan terbesar pedagang grosir adalah ke pedagang eceran, yaitu sebesar 56,63 persen. Pedagang eceran kemudian menjual seluruh pasokan berasnya langsung ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Aceh secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Aceh

2.2.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 16,10 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 14,58 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,71 persen, sedangkan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,66 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Aceh adalah sebesar 15,84 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 14,35 persen.

**Tabel 3. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Aceh**

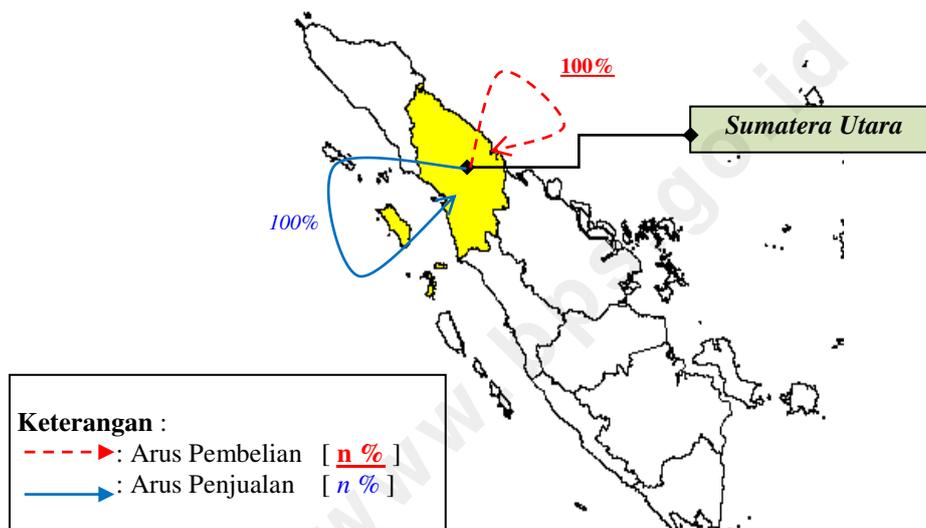
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	3.315,25	166,45	2.440,58
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	2.855,53	160,49	2.106,91
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	112,57	0,23	80,48
Rata-rata MPP (juta Rp)	459,72	5,96	333,67
Rasio MPP (%)	16,10	3,71	15,84
Rata-rata MP (juta Rp)	416,42	5,77	302,38
Rasio MP (%)	14,58	3,66	14,35

2.3 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, dan Kota Binjai.

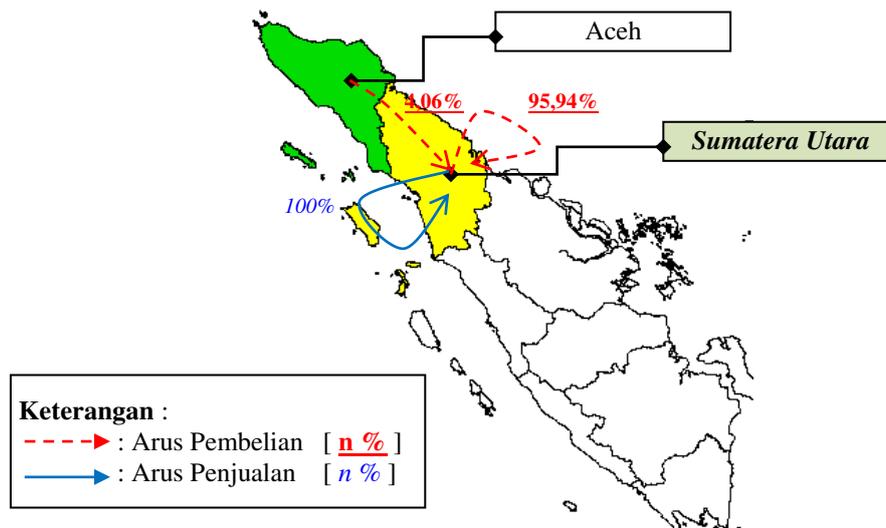
2.3.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen di Provinsi Sumatera Utara memperoleh seluruh pasokan gabah padi dari dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Beras hasil penggilingan tersebut kemudian seluruhnya hanya dijual ke dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Utara

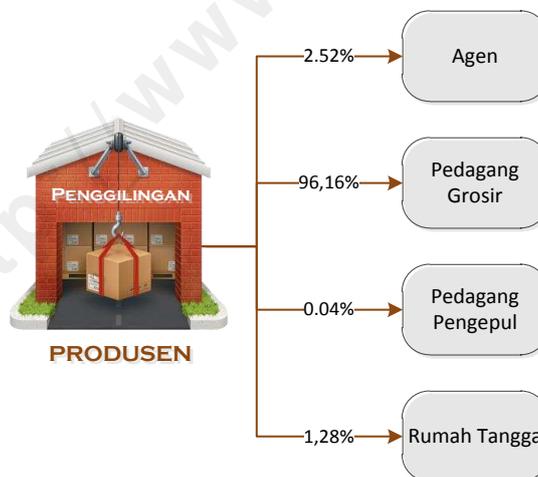
Dari sisi pedagang ditemukan bahwa selain mendapat pasokan beras dari dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri sebesar 95,94 persen, pasokan beras di Provinsi Sumatera Utara juga berasal dari Provinsi Aceh. Pasokan beras tersebut kemudian seluruhnya dijual ke dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara

2.3.2 Pola Distribusi

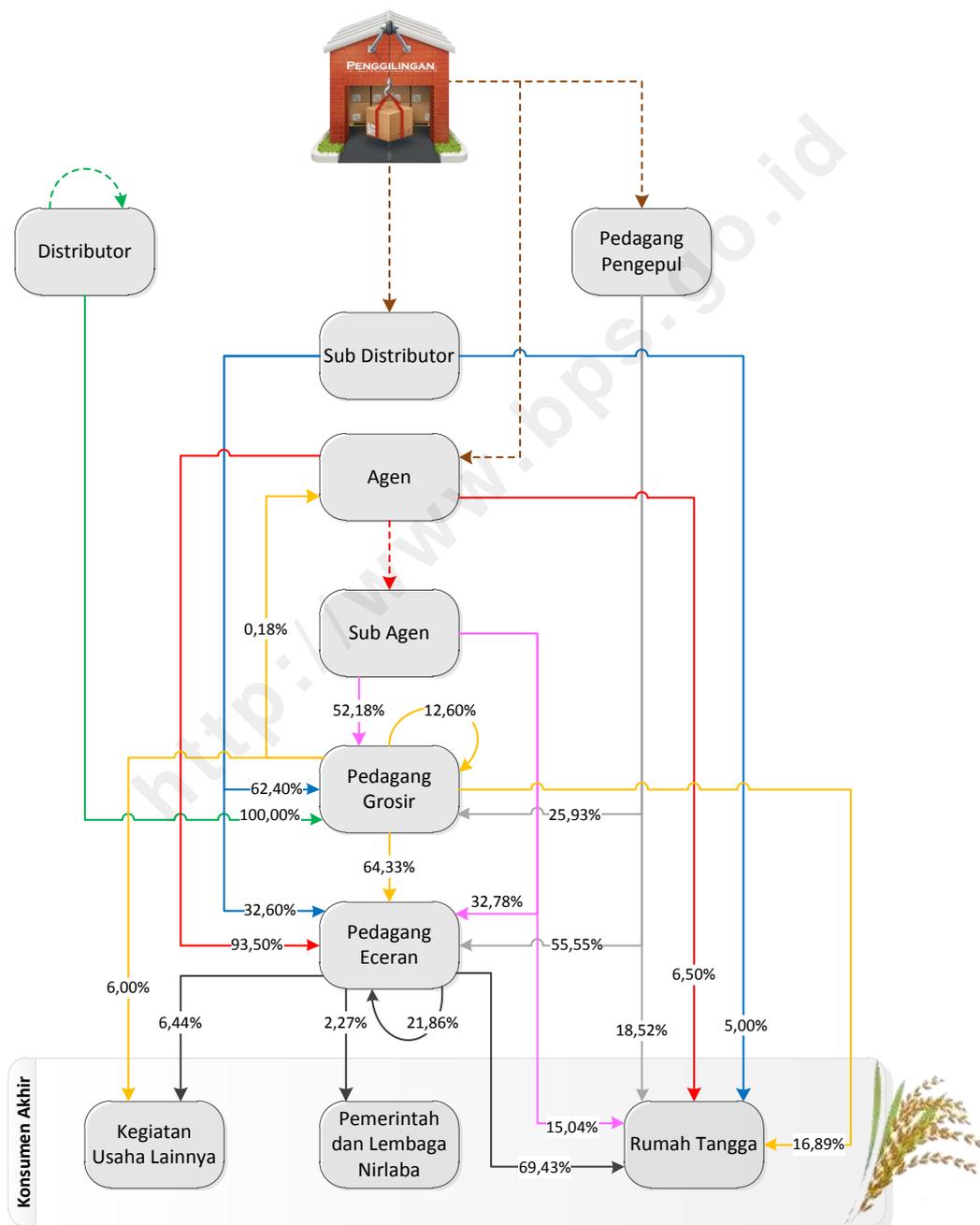
Penggilingan padi yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, menjual hasil produksinya melalui beberapa macam lembaga usaha. Sebagian besar hasil produksi tersebut dijual ke pedagang grosir, yaitu sebesar 96,16 persen. Sementara sisanya, dijual ke pedagang pengepul, agen, maupun dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 9. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pola perdagangan beras di Provinsi Sumatera Utara melibatkan banyak tingkatan lembaga usaha sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Dari Gambar 10. dapat diperoleh informasi bahwa pasokan beras yang diperdagangkan di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dari produsen dan juga distributor. Distributor di Provinsi Sumatera Utara yang memperoleh seluruh pasokan berasnya dari sesama distributor di dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri kemudian menjual seluruh pasokan berasnya tersebut ke pedagang grosir. Sementara itu,

pedagang pengepul yang mendapat separuh pasokan berasnya dari produsen di Provinsi Aceh, menjual 55,55 persen dari pasokan tersebut ke pedagang eceran dan 25,93 persen ke pedagang grosir. Pedagang grosir yang mendapat pasokan berasnya dari distributor, subdistributor, pedagang pengepul, maupun subagen kemudian menjual 64,33 persen dari pasokan beras tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran yang mendapat pasokan beras dari berbagai macam lembaga usaha tersebut kemudian menjual berasnya ke rumah tangga sebesar 69,43 persen dan sisanya dijual ke pemerintah dan lembaga nirlaba, kegiatan usaha lainnya, maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 10. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Utara

2.3.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 3,76 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,35 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,13 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 4,94 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 3,97 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 3,49 persen.

Tabel 4. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sumatera Utara

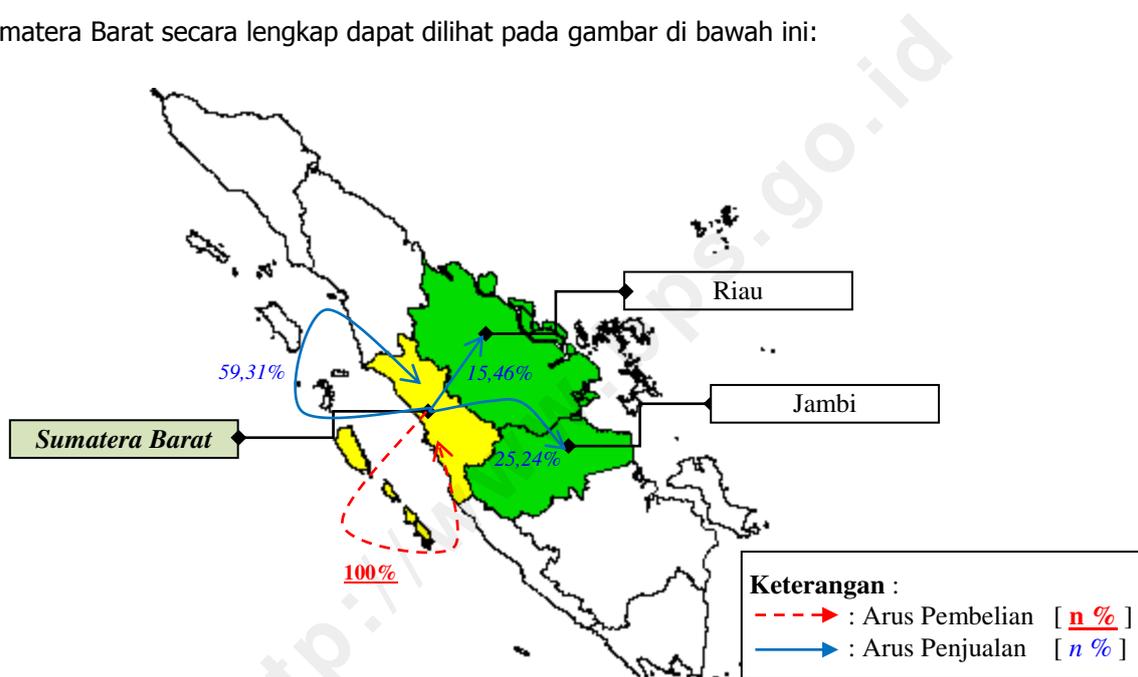
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.520,85	334,30	1.151,70
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.465,71	314,99	1.107,71
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	15,42	10,51	13,98
Rata-rata MPP (juta Rp)	55,13	19,31	43,99
Rasio MPP (%)	3,76	6,13	3,97
Rata-rata MP (juta Rp)	49,17	15,56	38,71
Rasio MP (%)	3,35	4,94	3,49

2.4 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Solok, Kabupaten Lima Puluh Koto, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang.

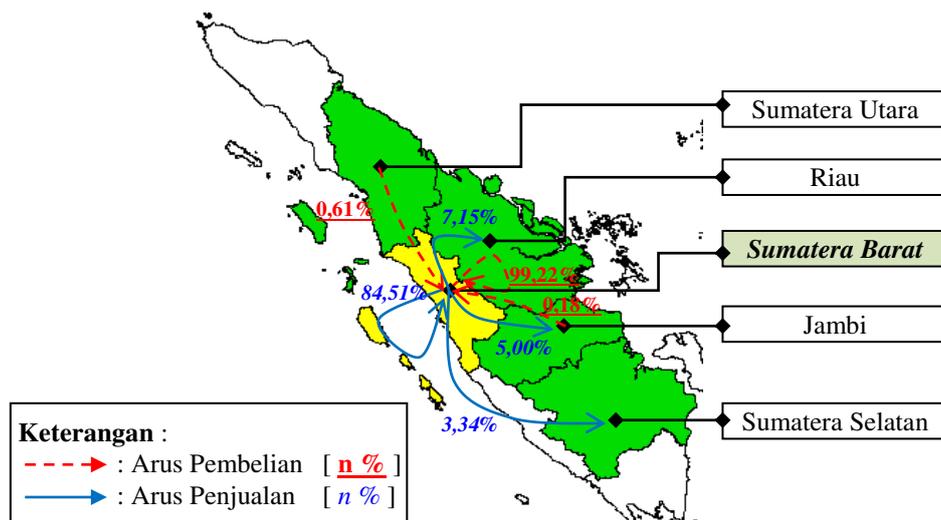
2.4.1 Peta Distribusi

Produsen di Provinsi Sumatera Barat mendapat bahan baku beras yang berupa gabah padi, dari dalam Provinsi Sumatera Barat sendiri. Beras hasil produksi tersebut kemudian sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan beras di dalam Provinsi Sumatera Barat sendiri, yaitu sebesar 59,30 persen. Sedang sisanya dijual ke provinsi sekitar, meliputi Riau sebesar 15,46 persen dan Jambi sebesar 25,24 persen. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 11. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Barat

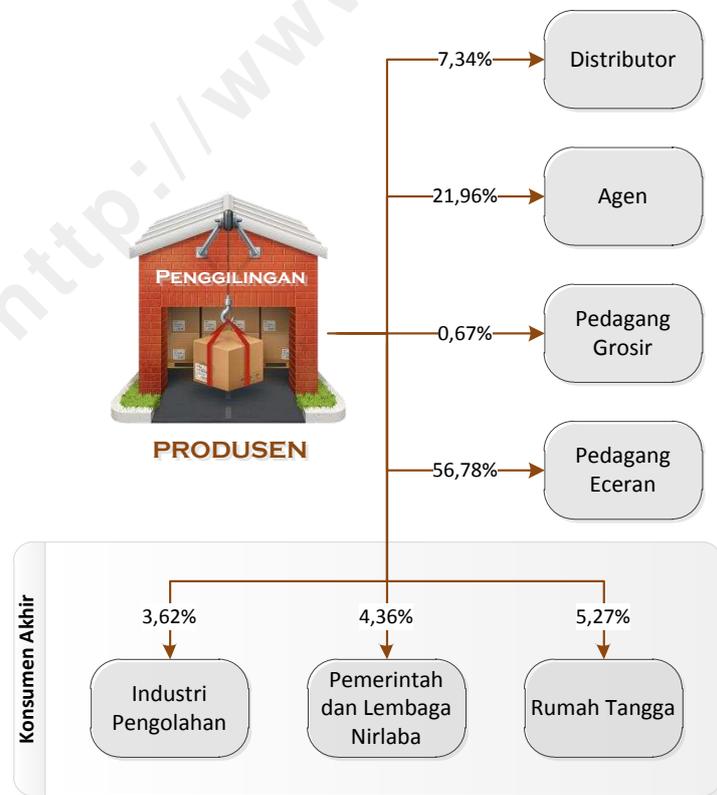
Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa 99,22 persen pasokan beras yang diperoleh pedagang di Provinsi Sumatera Barat berasal dari dalam Sumatera Barat. Sementara sebagian kecil sisanya didapat para pedagang dari Sumatera Utara maupun Jambi. Pasokan beras tersebut kemudian dijual ke dalam Provinsi Sumatera Barat sendiri sebesar 84,51 persen dan sisanya dijual ke beberapa provinsi sekitar seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 12. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat

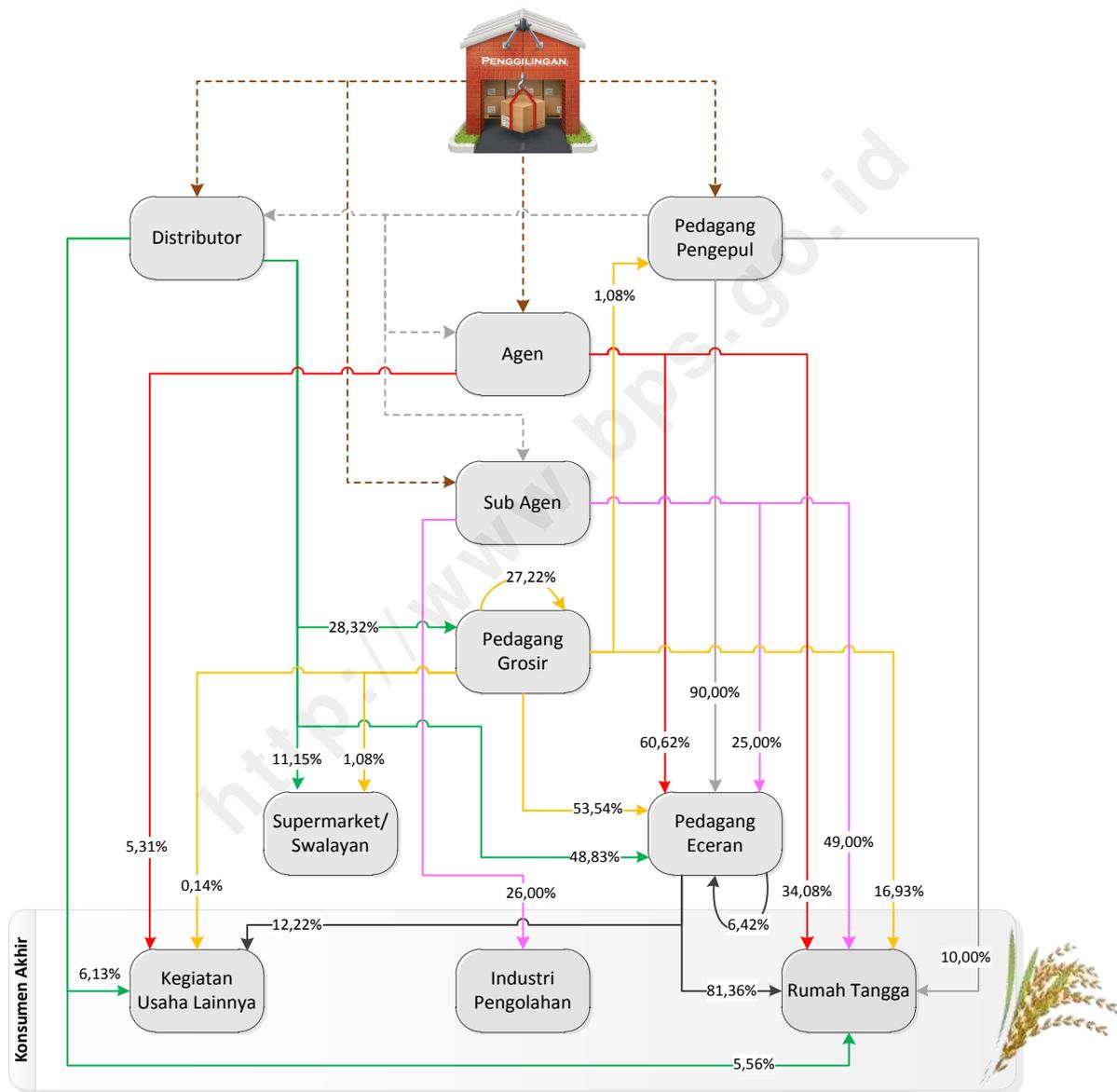
2.4.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa hasil produksi beras oleh produsen di Provinsi Sumatera Barat dijual sebagian besar ke pedagang eceran dan agen, yang masing-masing besarnya 56,78 persen dan 21,96 persen. Sisanya dijual melalui distributor sebesar 7,34 persen, pedagang grosir sebesar 0,67 persen, dan sebagian lainnya langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 13. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Barat

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Sumatera Barat melibatkan banyak fungsi usaha, seperti: distributor, pedagang pengepul, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa alur distribusi terpendek adalah dari produsen → distributor/pedagang pengepul → rumah tangga. Sedang alur distribusi terpanjang adalah produsen → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 14. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Barat

2.4.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 12,66 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 9,96 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 12,18 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 11,48 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 12,5 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 10,48 persen.

Tabel 5. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sumatera Barat

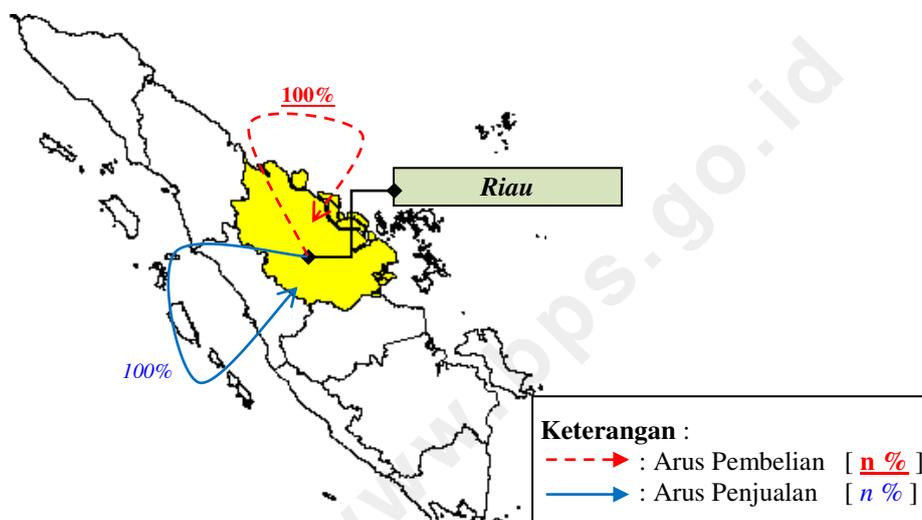
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.371,23	3.332,80	1.717,39
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.217,16	2.970,88	1.526,64
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	51,15	63,00	52,33
Rata-rata MPP (juta Rp)	154,07	361,93	190,75
Rasio MPP (%)	12,66	12,18	12,50
Rata-rata MP (juta Rp)	121,19	340,93	159,97
Rasio MP (%)	9,96	11,48	10,48

2.5 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru.

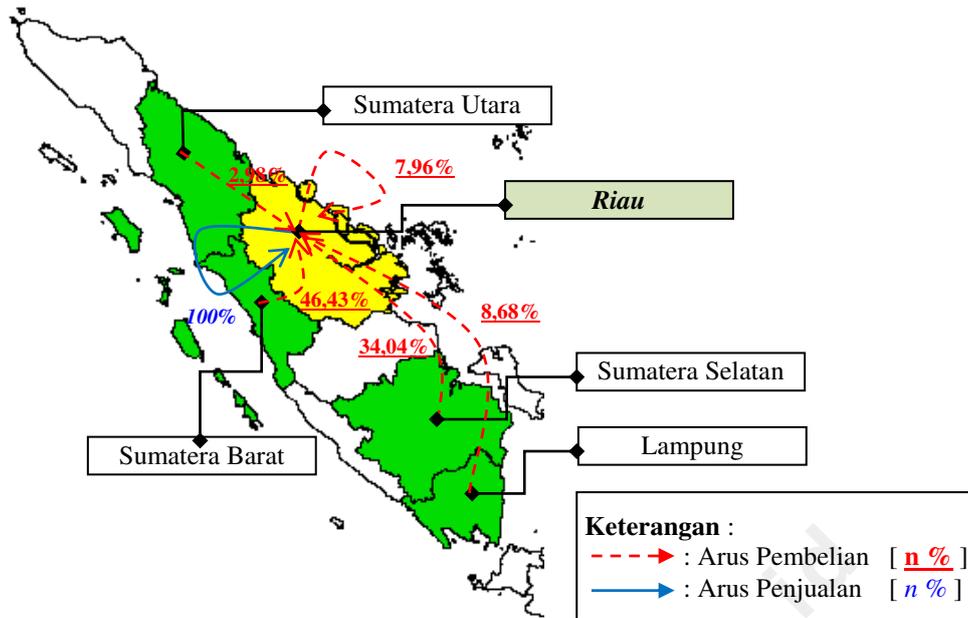
2.5.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras di Provinsi Riau memperoleh seluruh gabah padi untuk kemudian digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Riau sendiri. Beras hasil produksi tersebut kemudian seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Riau. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap dapat dilihat pada **Gambar 15**.



Gambar 15. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Riau

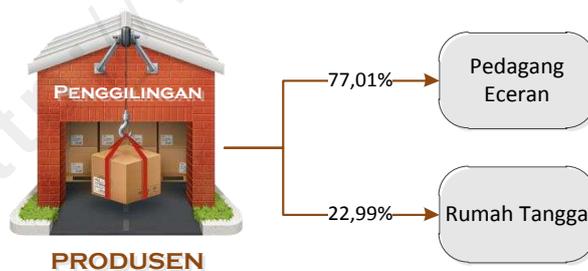
Pada tingkat pedagang diketahui bahwa asal pasokan beras di Provinsi Riau tidak hanya berasal dari dalam Riau. Pasokan beras dari dalam Provinsi Riau justru hanya sebesar 7,96 persen. Sementara sebagian besar lainnya berasal dari beberapa provinsi sekitar, seperti: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Provinsi pemasok beras terbesar untuk wilayah Riau berasal dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, masing-masing 46,43 persen dan 34,04 persen. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 16. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau

2.5.2 Pola Distribusi

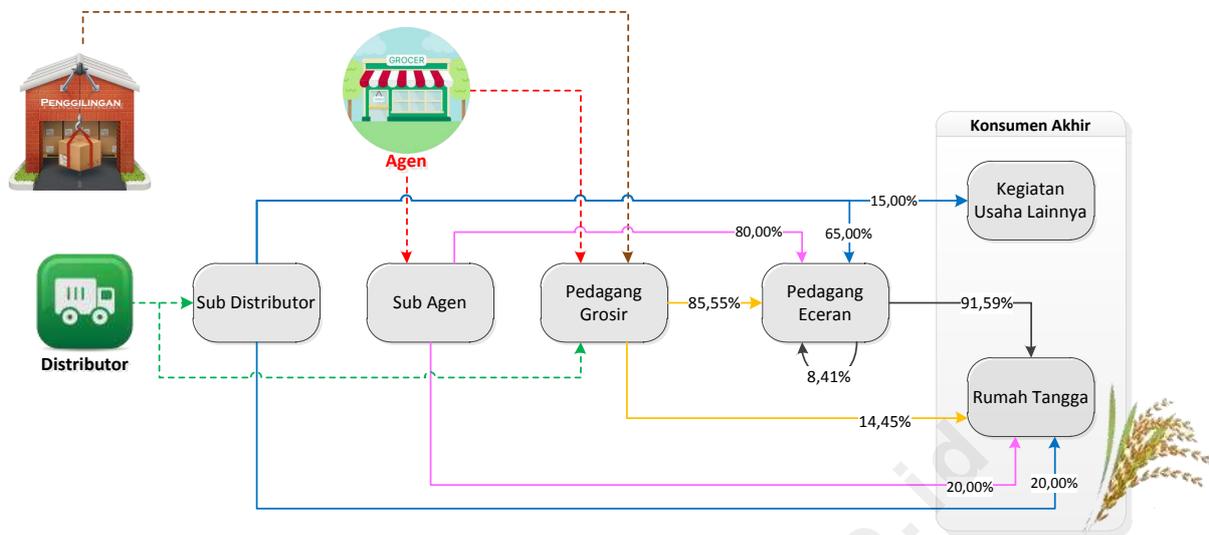
Penggilingan Padi yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, menjual sebagian besar hasil produksinya melalui pedagang eceran sebesar 88,18 persen. Selain itu beras di Provinsi Riau juga dijual melalui agen, pedagang grosir maupun langsung ke konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 17. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Riau

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pola perdagangan beras di tingkat pedagang di Provinsi Riau melibatkan beberapa fungsi usaha, seperti: subdistributor, subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Dari Gambar 18, dapat dilihat bahwa rantai distribusi perdagangan di Provinsi Riau terbilang tidak terlalu kompleks. Subdistributor, sub agen, dan pedagang grosir yang mendapat pasokan berasnya dari distributor, agen, maupun langsung dari produsen tersebut, kemudian menjual sebagian besar pasokan berasnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual 91,59 persen pasokan beras tersebut ke rumah tangga

dan 8,41 persen sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 18. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Riau

2.5.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,08 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,05 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,34 persen, sedangkan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 8,75 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Riau adalah sebesar 7,17 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 7,12 persen.

Tabel 6. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Riau

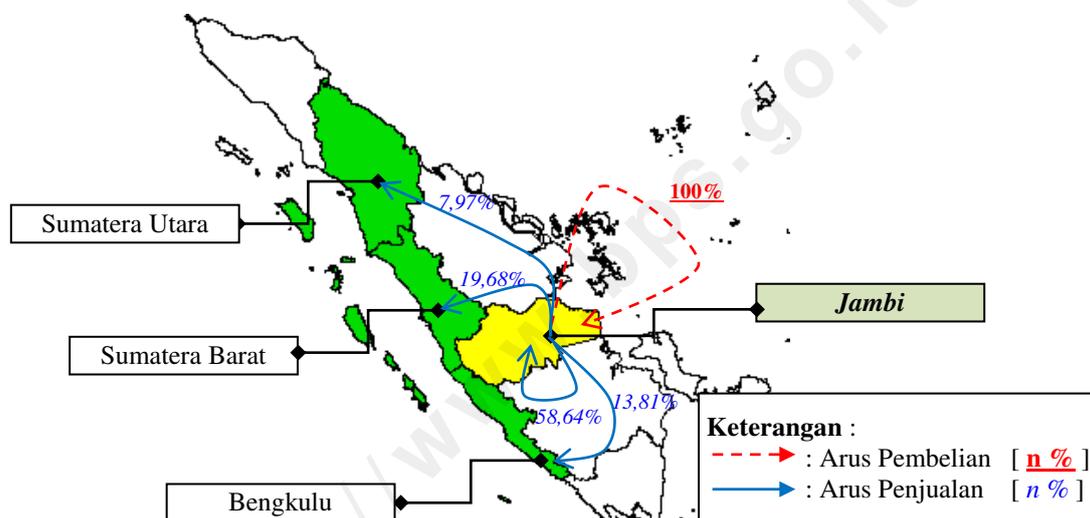
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.145,34	219,82	1.579,01
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	2.003,58	201,04	1.473,42
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	2,96	-	5,96
Rata-rata MPP (juta Rp)	141,76	18,79	105,59
Rasio MPP (%)	7,08	9,34	7,17
Rata-rata MP (juta Rp)	141,27	17,59	104,89
Rasio MP (%)	7,05	8,75	7,12

2.6 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

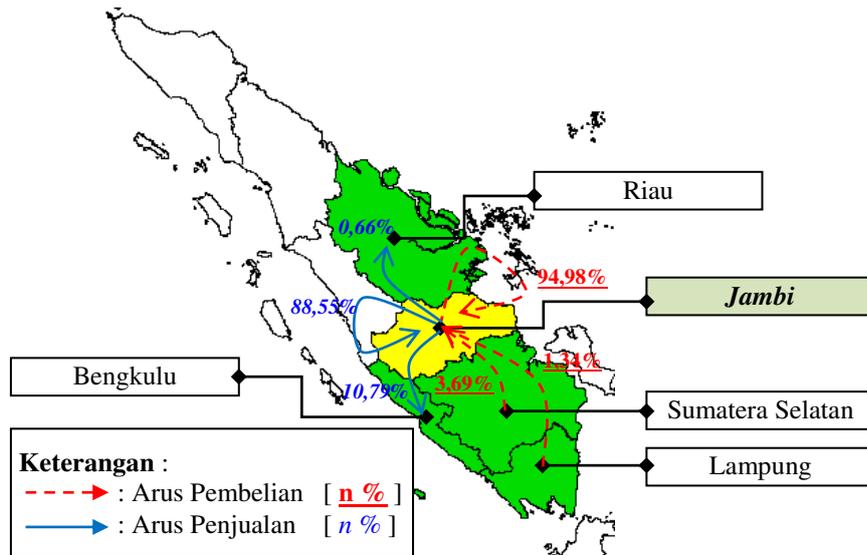
2.6.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Jambi memperoleh gabah padi dari dalam Provinsi Jambi sendiri. Hasil penggilingan gabah padi yang berupa beras pun kemudian dijual baik ke dalam wilayah Jambi sendiri maupun ke beberapa provinsi lainnya. Sekitar 58,64 persen dari pasokan beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam wilayah Jambi sendiri. Sementara sisanya dijual ke Sumatera Utara (7,97%), Sumatera Barat (19,68%), dan Bengkulu (13,81%). Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Jambi secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 19. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jambi

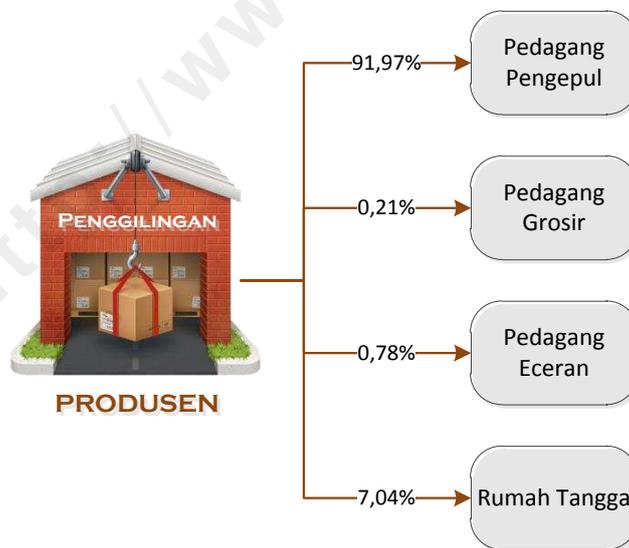
Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jambi di bawah menunjukkan bahwa 94,98 persen pasokan beras yang masuk kedalam wilayah Jambi berasal dari dalam Provinsi Jambi sendiri. Sementara sebagian kecil sisanya berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan dari sisi penjualan, sebagian besar pasokan tersebut dipasarkan ke dalam Provinsi Jambi sendiri, yaitu sebesar 88,55 persen. Sedangkan sisanya, dijual ke Provinsi Riau (0,66%) dan Provinsi Bengkulu (10,79). Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jambi secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 20. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi

2.6.2 Pola Distribusi

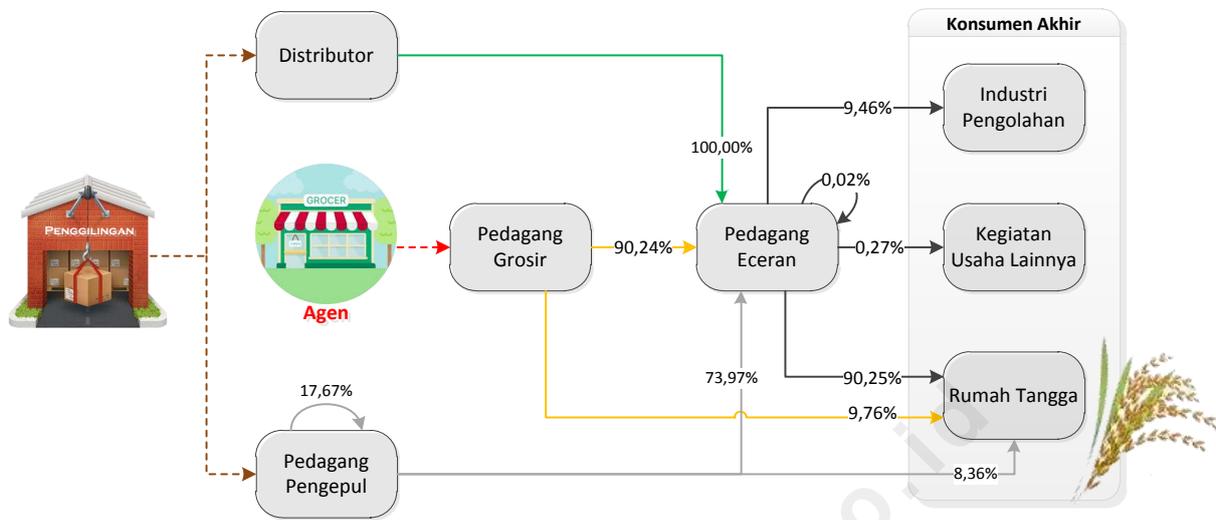
Dari hasil survei dapat diperoleh informasi bahwa produksi beras di Provinsi Jambi sebagian besar dijual ke pedagang pengepul, yaitu sebesar 91,97 persen. Sementara sisanya dijual melalui pedagang grosir, pedagang eceran, maupun langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 21. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jambi

Dari sisi pedagang, distribusi beras di Provinsi Jambi melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu distributor, pedagang pengepul, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Distributor dan pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan berasnya dari produsen, menjual sebagian besar pasokan

tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual 90,25 persen dari pasokan yang didapatnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 22. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jambi

2.6.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 5,24 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 4,17 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 1,60 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 1,60 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Jambi adalah sebesar 3,46 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 2,91 persen.

Tabel 7. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jambi

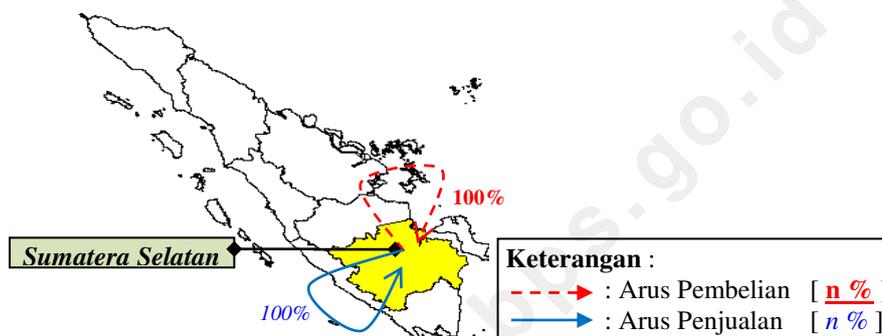
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.043,98	1.453,04	1.207,60
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	991,97	1.430,20	1.167,26
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	23,95	-	23,95
Rata-rata MPP (juta Rp)	52,01	22,83	40,34
Rasio MPP (%)	5,24	1,60	3,46
Rata-rata MP (000 Rp)	41,36	22,83	33,95
Rasio MP (%)	4,17	1,60	2,91

2.7 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Hulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

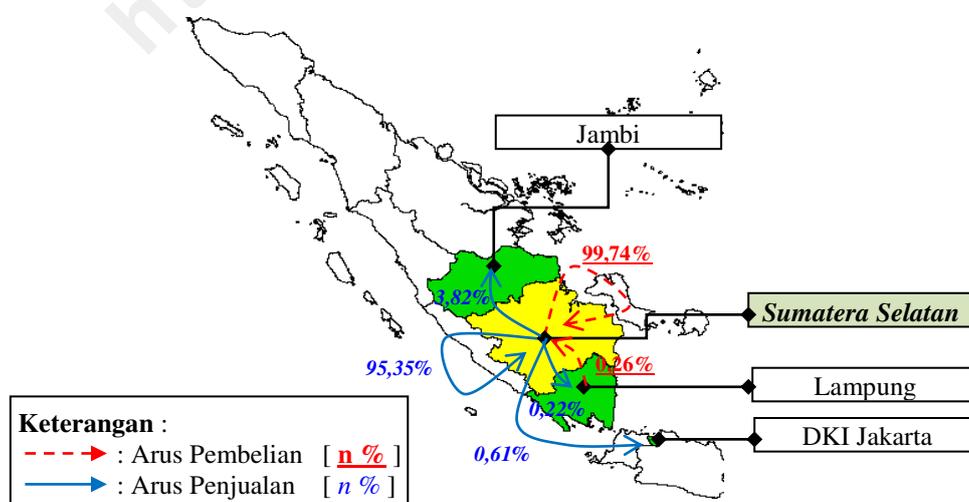
2.7.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh seluruh gabah padinya dari dalam Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Beras hasil penggilingan tersebut kemudian dijual seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 23. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Selatan

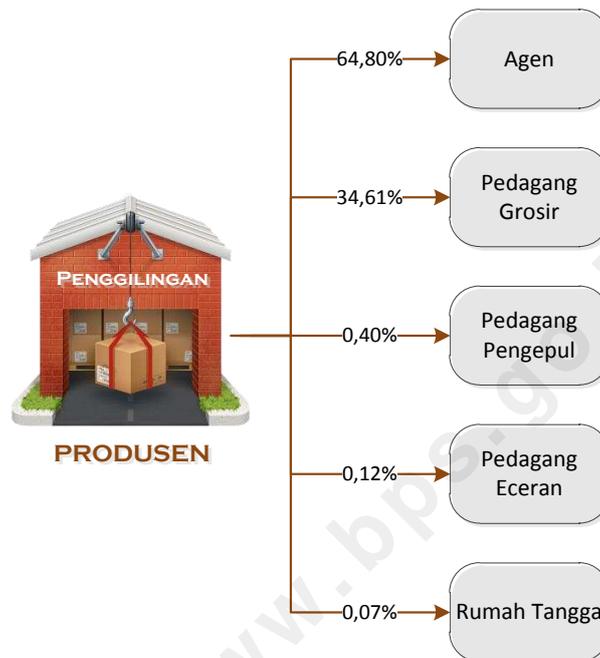
Di tingkat pedagang diketahui bahwa asal pasokan beras di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berasal dari dalam Sumatera Selatan dan sebagian kecil dari Lampung. Pasokan beras tersebut oleh pedagang kemudian dijual ke dalam Provinsi Sumatera Selatan sebesar 95,35 persen, sedangkan sisanya dijual ke Jambi, Lampung, dan DKI Jakarta. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 24. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan

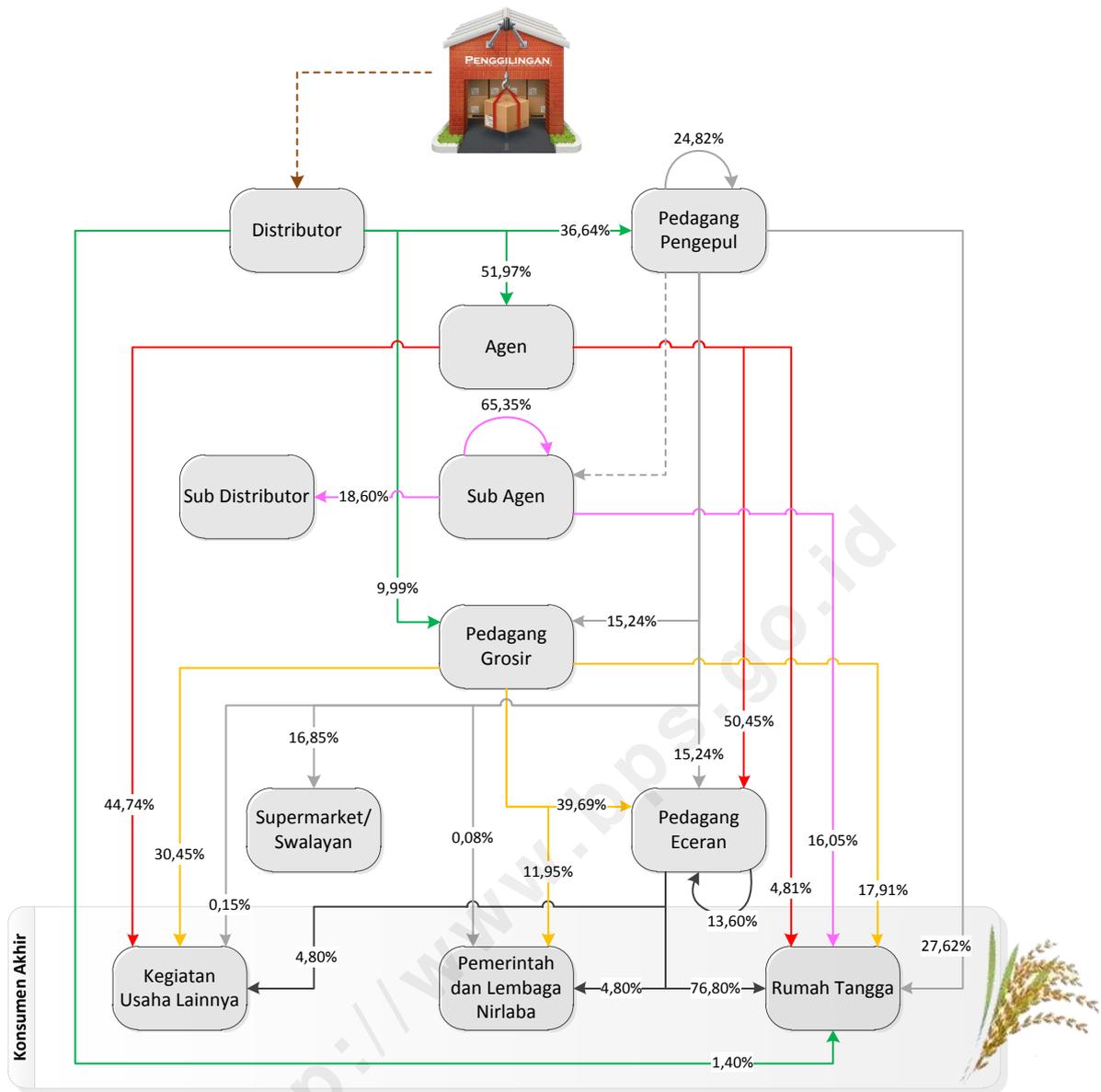
2.7.2 Pola Distribusi

Penggilingan padi yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, menjual sebagian besar hasil produksinya melalui agen, yaitu sebesar 64,80 persen. Selain dijual melalui agen, beras hasil penggilingan tersebut juga dijual melalui pedagang grosir, pedagang pengepul, pedagang eceran, maupun langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 25. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sumatera Selatan

Dari tingkat pedagang dapat diketahui bahwa pola perdagangan beras di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan fungsi usaha distributor, agen, subagen, pedagang grosir, supermarket/swalayan dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Dari Gambar 26. terlihat bahwa distributor yang mendapatkan pasokan berasnya dari produsen kemudian menjual sebagian besar pasokan tersebut ke agen. Agen kemudian menjual separuh dari total beras yang dibelinya ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual 76,80 persen dari pasokan beras yang dibelinya ke rumah tangga, sedangkan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 26. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sumatera Selatan

2.7.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 15,19 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 13,86 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 26,87 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 24,02 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 15,24 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 13,9 persen.

**Tabel 8. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Sumatera Selatan**

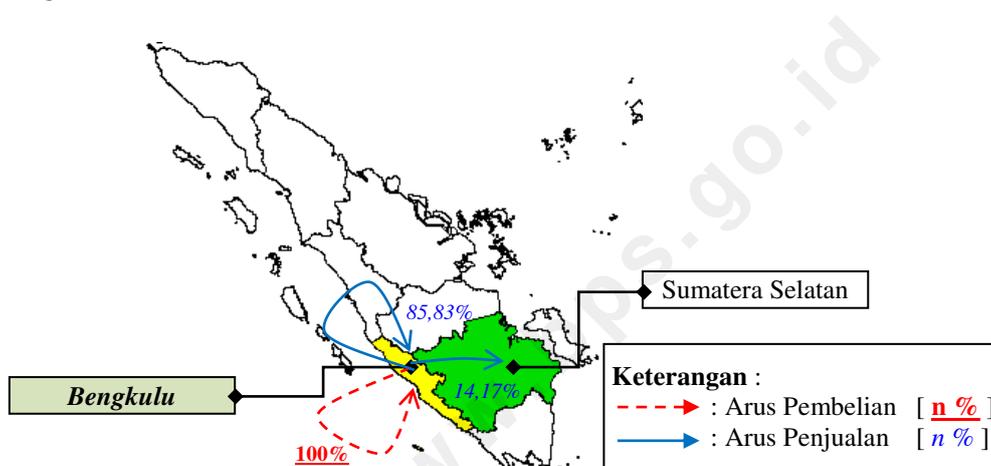
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.957,29	133,33	2.721,96
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	2.567,25	105,09	2.362,07
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	46,89	6,00	44,48
Rata-rata MPP (juta Rp)	390,04	28,24	359,89
Rasio MPP (%)	15,19	26,87	15,24
Rata-rata MP (juta Rp)	355,94	25,24	328,38
Rasio MP (%)	13,86	24,02	13,90

2.8 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu.

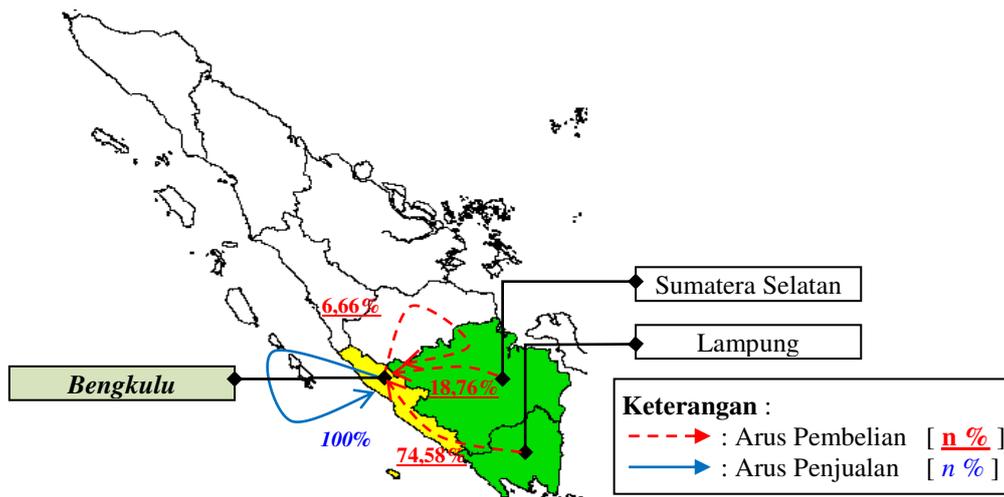
2.8.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa produsen beras di Provinsi Bengkulu memperoleh gabah padi dari dalam Provinsi Bengkulu sendiri. Hasil penggilingan yang berupa beras kemudian dijual ke dalam Provinsi Bengkulu sebesar 85,83 persen dan 14,17 persen sisanya dijual ke Sumatera Selatan. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Bengkulu secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 27. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bengkulu

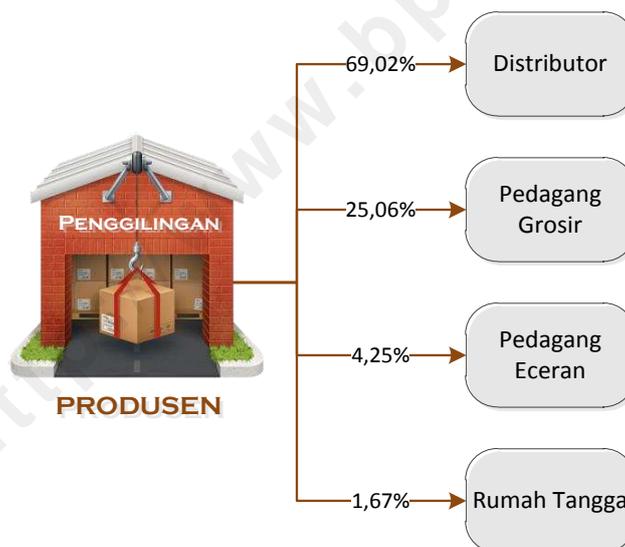
Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pasokan beras yang ada di Provinsi Bengkulu tidak hanya berasal dari dalam wilayah Bengkulu sendiri. Dari hasil survei diketahui bahwa pasokan beras terbesar justru berasal dari Provinsi Lampung, yaitu sebesar 74,58 persen. Sedangkan dari sisi penjualan, seluruh pasokan beras tersebut hanya dijual ke dalam Provinsi Bengkulu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 28. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu

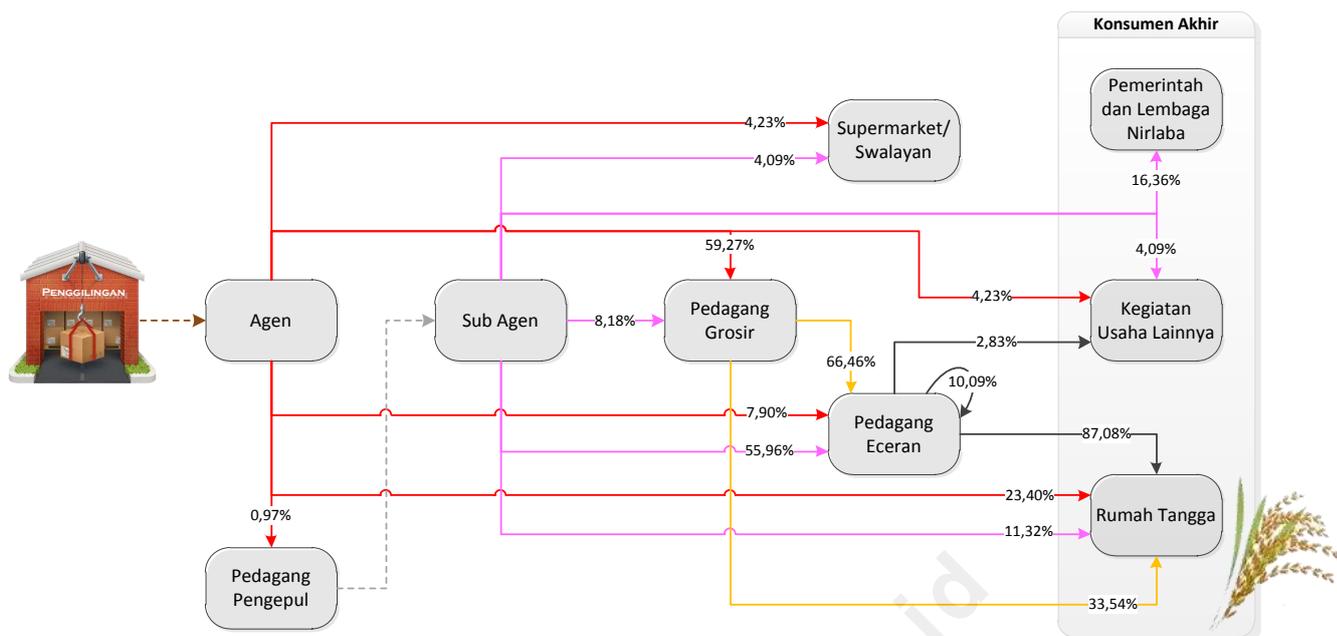
2.8.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diketahui bahwa produsen di Provinsi Bengkulu menjual 69,02 persen dari hasil penggilingan berasnya melalui distributor. Sisanya dijual melalui pedagang grosir, pedagang eceran, dan sebagian kecil lainnya dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 29. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bengkulu

Dari sisi pola distribusi perdagangan, agen beras di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan pasokan berasnya langsung dari penggilingan beras, kemudian menjual 59,27 persen dari pasokan beras tersebut ke pedagang grosir. Pedagang grosir yang selain mendapat pasokan beras dari agen juga mendapat pasokan beras dari subagen kemudian menjual beras tersebut ke pedagang eceran sebesar 66,46 persen. Oleh pedagang eceran, pasokan beras yang didapat dari berbagai lembaga usaha tersebut dijual ke rumah tangga sebesar 87,08 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran maupun ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 30. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bengkulu

2.8.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 7,69 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 4,6 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,91 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,58 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 7,68 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 4,6 persen.

Tabel 9. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Bengkulu

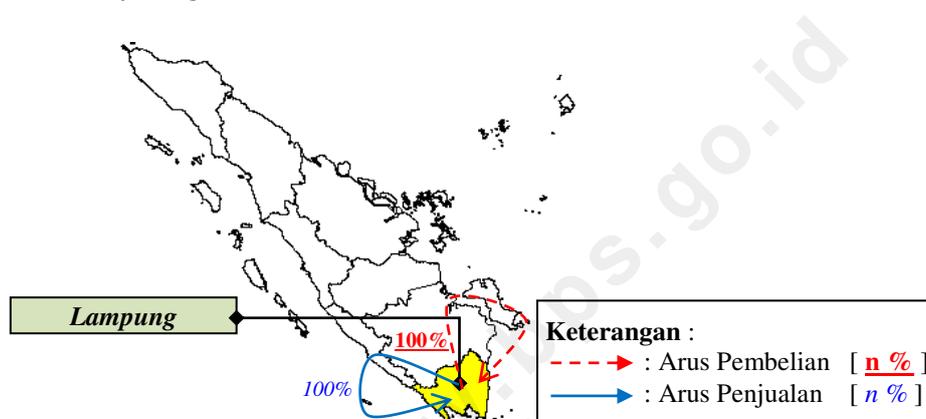
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	10.014,01	75,46	5.306,28
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	9.299,27	70,59	4.927,79
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	319,30	1,20	180,13
Rata-rata MPP (juta Rp)	714,74	4,88	378,49
Rasio MPP (%)	7,69	6,91	7,68
Rata-rata MP (juta Rp)	427,37	3,94	226,80
Rasio MP (%)	4,60	5,58	4,60

2.9 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung.

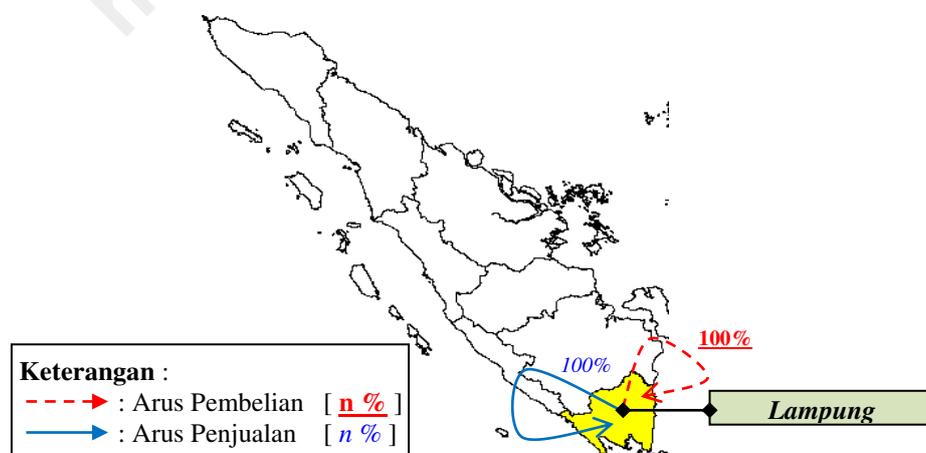
2.9.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Lampung memperoleh seluruh gabah padi untuk kemudian digiling menjadi beras dari dalam wilayah Provinsi Lampung sendiri. Seluruh hasil produksi beras tersebut juga selanjutnya hanya dijual ke dalam Provinsi Lampung sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 31. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Lampung

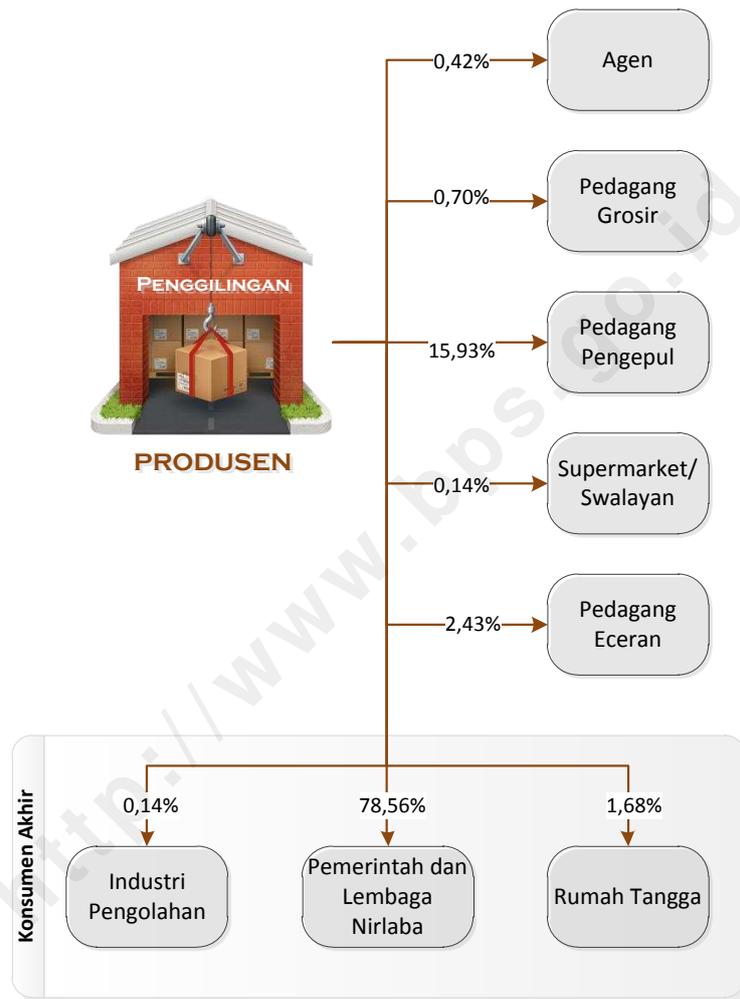
Dari sisi pedagang, didapatkan informasi bahwa pasokan beras di Provinsi Lampung seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Lampung sendiri. Seluruh pasokan beras tersebut juga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Lampung sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 32. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung

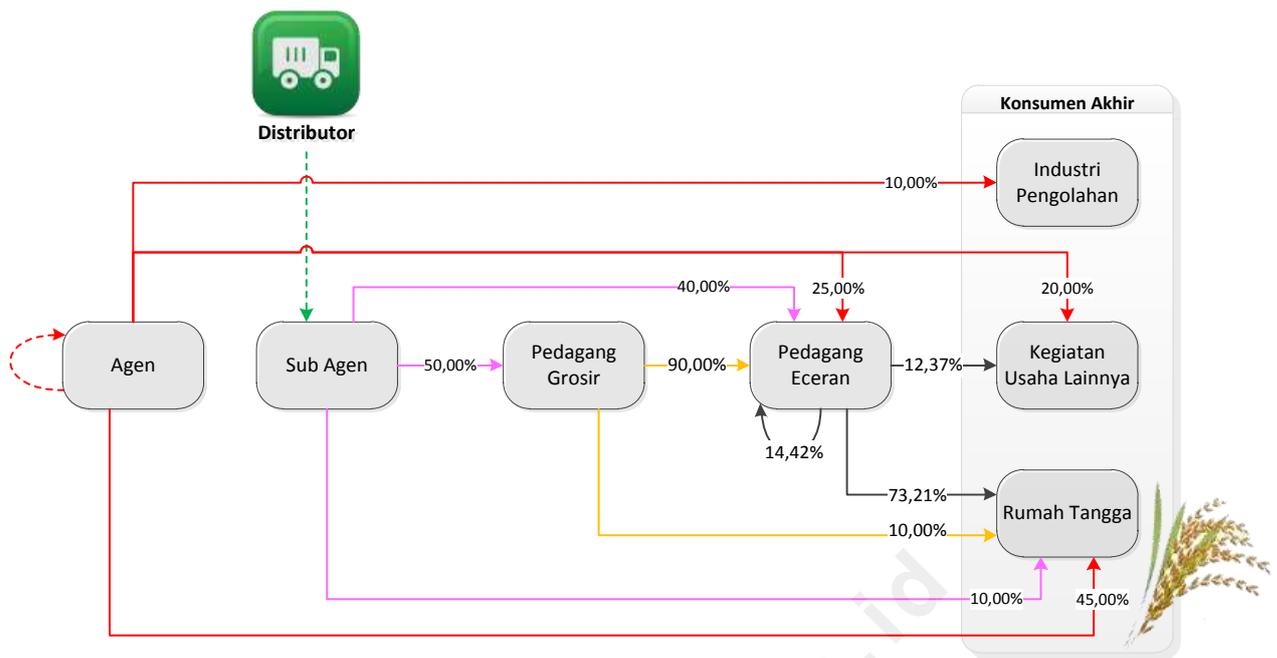
2.9.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa beras hasil produksi dari penggilingan beras yang ada di provinsi Lampung sebagian besar dijual melalui pemerintah dan lembaga nirlaba serta pedagang pengepul. Hanya sebagian kecil saja dari produksi beras tersebut yang dijual melalui agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, maupun langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi komoditas beras di wilayah Provinsi Lampung secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 33. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Lampung

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa agen mendapat pasokan beras dari sesama agen di wilayah Lampung. Beras tersebut kemudian dijual seperempatnya ke pedagang eceran sedangkan sisanya dijual langsung ke konsumen akhir. Sementara sub agen yang mendapat pasokan berasnya dari distributor kemudian menjual setengah dari pasokan tersebut ke pedagang grosir. Oleh pedagang grosir, pasokan beras tersebut 90,00 persen dijual ke pedagang eceran dan 10 persen ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 34. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Lampung

2.9.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 3,67 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,67 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,62 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 8,44 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Lampung adalah sebesar 5,79 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 5,71 persen.

Tabel 10. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Lampung

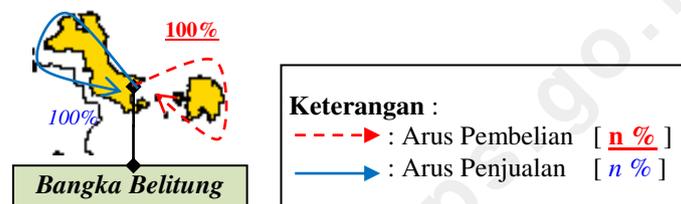
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	478,92	167,26	263,15
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	461,98	153,98	248,75
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	-	0,50	0,50
Rata-rata MPP (juta Rp)	16,93	13,28	14,40
Rasio MPP (%)	3,67	8,62	5,79
Rata-rata MP (juta Rp)	16,93	13,00	14,21
Rasio MP (%)	3,67	8,44	5,71

2.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang.

2.10.1 Peta Distribusi

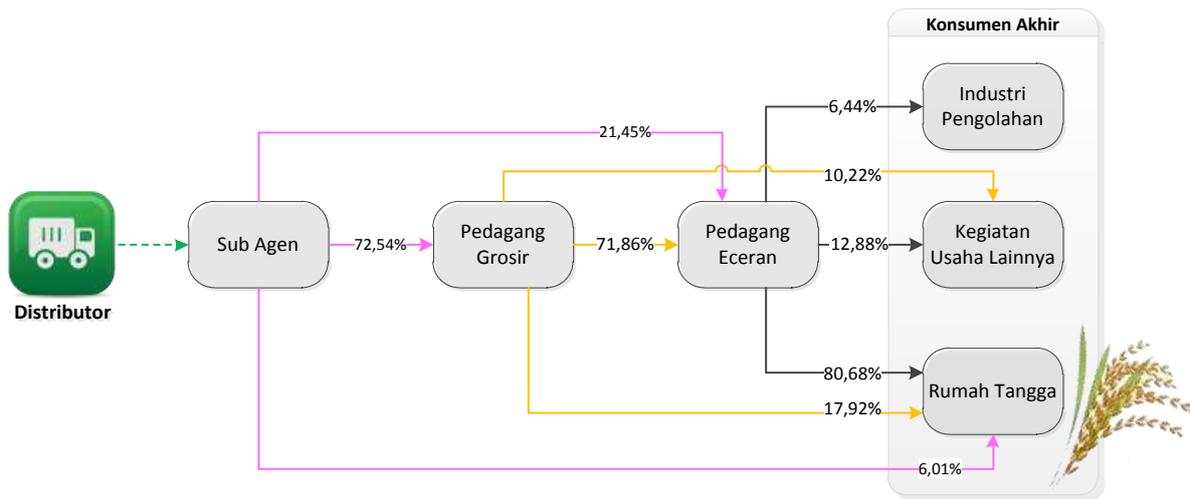
Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa seluruh pasokan beras pedagang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari dalam wilayahnya sendiri. Pasokan beras tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 35. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.10.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa subagen yang mendapat pasokan berasnya dari distributor, kemudian menjual 72,54 persen pasokan beras tersebut ke pedagang grosir. Oleh pedagang grosir, beras tersebut kemudian dijual ke pedagang eceran sebesar 71,86 persen. Selanjutnya, pedagang eceran menjualnya ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan rumah tangga. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 36. Pola Distribusi Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.10.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 11, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,93 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 6,85 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 10,27 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 10,14 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 7,64 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 7,55 persen.

Tabel 11. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

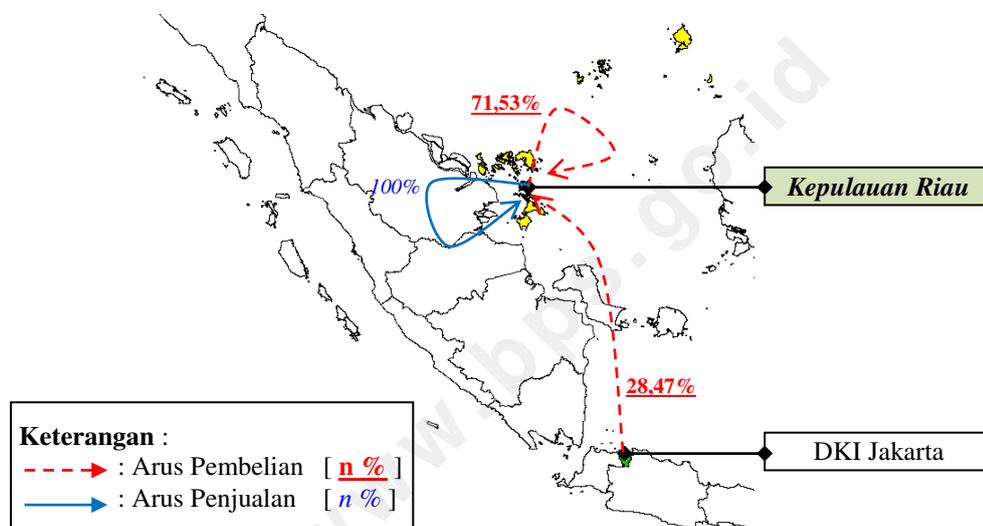
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.396,63	387,14	891,88
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.306,09	351,09	828,59
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	1,71	0,58	1,06
Rata-rata MPP (juta Rp)	90,55	36,05	63,30
Rasio MPP (%)	6,93	10,27	7,64
Rata-rata MP (juta Rp)	89,52	35,59	62,55
Rasio MP (%)	6,85	10,14	7,55

2.11 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

2.11.1 Peta Distribusi

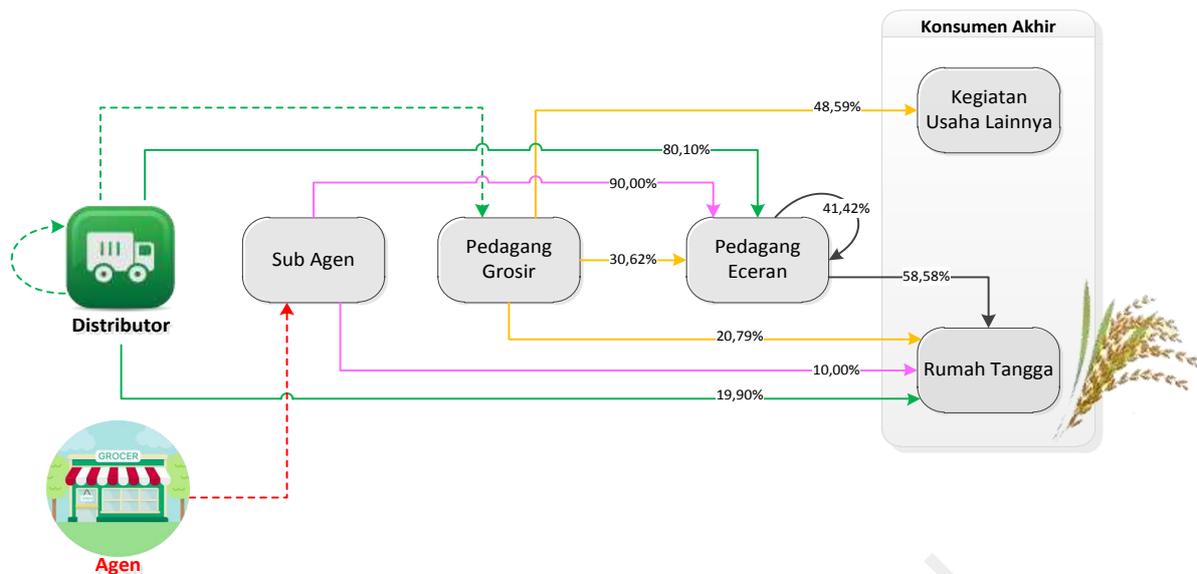
Hasil survei di tingkat pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar beras yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri, yaitu sebesar 71,53 persen. Sementara sisanya dipasok dari Provinsi DKI Jakarta. Stok beras tersebut kemudian seluruhnya dijual untuk konsumsi di dalam Kepulauan Riau sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut.



Gambar 37. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau

2.11.2 Pola Distribusi

Dari hasil pencacahan terhadap beberapa pedagang beras di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat diketahui bahwa distributor beras mendapatkan pasokan berasnya dari sesama distributor di wilayah DKI Jakarta maupun dari wilayah Kepulauan Riau sendiri. Pasokan tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 80,10 persen dan rumah tangga sebesar 19,90 persen. Sejalan dengan pola penjualan distributor, subagen yang mendapatkan pasokan berasnya dari agen, kemudian menjual kembali 90,00 persen dari pasokan beras tersebut ke pedagang eceran dan sisanya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 38. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kepulauan Riau

2.11.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 12, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 3,54 persen dan rata-rata marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 2,31 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 5,41 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,41 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 3,73 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 2,63 persen.

Tabel 12. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kepulauan Riau

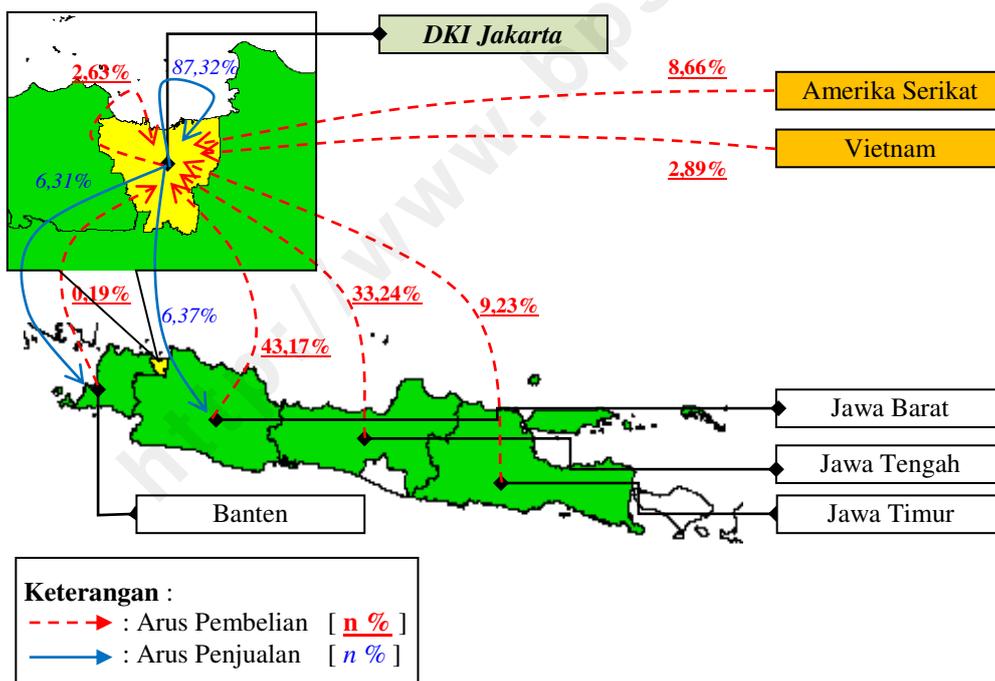
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.965,24	114,12	731,16
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.898,07	108,26	704,87
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	61,98	0,00	46,49
Rata-rata MPP (juta Rp)	67,17	5,85	26,29
Rasio MPP (%)	3,54	5,41	3,73
Rata-rata MP (juta Rp)	43,93	5,85	18,54
Rasio MP (%)	2,31	5,41	2,63

2.12 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Utara.

2.12.1 Peta Distribusi

Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan beras yang masuk ke wilayah Jakarta berasal dari luar Jakarta, bahkan dari luar negeri. Dari hasil survei diketahui bahwa pasokan beras di Provinsi DKI Jakarta terbesar berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 43,17 persen. Provinsi pemasok beras ke Jakarta yang tak kalah besar dari Jawa Barat adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 33,24 persen. Sementara sisanya berasal dari beberapa provinsi sekitar dan juga luar negeri, seperti: Amerika Serikat dan Vietnam. Sedangkan dari sisi penjualan, 87,32 persen dari pasokan beras tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan beras di dalam Provinsi DKI Jakarta sendiri. Sisanya dijual kembali ke Banten dan Jawa Barat. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

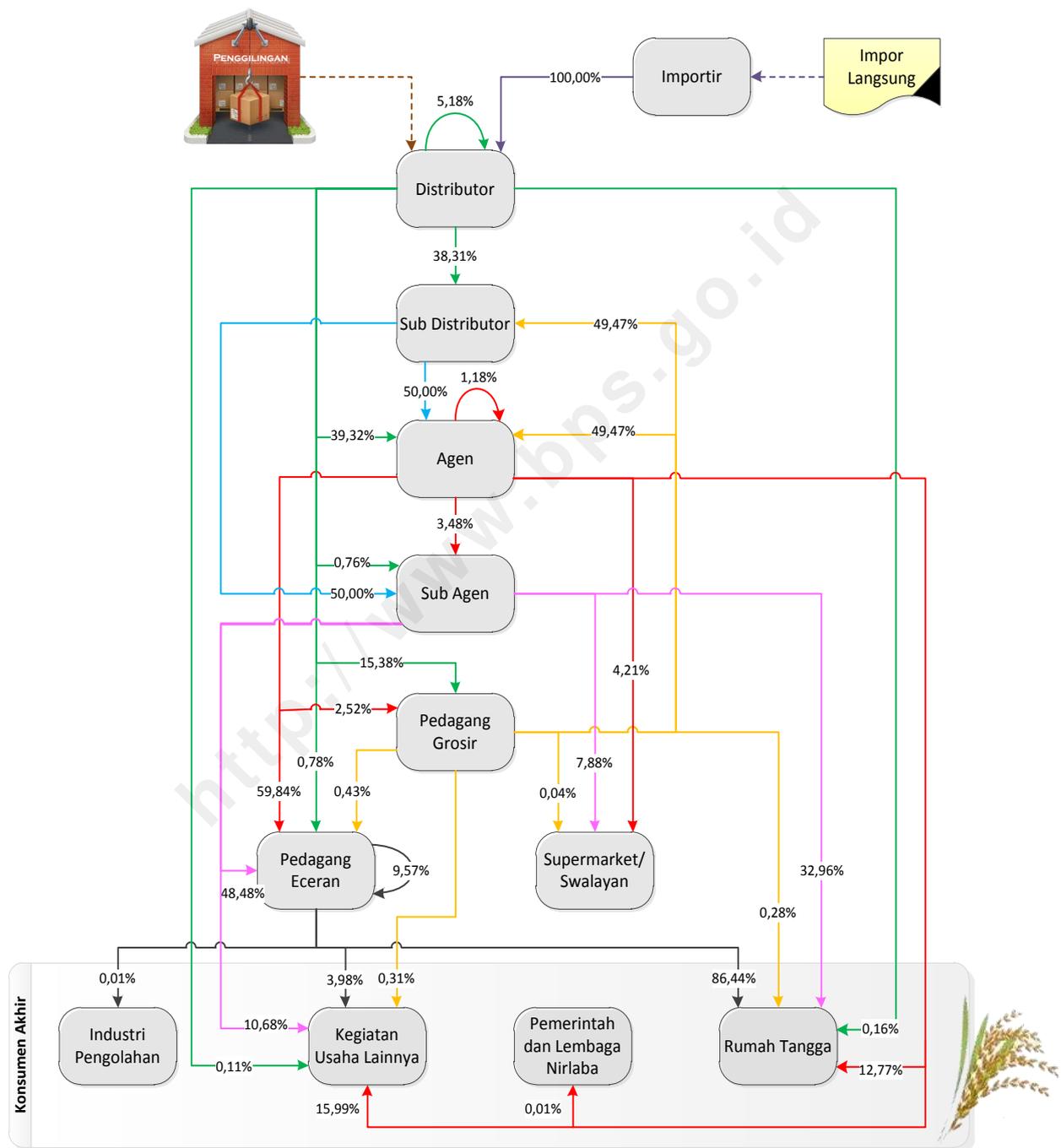


Gambar 39. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta

2.12.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan beras di Provinsi DKI Jakarta memang cukup kompleks. Banyak fungsi usaha yang terlibat dalam rantai distribusi sehingga beras tersebut dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen. Distribusi beras di Provinsi DKI Jakarta melibatkan fungsi usaha importir, distributor, subdistributor, agen, subagen,

pedagang grosir, pedagang eceran, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Distributor mendapat pasokan berasnya baik langsung dari produsen, importir, maupun dari sesama distributor. Beras tersebut kemudian dijual ke berbagai lembaga usaha dengan level dibawahnya, seperti: subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan sebagian kecil penjualannya langsung ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 40. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi DKI Jakarta

2.12.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 13, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 11,89 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 11,84 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 18,67 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 17,55 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 11,93 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 11,88 persen.

Tabel 13. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi DKI Jakarta

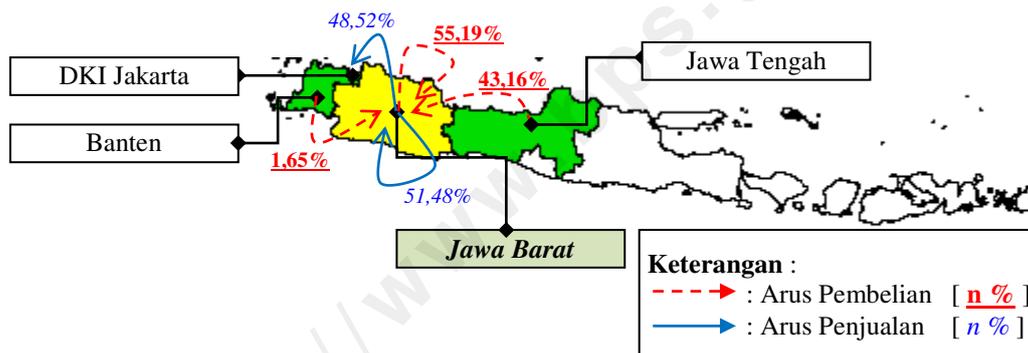
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	62.548,46	435,91	33.155,91
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	55.901,03	367,32	29.621,69
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	36,18	10,95	28,30
Rata-rata MPP (juta Rp)	6.647,43	68,59	3.534,23
Rasio MPP (%)	11,89	18,67	11,93
Rata-rata MP (juta Rp)	6.620,45	64,45	3.518,06
Rasio MP (%)	11,84	17,55	11,88

2.13 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

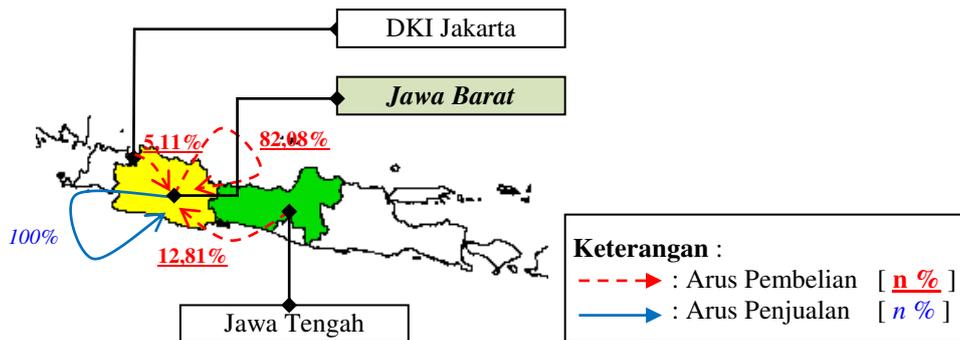
2.13.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, penggilingan padi yang terdapat di Provinsi Jawa Barat memperoleh gabah padi untuk kemudian digiling menjadi beras dari provinsi-provinsi sekitar, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah maupun dari dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri. Pasokan padi terbesar berasal dari dalam Provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu sebesar 55,19 persen. Beras sebagai hasil produksi selanjutnya dijual sebagian besar ke dalam provinsi Jawa Barat sendiri, yaitu sebesar 51,48 persen. Sisanya sebesar 48,52 persen dijual ke DKI Jakarta. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 41. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat

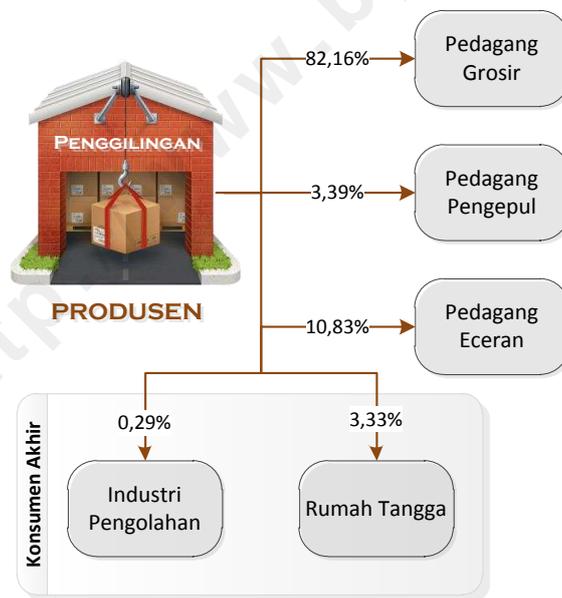
Dari sisi perdagangan didapatkan informasi bahwa selain mendapat pasokan beras dari dalam wilayah sendiri, yaitu sebesar 82,08 persen, pedagang beras di Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan beras dari provinsi sekitar. Pasokan beras dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,81 persen dan DKI Jakarta sebesar 5,11 persen. Beras-beras tersebut kemudian dipasarkan seluruhnya ke dalam Provinsi Jawa Barat. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 42. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat

2.13.2 Pola Distribusi

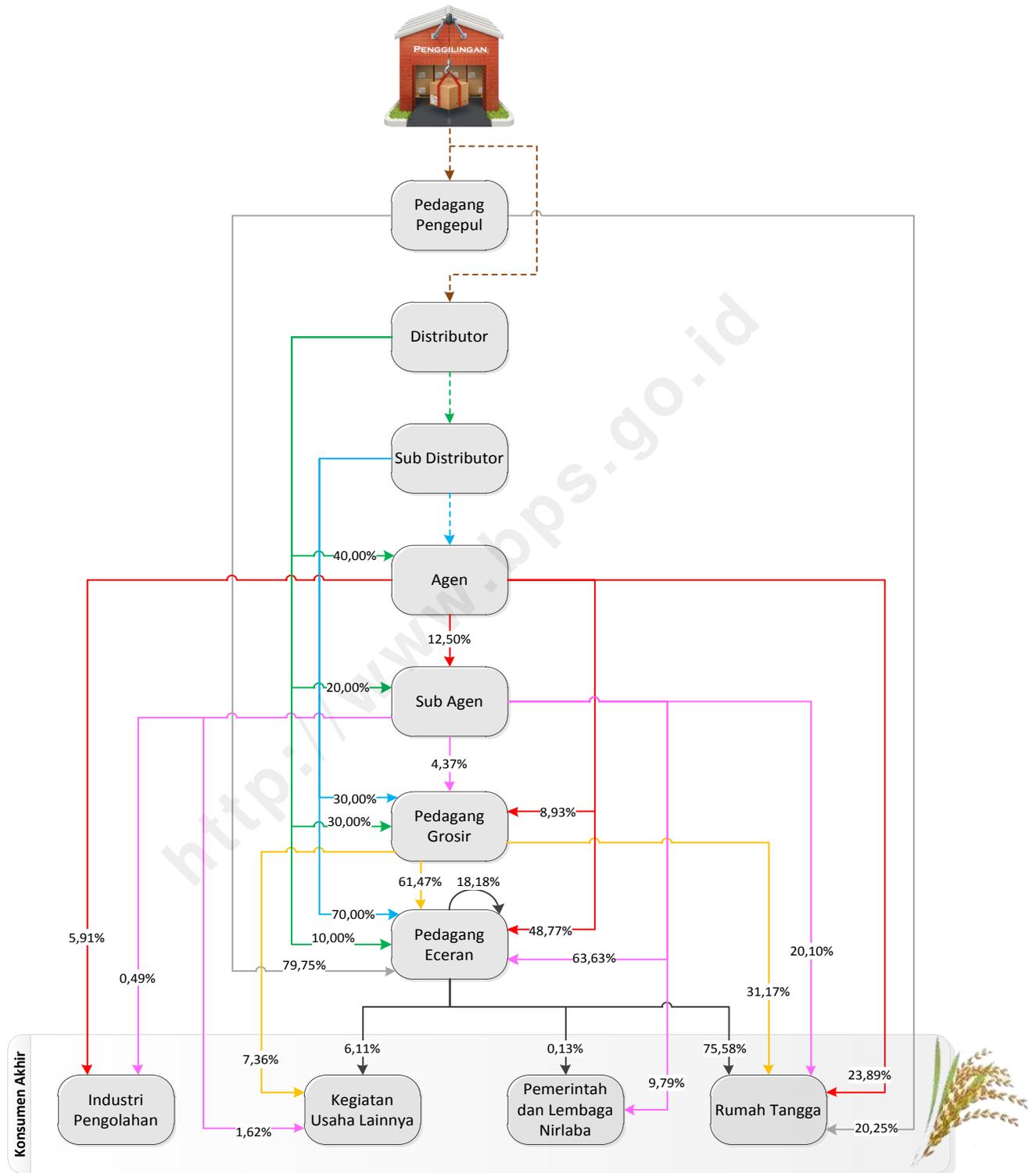
Dari hasil survei dapat diketahui bahwa beras hasil produksi dari penggilingan beras yang ada di Provinsi Jawa Barat dijual melalui berbagai lembaga usaha perdagangan. Sebagian besar hasil produksi dijual ke pedagang grosir dan sebagian lainnya dijual ke pedagang pengepul maupun pedagang eceran. Beras dari produsen tersebut sebagian kecil juga ada yang langsung dijual ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan dan rumah tangga. Pola penjualan produksi komoditas beras di wilayah Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 43. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Barat

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan beras di Provinsi Jawa Barat melibatkan pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, dan juga pedagang eceran. Sedangkan konsumen akhir beras terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Distributor merupakan pemegang kunci distribusi perdagangan. Distributor yang mendapatkan pasokan beras dari produsen kemudian

menjual beras tersebut ke berbagai fungsi usaha seperti agen, subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Dari pola distribusi perdagangan yang tergambar pada Gambar 44, tampak kompleksitas pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 44. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Barat

2.13.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,74 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 6,01 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 10,21 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 9,88 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 7,08 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,38 persen.

Tabel 14. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Barat

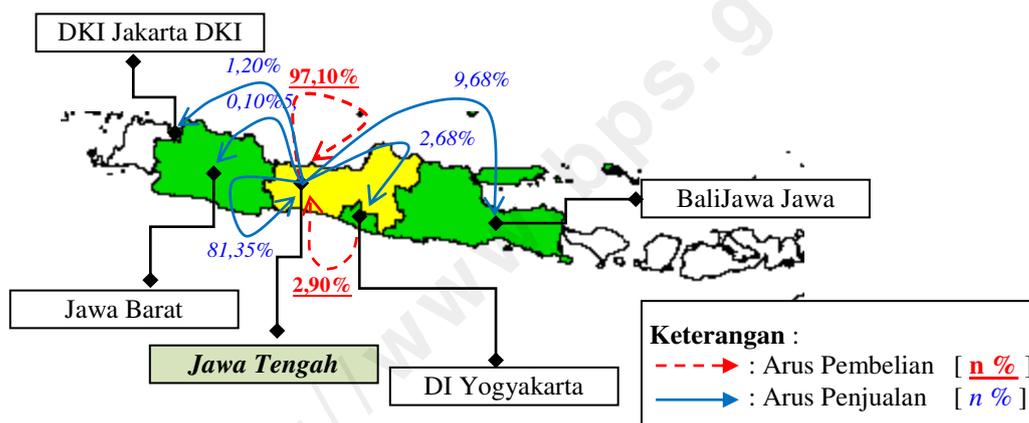
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.110,00	565,57	1.661,62
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.976,70	513,18	1.551,80
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	30,40	4,27	23,87
Rata-rata MPP (juta Rp)	133,31	52,39	109,81
Rasio MPP (%)	6,74	10,21	7,08
Rata-rata MP (juta Rp)	118,80	50,73	99,03
Rasio MP (%)	6,01	9,88	6,38

2.14 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

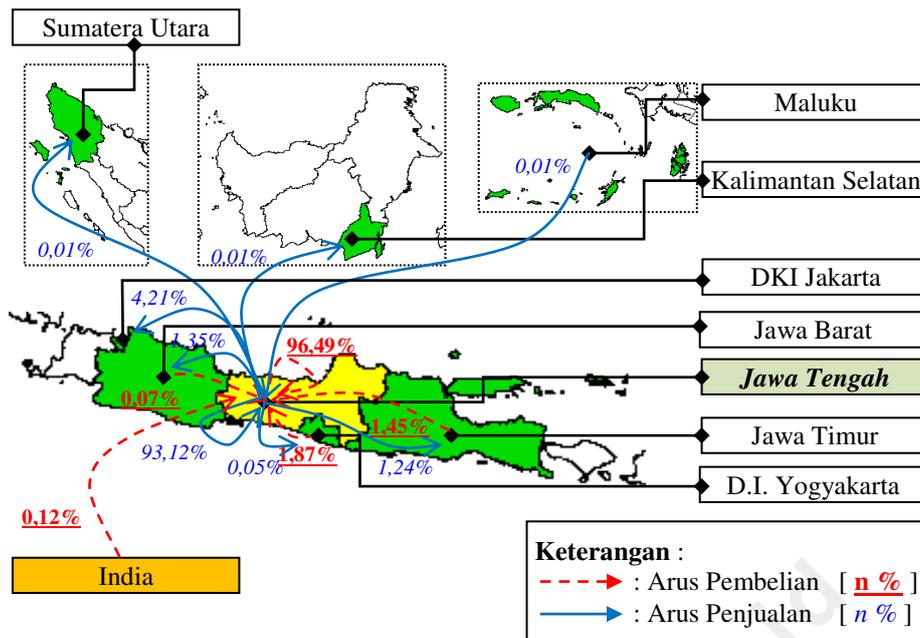
2.14.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah memperoleh 97,10 persen gabah padi untuk kemudian digiling menjadi beras dari dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri. Sebagian kecil sisanya berasal dari Provinsi D.I. Yogyakarta. Sebagian besar hasil produksi tersebut selanjutnya dijual di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sisanya dipasarkan ke provinsi sekitar, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 45. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Tengah

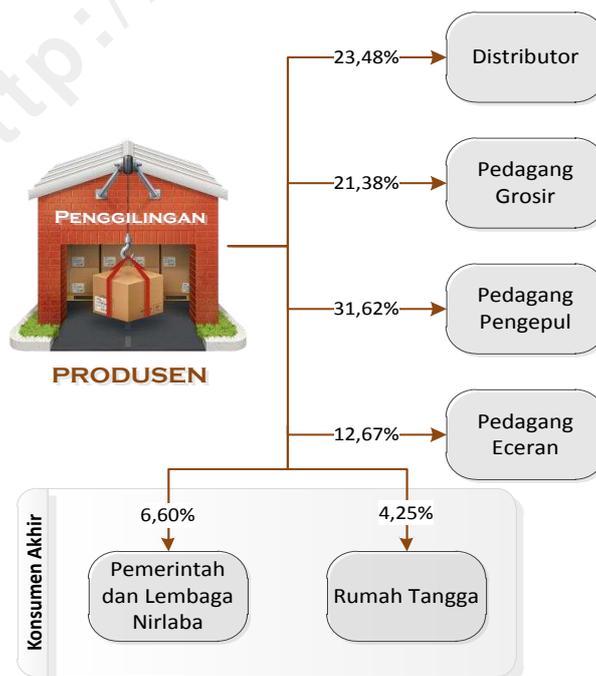
Hasil survei terhadap beberapa pedagang beras di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa selain mendapatkan sebagian besar pasokan beras dari dalam provinsi sendiri maupun dari beberapa provinsi sekitar, sebagian kecil beras di Jawa Tengah juga ada yang berasal dari India, yaitu sebesar 0,12 persen. Pedagang membeli 96,49 persen dari total pembelian berasnya dari dalam wilayah Jawa Tengah sendiri. Beras tersebut selanjutnya dijual kembali sebagian besar di dalam Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 93,12 persen. Sedangkan sisanya dijual ke provinsi lain, seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 46. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Tengah

2.14.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa beras hasil produksi dari penggilingan beras yang ada di Provinsi Jawa Tengah dijual melalui berbagai fungsi usaha. Beras sebagai hasil penggilingan padi tersebut dijual ke distributor sebesar 23,48 persen, pedagang grosir sebesar 21,38, dan pedagang pengepul sebesar 31,62 persen. Sebagian kecil beras tersebut juga ada yang dijual langsung ke konsumen akhir yang terdiri dari pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Pola penjualan produksi komoditas beras di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 47. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Tengah

2.14.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 15, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,25 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,36 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 5,26 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,49 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 6,24 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 5,35 persen.

Tabel 15. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Tengah

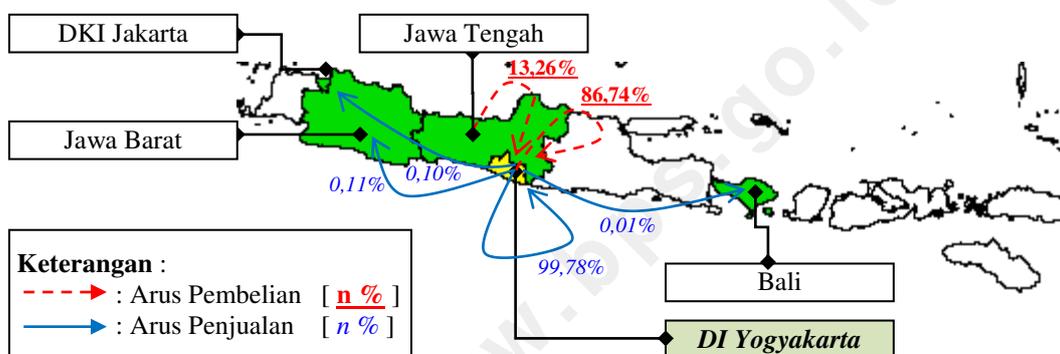
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	5.448,29	121,04	3.983,30
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	5.127,75	114,99	3.749,24
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	88,24	11,22	79,18
Rata-rata MPP (juta Rp)	320,55	6,05	234,06
Rasio MPP (%)	6,25	5,26	6,24
Rata-rata MP (juta Rp)	274,90	4,01	200,41
Rasio MP (%)	5,36	3,49	5,35

2.15 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

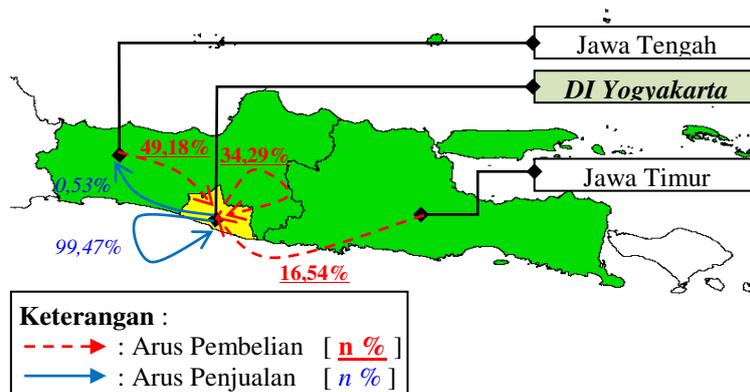
2.15.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta memperoleh padi dari dalam D.I. Yogyakarta sendiri sebesar 86,74 persen sedangkan sisanya sebesar 13,26 persen berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya hasil produksi berupa beras sebagian besar dipasarkan ke dalam Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu sebesar 99,78 persen. Sementara sebagian kecil sisanya dipasarkan ke Jawa Barat dan DKI Jakarta. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

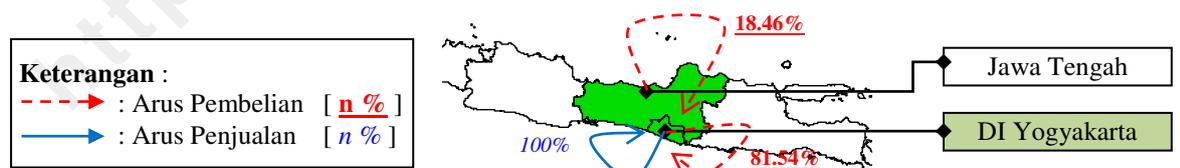


Gambar 49. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

Distribusi perdagangan beras di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa asal pasokan beras di D.I. Yogyakarta sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 49,18 persen. Sementara sisanya berasal dari wilayah sendiri dan Provinsi Jawa Timur. Beras tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 99,47 persen dan sisanya sebesar 0,53 persen dijual kembali ke Jawa Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 50.

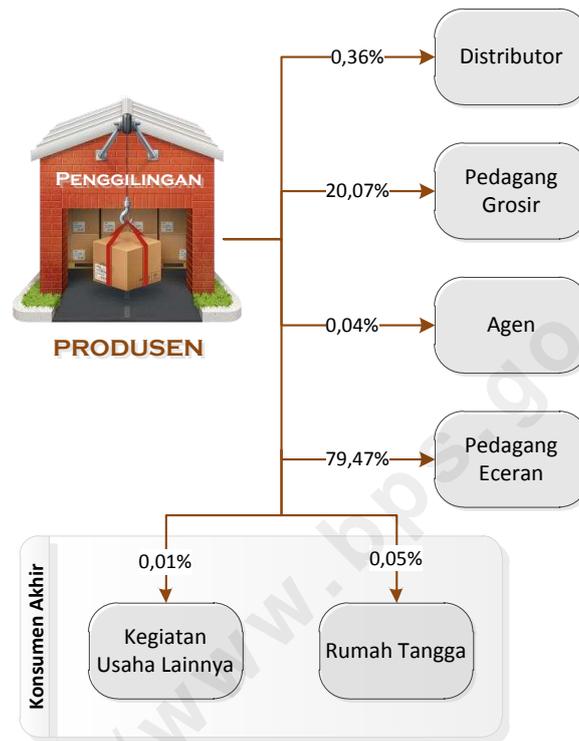


Gambar 50. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta



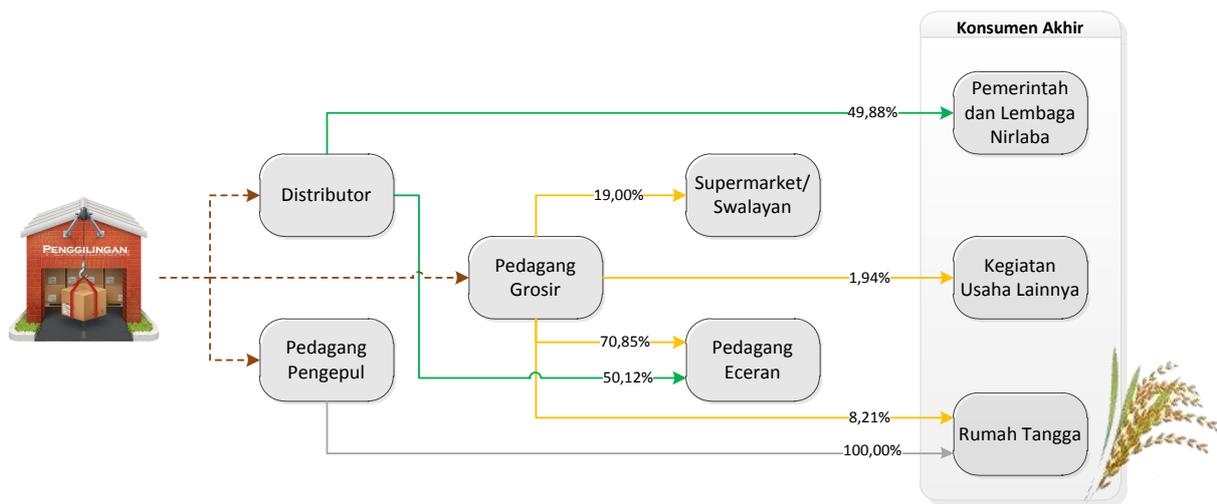
2.15.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap beberapa penggilingan padi yang berlokasi di Provinsi D.I. Yogyakarta diperoleh informasi bahwa hasil produksi beras sebagian besar dijual melalui pedagang eceran, yaitu sebesar 79,47 persen. Selain dijual kepada distributor, produsen juga menjual 20,07 persen beras hasil produksinya ke pedagang grosir. Pola penjualan produksi beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 51. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari hasil survei terhadap beberapa pedagang beras, diketahui bahwa fungsi usaha yang terlibat dalam rantai distribusi beras di Provinsi D.I. Yogyakarta tidaklah terlalu kompleks. Distributor yang mendapat pasokan berasnya dari pedagang pengepul menjual kembali berasnya ke pedagang eceran sebesar 50,12 persen serta ke pemerintah dan lembaga nirlaba sebesar 49,88 persen. Sementara itu, pedagang grosir yang mendapat pasokan berasnya dari produsen dan pedagang pengepul kemudian menjual kembali sebagian besar pasokan berasnya ke pedagang eceran, yaitu sebesar 70,85 persen. Sisanya dijual ke supermarket/swalayan dan langsung ke konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 52. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

2.15.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 16, diperoleh informasi bahwa perolehan marjin pedagang besar beras di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebesar 6,94 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,85 persen. Pedagang eceran dalam Tabel 16 bertanda (-) dikarenakan tidak ada sampel pedagang eceran yang dialokasikan dalam survei ini.

Tabel 16. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi D.I. Yogyakarta

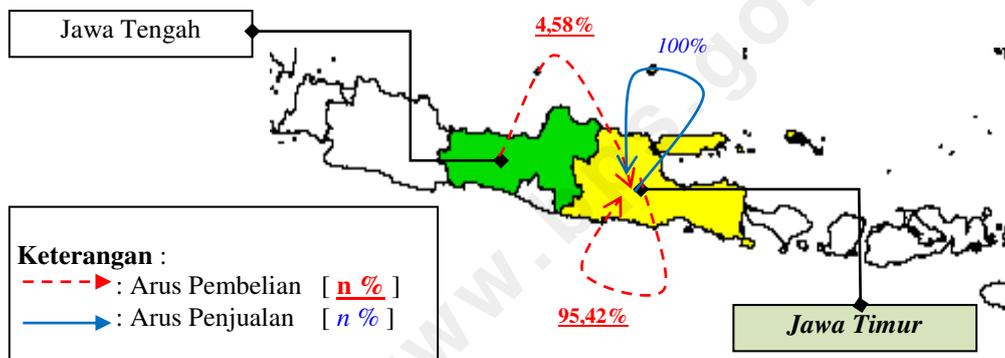
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	16.977,34	-	16.977,34
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	15.875,48	-	15.875,48
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	17,75	-	17,75
Rata-rata MPP (juta Rp)	1.101,86	-	1.101,86
Rasio MPP (%)	6,94	-	6,94
Rata-rata MP (juta Rp)	1.087,34	-	1.087,34
Rasio MP (%)	6,85	-	6,85

2.16 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kota Batu.

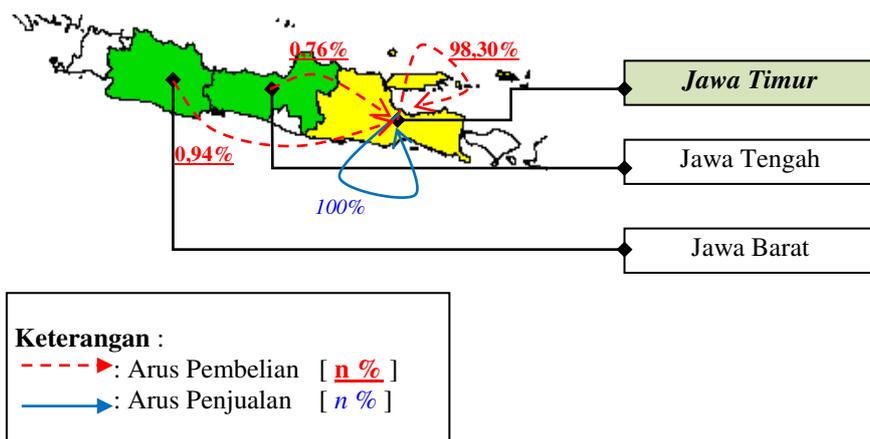
2.16.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar padi yang diperoleh produsen di Provinsi Jawa Timur berasal dari dalam Provinsi Jawa Timur sendiri. Sebagian kecil lainnya, yaitu sebesar 4,58 persen berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya beras hasil produksi tersebut dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Jawa Timur sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 53. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Timur

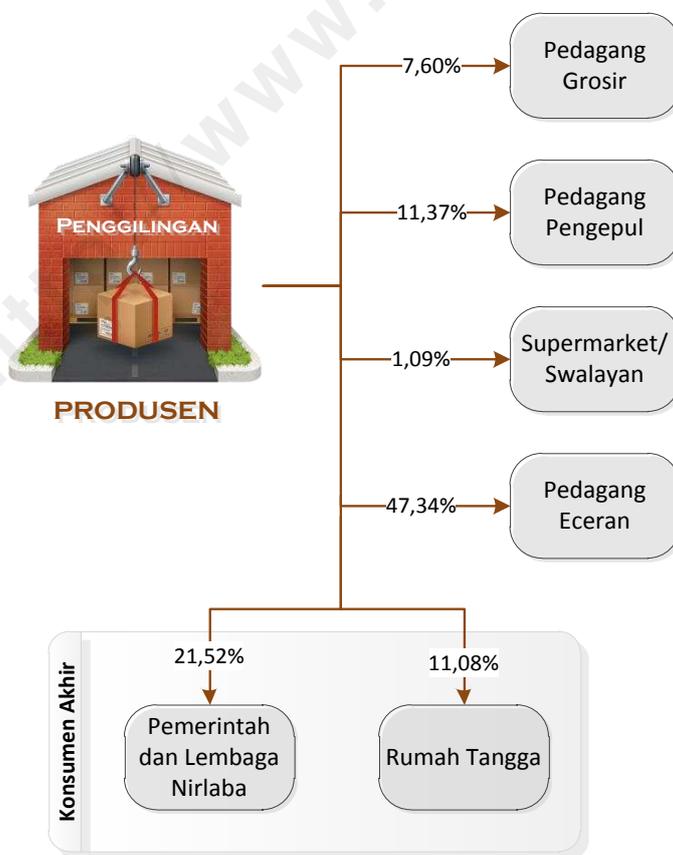
Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pasokan beras yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur sebagian besar berasal dari dalam wilayah sendiri, yaitu sebesar 98,30 persen. Pasokan beras lainnya berasal dari Jawa Tengah sebesar 0,76 persen dan sisanya sebesar 0,94 persen berasal dari Jawa Barat. Pasokan beras tersebut kemudian seluruhnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan beras di dalam Provinsi Jawa Timur sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 54. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur

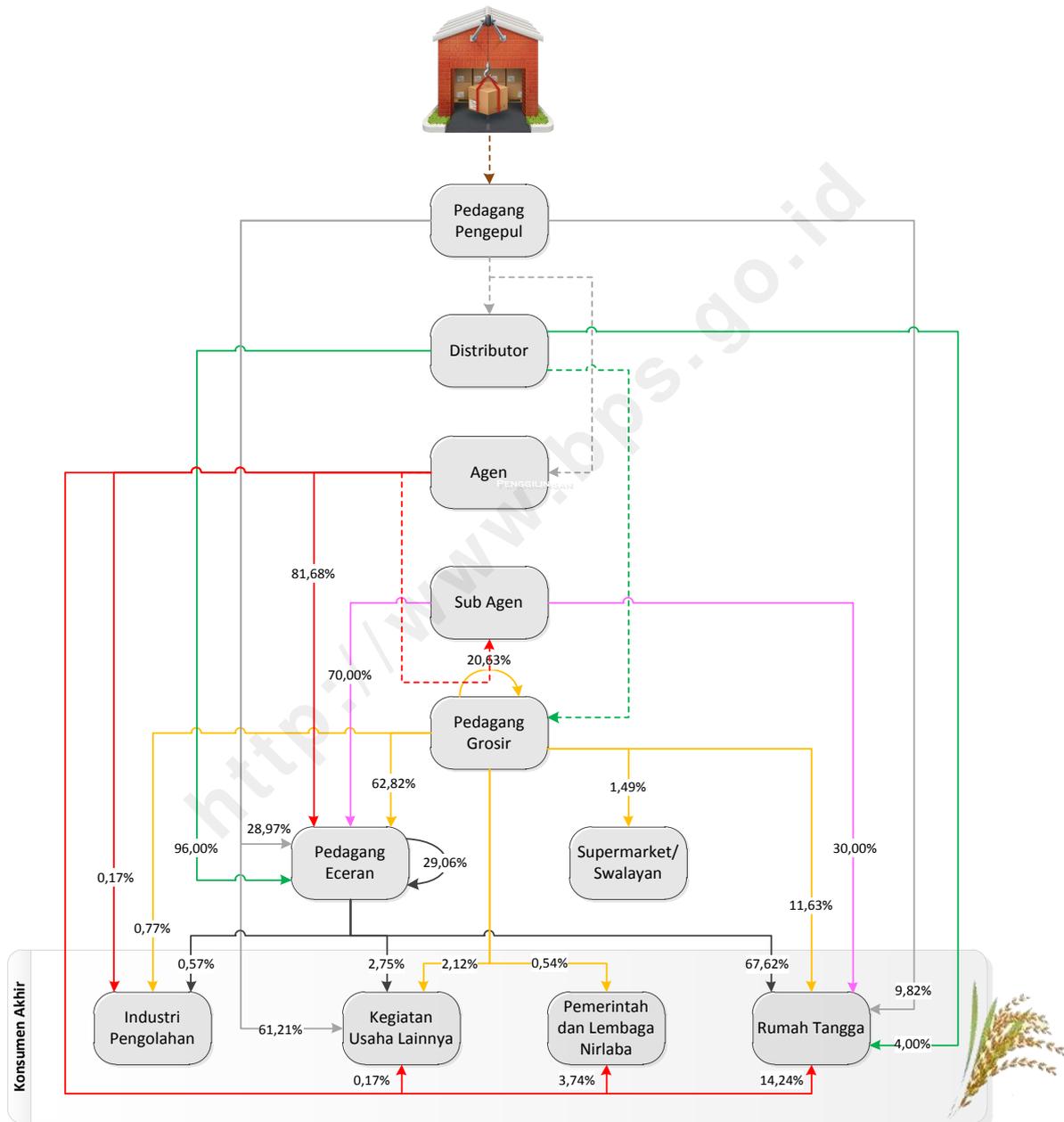
2.16.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap beberapa penggilingan padi di Provinsi Jawa Timur, diperoleh informasi bahwa hasil produksi perusahaan penggilingan padi yang berupa beras dijual melalui beberapa lembaga usaha perdagangan. Penjualan terbesar adalah melalui pedagang eceran, yaitu sebesar 47,34 persen. Sementara sisanya dijual baik melalui pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket/swalayan, maupun dijual langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 55. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Jawa Timur

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Jawa Timur melibatkan fungsi usaha pedagang pengepul, distributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Distributor yang mendapatkan pasokan berasnya dari pedagang pengepul kemudian menjual kembali pasokan tersebut ke pedagang eceran sebesar 96,00 persen dan rumah tangga sebesar 4,00 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 56. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Jawa Timur

2.16.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 17, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 4,14 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 2,02 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 2,70 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 2,43 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 3,98 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 2,07 persen.

Tabel 17. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Jawa Timur

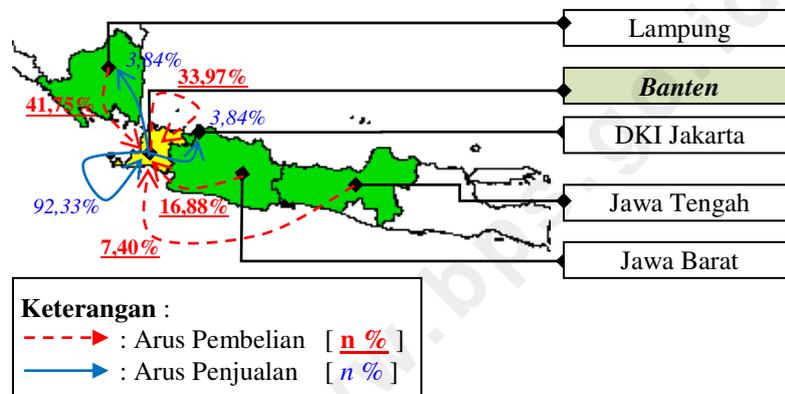
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.498,43	697,85	1.323,75
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.438,81	679,51	1.273,14
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	48,67	4,47	41,77
Rata-rata MPP (juta Rp)	59,62	18,34	50,61
Rasio MPP (%)	4,14	2,70	3,98
Rata-rata MP (juta Rp)	29,05	16,48	26,31
Rasio MP (%)	2,02	2,43	2,07

2.17 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

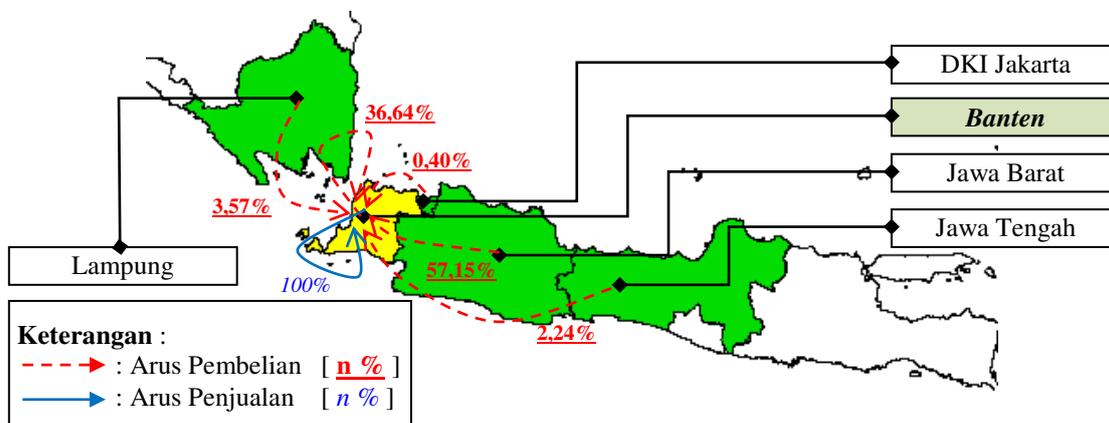
2.17.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa penggilingan padi di Provinsi Banten, sebagian besar gabah padi yang digiling berasal dari Provinsi Lampung, yaitu sebesar 41,75 persen. Sementara sisanya diperoleh dari dalam wilayah Banten sendiri maupun dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selanjutnya, beras hasil produksi tersebut dijual ke dalam Provinsi Banten sebesar 92,33 persen, DKI Jakarta sebesar 3,84 persen dan Lampung sebesar 3,84 persen. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 57. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Banten

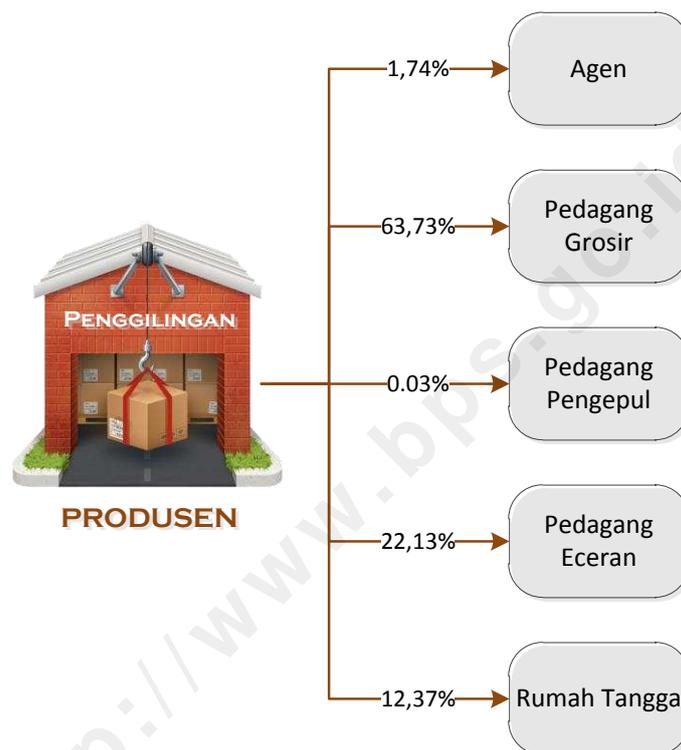
Hasil survei di tingkat pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar beras yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Banten berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 57,15 persen. Sementara sisanya dipasok dari beberapa provinsi, seperti: Lampung, Jawa Tengah, Banten dan sebagian kecil dari DKI Jakarta. Sedangkan untuk penjualan kembali, seluruh pasokan beras tersebut digunakan untuk konsumsi dalam Provinsi Banten sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Banten disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 58. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten

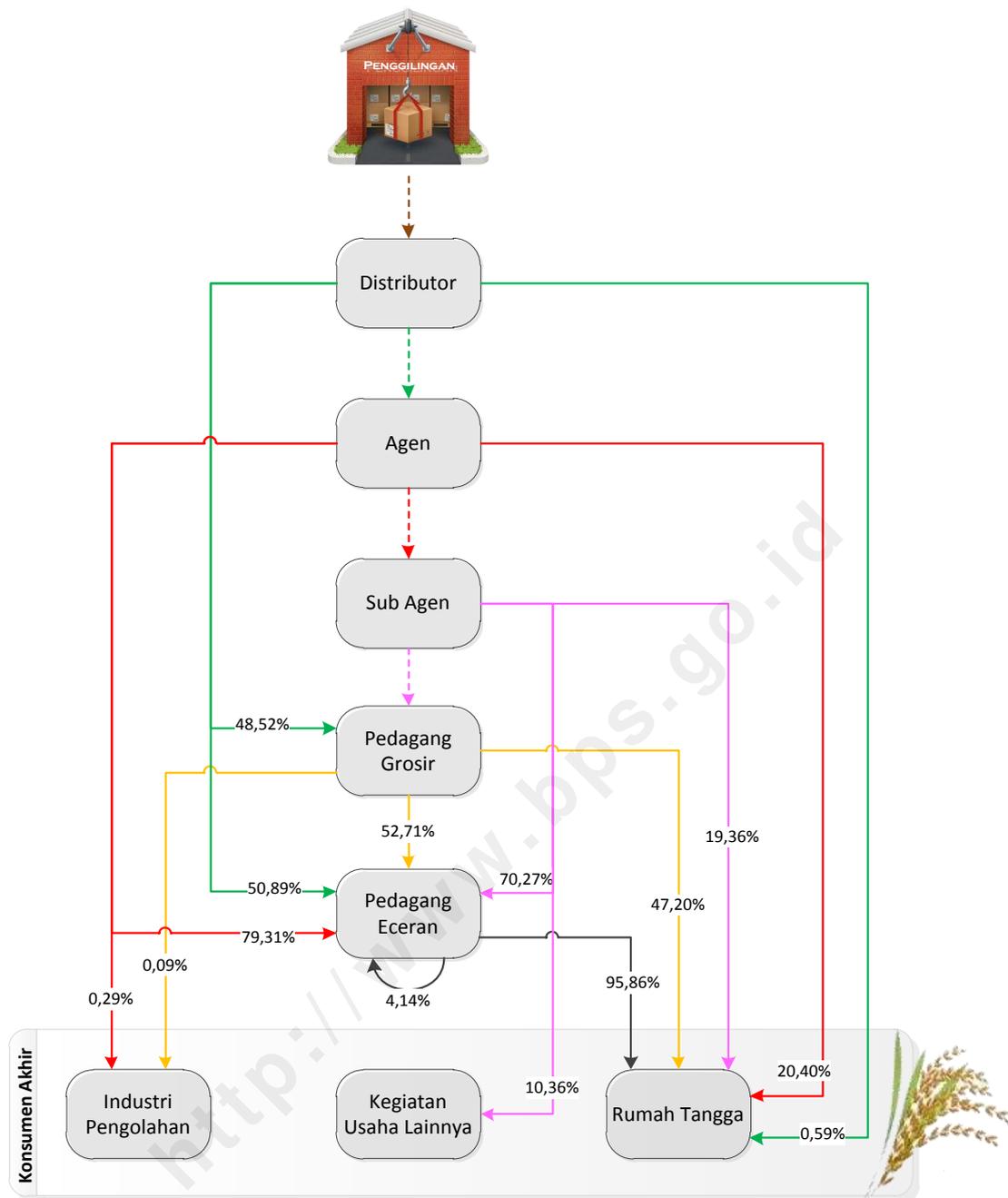
2.17.2 Pola Distribusi

Dari hasil pencacahan terhadap beberapa responden penggilingan padi di wilayah Provinsi Banten, yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen beras, dapat diketahui bahwa produsen menjual hasil produksi yang berupa beras ke berbagai lembaga usaha. Produsen menjual sebagian besar berasnya melalui pedagang grosir, yaitu sebesar 63,73 persen. Selebihnya dijual baik melalui agen, pedagang pengepul, pedagang eceran, maupun langsung menjualnya ke rumah tangga. Pola penjualan produksi komoditas beras di wilayah Provinsi Banten secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 59. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Banten

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan beras di provinsi Banten melibatkan distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor yang mendapat pasokan berasnya dari produsen kemudian menjual kembali 50,89 persen dari total pembeliannya ke pedagang eceran. Sebagaimana dengan distributor yang menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran, agen dan subagen juga menjual sebagian besar pasokan beras tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual sebagian besar berasnya langsung ke rumah tangga dan sebagian kecil lainnya dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 60. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Banten

2.17.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 18, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 4,79 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 4,38 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,04 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 2,06 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Banten adalah sebesar 4,97 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 4,25 persen.

**Tabel 18. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Banten**

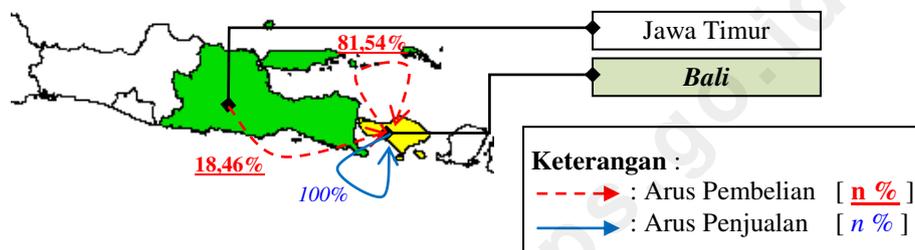
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.596,02	413,83	1.985,01
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	2.477,37	383,04	1.890,96
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	12,10	80,10	20,10
Rata-rata MPP (juta Rp)	118,65	30,79	94,05
Rasio MPP (%)	4,79	8,04	4,97
Rata-rata MP (juta Rp)	108,57	7,90	80,38
Rasio MP (%)	4,38	2,06	4,25

2.18 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar.

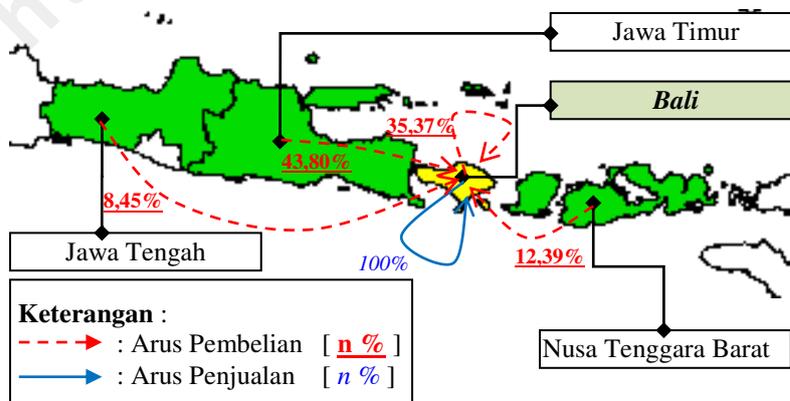
2.18.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, penggilingan padi yang terdapat di Provinsi Bali memperoleh gabah padi dari dalam Provinsi Bali sendiri sebesar 81,54 persen. Sementara 18,46 persen sisanya berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya dijual di dalam Provinsi Bali. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 61. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bali

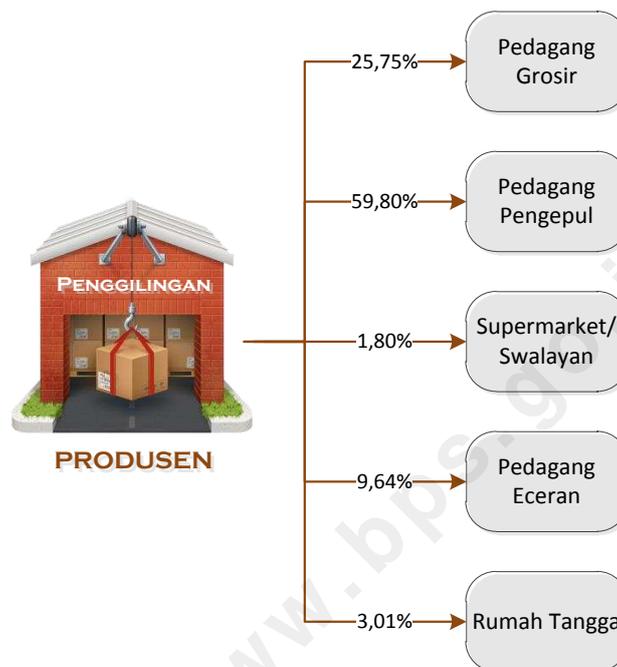
Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali menunjukkan bahwa asal pasokan beras tidak hanya berasal dari dalam Provinsi Bali saja. Dari hasil survei, pasokan beras di Provinsi Bali juga berasal dari Jawa Tengah sebesar 8,45 persen, Jawa Timur sebesar 43,80 persen, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 12,39 persen. Seluruh pasokan beras tersebut kemudian dipasarkan kembali hanya ke dalam Provinsi Bali sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 62. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali

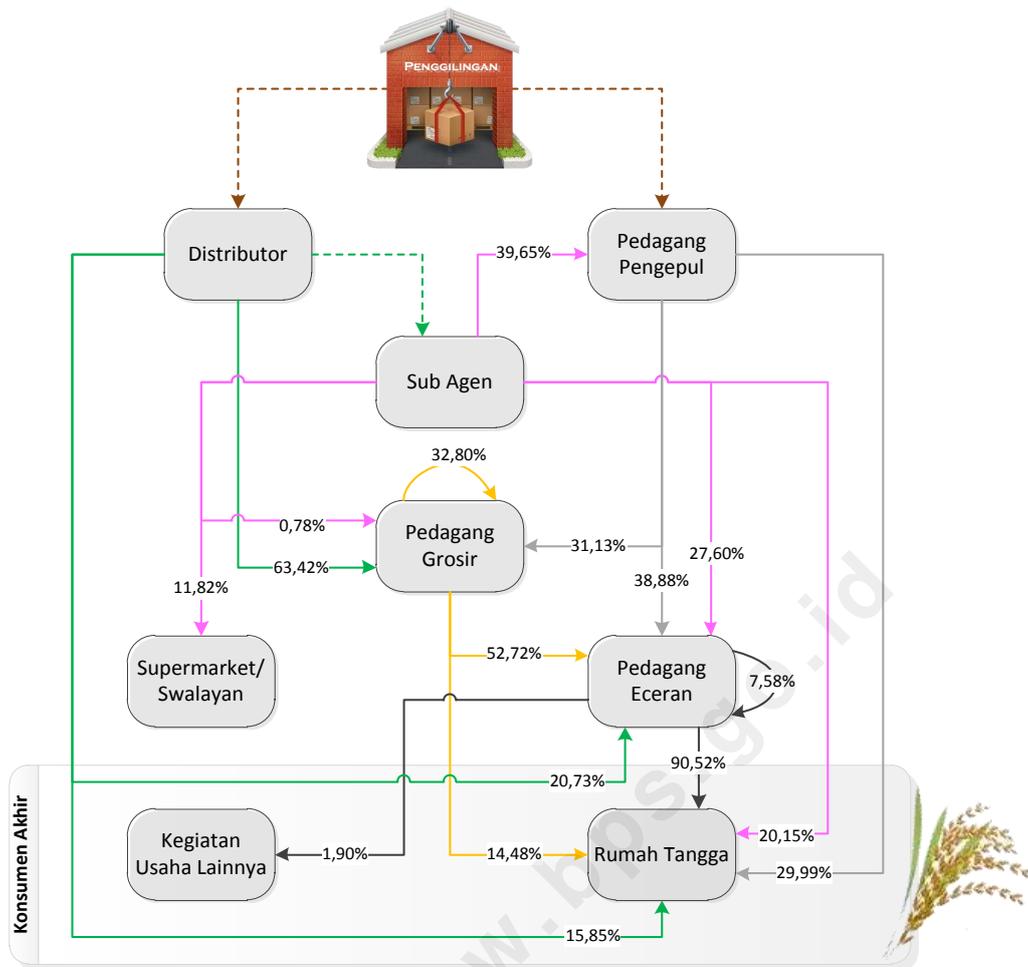
2.18.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa penjualan terbesar beras hasil produksi dari perusahaan penggilingan padi di Provinsi Bali dijual melalui pedagang pengepul, yaitu sebesar 59,80 persen. Sementara sisanya dijual melalui pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, serta dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 63. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Bali

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Bali melibatkan fungsi usaha distributor, pedagang pengepul, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Distributor yang mendapatkan berasnya dari produsen kemudian menjual 63,42 persen dari total pembeliannya ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual 52,72 persen pasokan beras yang diperolehnya dari distributor, pedagang pengepul, dan sub agen ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual pasokan berasnya baik ke sesama pedagang eceran maupun ke konsumen akhir yang terdiri dari: kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 64. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Bali

2.18.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 19, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 9,32 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 8,71 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 24,29 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 20,82 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Bali adalah sebesar 9,41 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 8,78 persen.

**Tabel 19. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Bali**

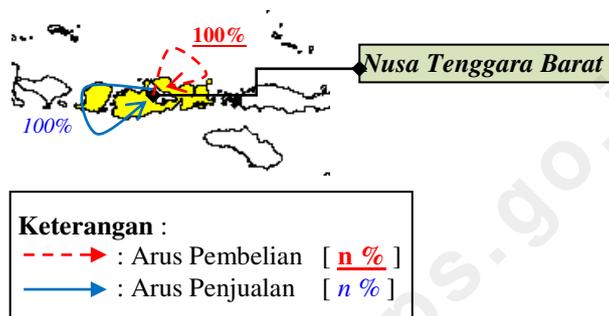
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.076,55	107,95	1.865,63
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.899,43	86,85	1.705,23
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	24,21	3,02	19,97
Rata-rata MPP (juta Rp)	177,11	21,10	160,40
Rasio MPP (%)	9,32	24,29	9,41
Rata-rata MP (juta Rp)	165,49	18,08	149,70
Rasio MP (%)	8,71	20,82	8,78

2.19 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.

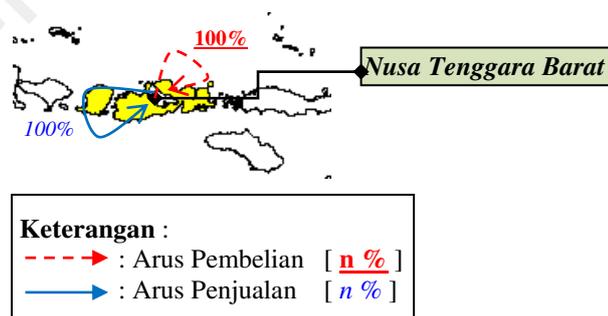
2.19.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh padi dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Selanjutnya hasil produksi yang berupa beras juga hanya dipasarkan ke dalam wilayah sendiri saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 65. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

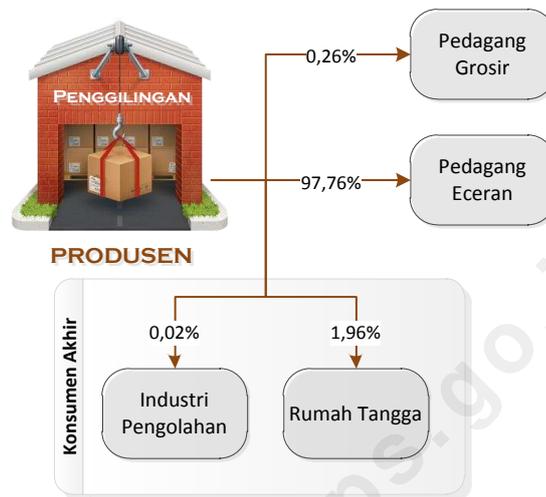
Distribusi perdagangan beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa asal pasokan beras 100 persen berasal dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh pasokan beras tersebut juga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras wilayah NTB sendiri, tanpa ada yang dijual ke daerah lain. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 66. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

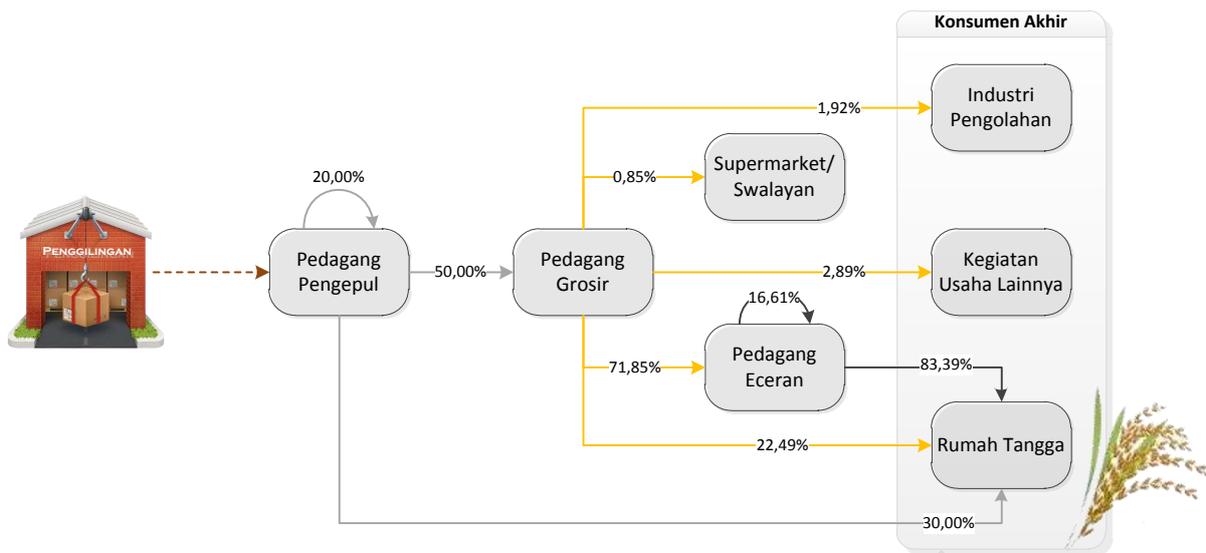
2.19.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa hasil produksi berupa beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar dijual ke pedagang eceran, yaitu sebesar 97,76 persen. Sisanya dijual melalui pedagang grosir maupun dijual langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 67. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari Gambar 68 terlihat bahwa rantai distribusi beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong cukup sederhana. Pedagang pengepul yang mendapatkan berasnya dari produsen kemudian menjual setengah dari total pembelian berasnya tersebut ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual 71,85 persen dari pasokan berasnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual beras tersebut ke rumah tangga sebesar 83,39 persen dan 16,61 persen sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 68. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.19.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 20, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,99 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 6,61 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 6,46 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 6,28 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 6,96 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,6 persen.

Tabel 20. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat

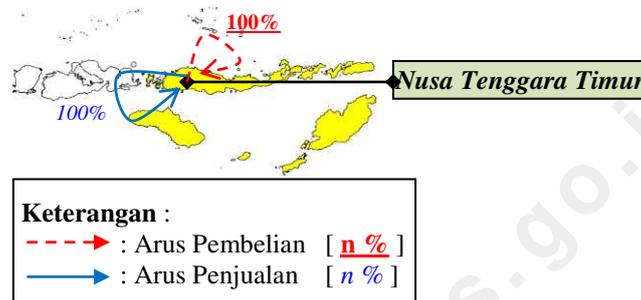
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.363,34	312,02	1.177,81
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.274,27	293,09	1.101,12
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	7,44	0,79	6,23
Rata-rata MPP (juta Rp)	89,07	18,93	76,69
Rasio MPP (%)	6,99	6,46	6,96
Rata-rata MP (juta Rp)	84,29	18,41	72,66
Rasio MP (%)	6,61	6,28	6,60

2.20 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang.

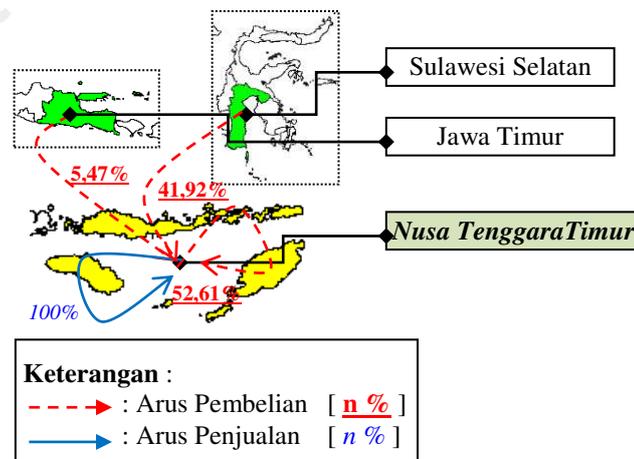
2.20.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh padi dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Selanjutnya hasil produksi yang berupa beras juga hanya dipasarkan ke dalam wilayah sendiri saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 69. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

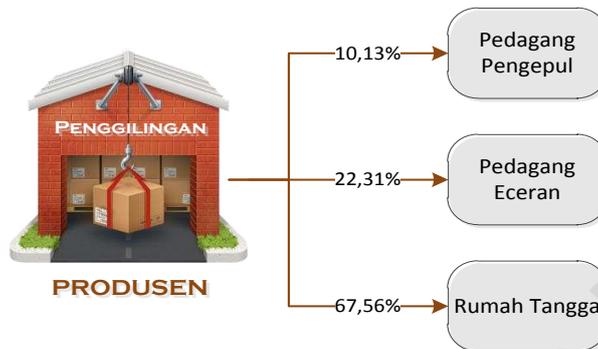
Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa beras yang diperdagangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya berasal dari dalam wilayah sendiri saja. Hasil survei menunjukkan bahwa pasokan beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berasal dari Jawa Timur, yaitu sebesar 5,47 persen dan dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 41,92 persen. Sedangkan dari sisi penjualan, beras tersebut seluruhnya dipasarkan ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 70. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

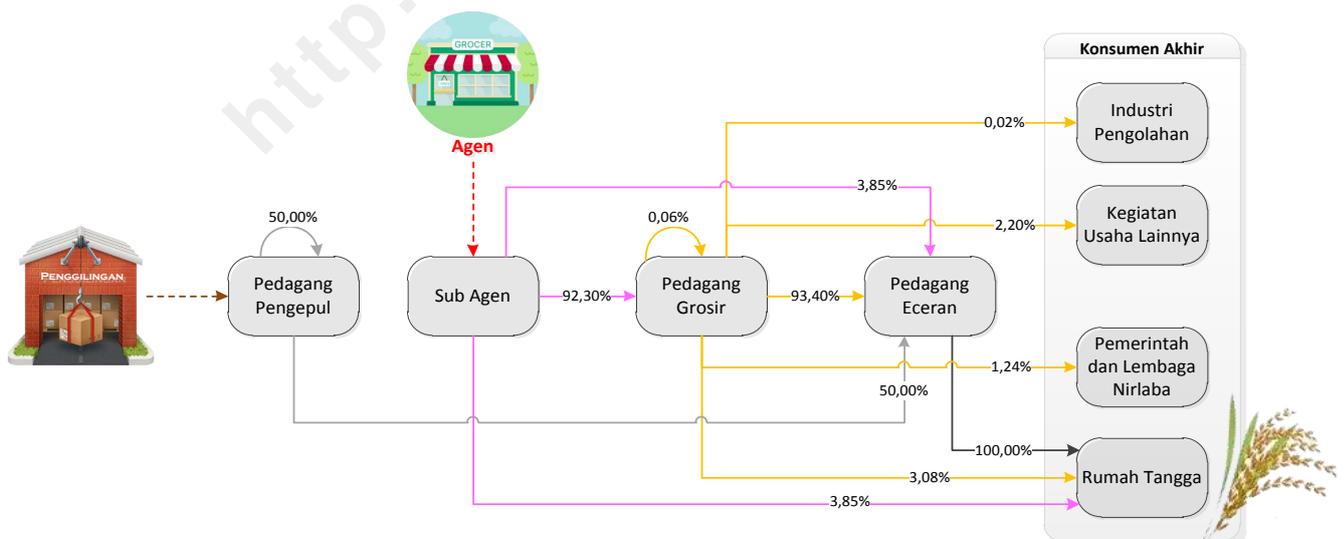
2.20.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap perusahaan penggilingan beras yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperoleh informasi bahwa produsen menjual sebagian besar hasil produksinya langsung ke rumah tangga. Sementara sisanya sebesar 10,13 persen dijual ke pedagang pengepul dan 22,31 persen ke pedagang eceran. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 71. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan, seperti: pedagang pengepul, subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pedagang eceran yang mendapat pasokan beras dari pedagang pengepul, subagen, maupun pedagang grosir kemudian menjual seluruh pasokan berasnya tersebut ke rumah tangga. Sedangkan tiga konsumen akhir lainnya mendapatkan pasokan beras dari pedagang grosir. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 72. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.20.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 21, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 1,12 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 1,08 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 13,77 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 13,63 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1,44 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 1,40 persen.

Tabel 21. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Nusa Tenggara Timur

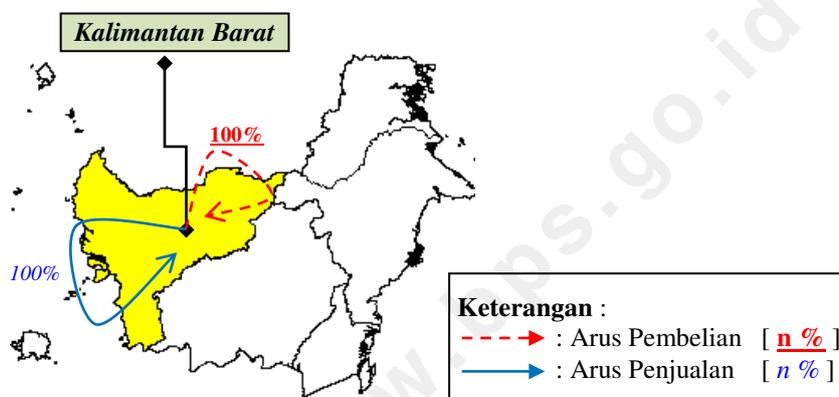
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.273,30	33,38	616,87
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.259,22	29,34	608,11
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	1,13	0,38	0,95
Rata-rata MPP (juta Rp)	14,08	4,04	8,76
Rasio MPP (%)	1,12	13,77	1,44
Rata-rata MP (juta Rp)	13,65	4,00	8,54
Rasio MP (%)	1,08	13,63	1,40

2.21 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Pontianak.

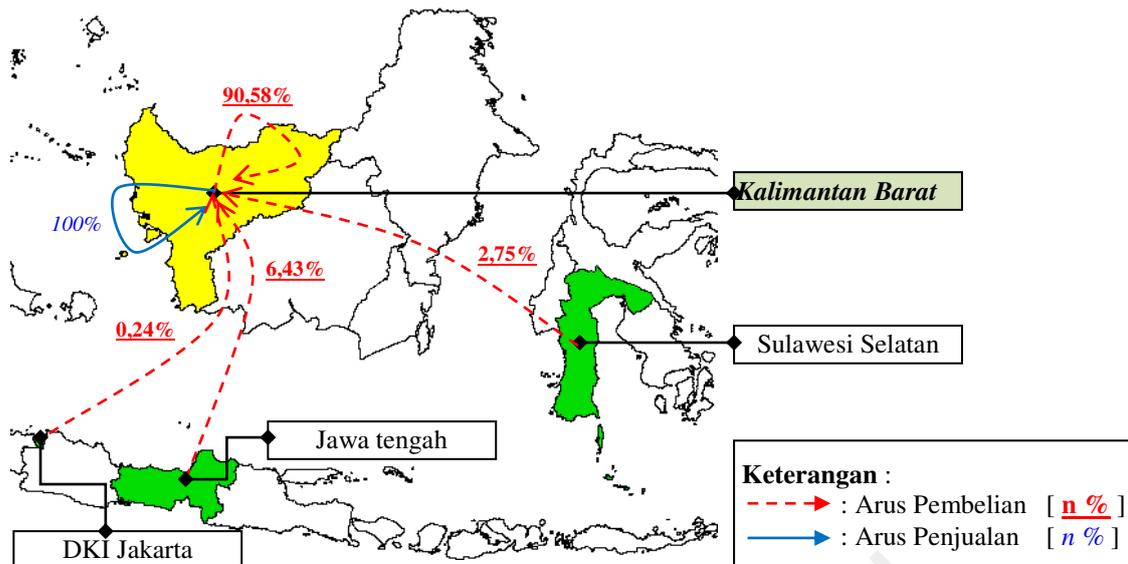
2.21.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat memperoleh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Kalimantan Barat. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 73. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Barat

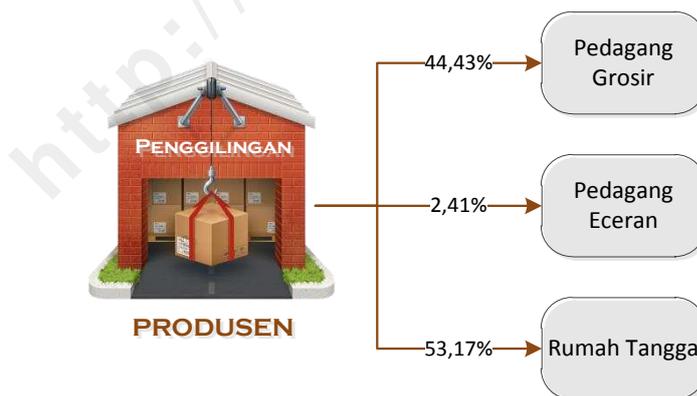
Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa beras yang diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Barat hampir seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Sementara sebagian kecil lainnya berasal dari berbagai provinsi, seperti: Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Beras tersebut kemudian seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan beras di dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 74. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat

2.21.2 Pola Distribusi

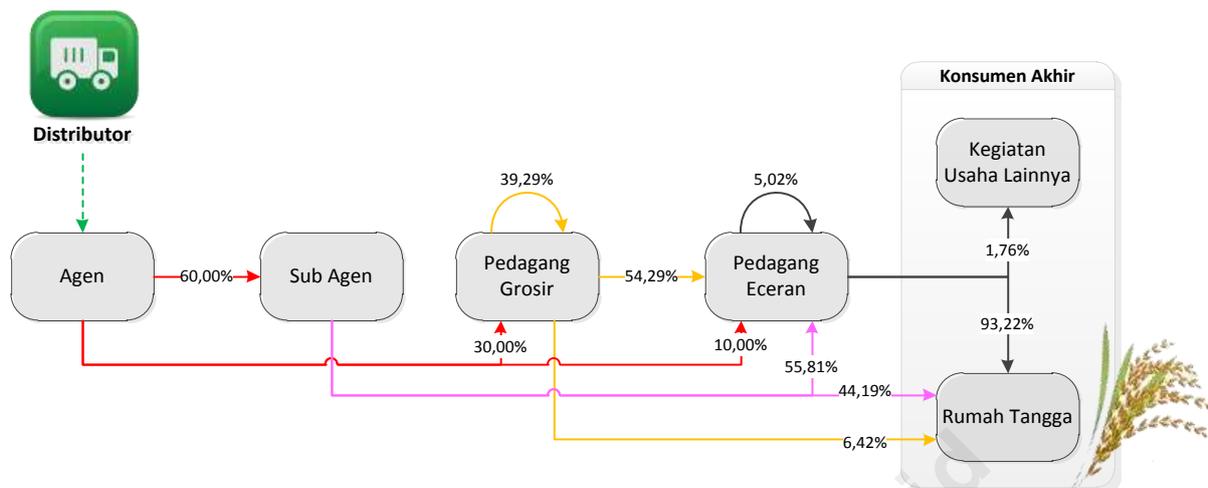
Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa sebagian besar hasil produksi perusahaan penggilingan padi yang berupa beras di Provinsi Kalimantan Barat dijual langsung ke rumah tangga. Selain menjual langsung ke rumah tangga, produsen beras juga memasarkan hasil produksinya melalui pedagang grosir sebesar 44,43 persen dan pedagang eceran sebesar 2,41 persen. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 75. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Barat

Dari sisi perdagangan, agen beras yang mendapatkan pasokan berasnya dari distributor kemudian menjual 60,00 persen dari total pembelian berasnya ke subagen. Subagen kemudian menjual 55,81 persen dari pasokan berasnya ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran, beras tersebut dijual sebagian besar ke rumah tangga, yaitu sebesar 93,22 persen. Sisanya, sebesar 6,78 persen dijual kembali ke sesama pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi

perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 76. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Barat

2.21.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,72 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,91 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 3,61 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,61 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 4,35 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 4,23 persen.

Tabel 22. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Barat

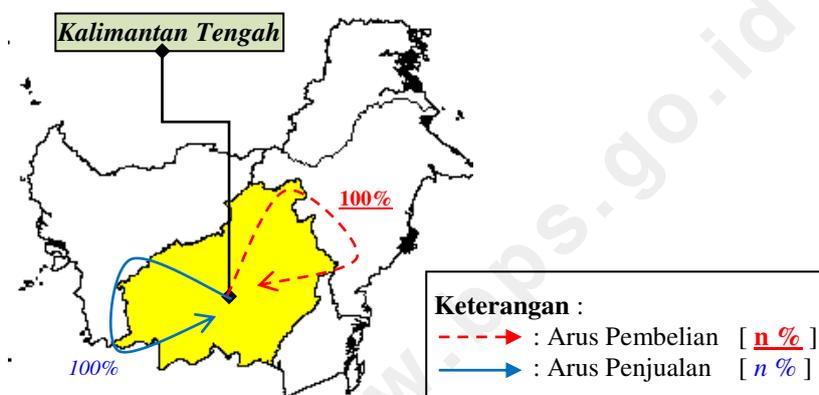
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.372,23	2.872,19	2.463,11
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.262,16	2.772,22	2.360,38
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	18,48	0,50	15,48
Rata-rata MPP (juta Rp)	110,07	99,97	102,73
Rasio MPP (%)	8,72	3,61	4,35
Rata-rata MP (juta Rp)	99,81	99,95	99,91
Rasio MP (%)	7,91	3,61	4,23

2.22 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangkaraya.

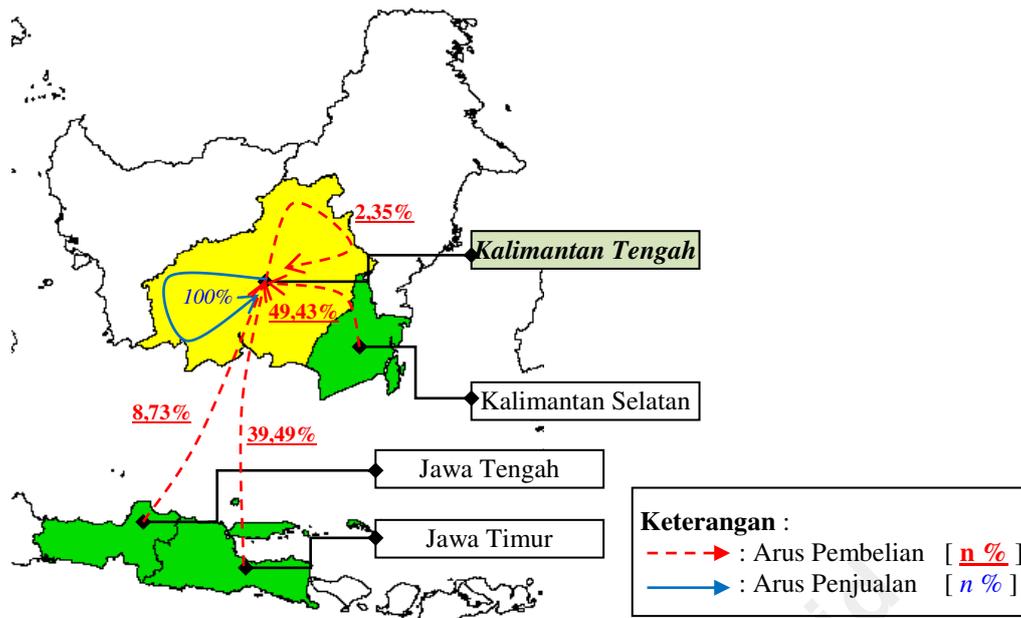
2.22.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 77. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

Sedang untuk perdagangan diketahui bahwa asal pasokan beras yang diperjualbelikan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Kalimantan Tengah sendiri, yaitu 85,29 persen. Selain itu, beras yang ada juga berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian kecil dari Kalimantan Selatan. Sedangkan dari sisi penjualan seluruhnya dipasarkan ke dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 78. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

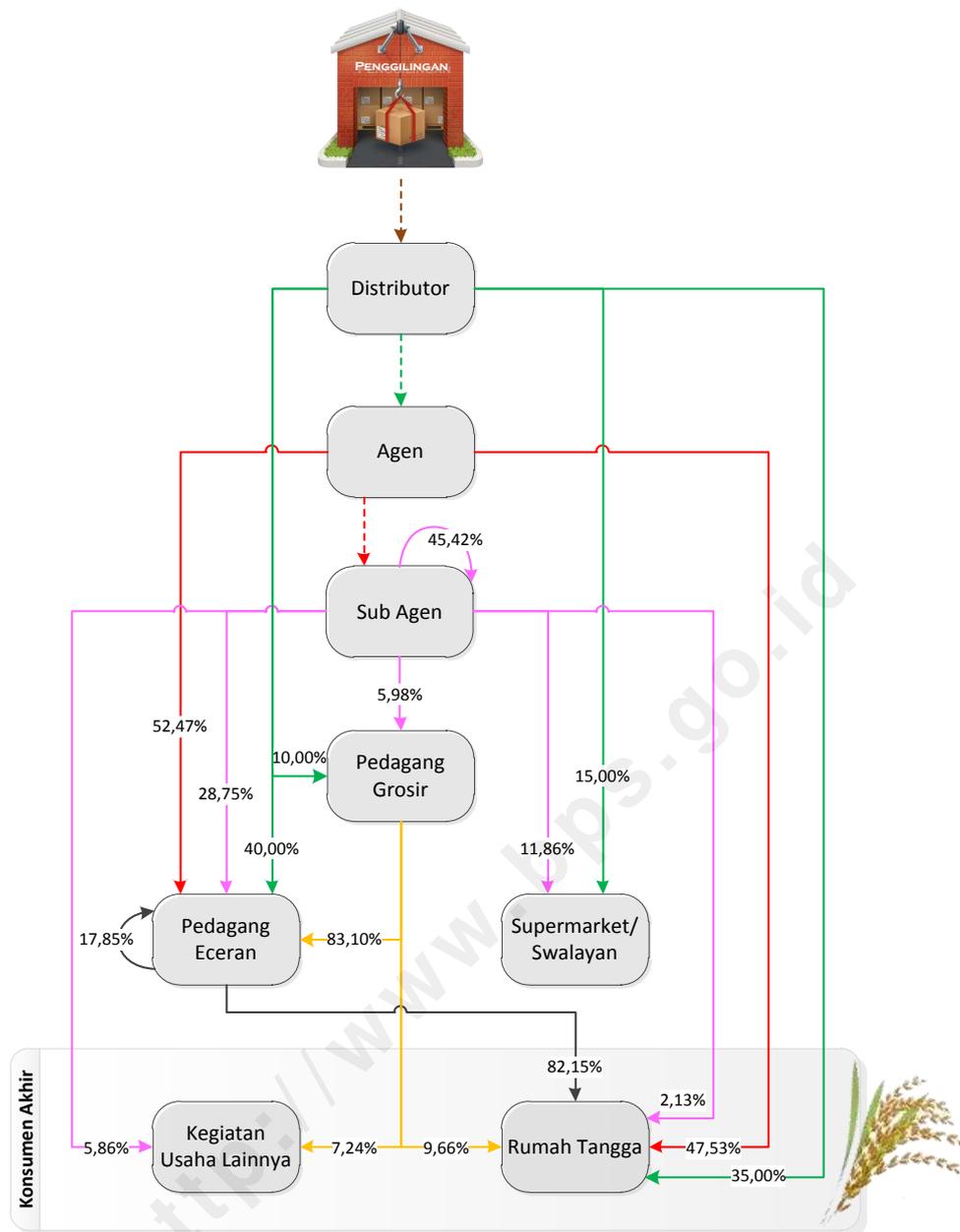
2.22.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa seluruh hasil produksi penggilingan padi yang berupa beras di Provinsi Kalimantan Tengah dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 79. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan, seperti: distributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedangkan pada level konsumen akhir, terdiri dari: kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Dari Gambar 80 terlihat bahwa distributor, agen, dan pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan beras ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual pasokan tersebut ke rumah tangga sebesar 82,15 persen. Sedangkan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran sebesar 17,85 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 80. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Tengah

2.22.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 23, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 12,55 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,94 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 25,14 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 20,8 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 12,75 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 8,15 persen.

**Tabel 23. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Kalimantan Tengah**

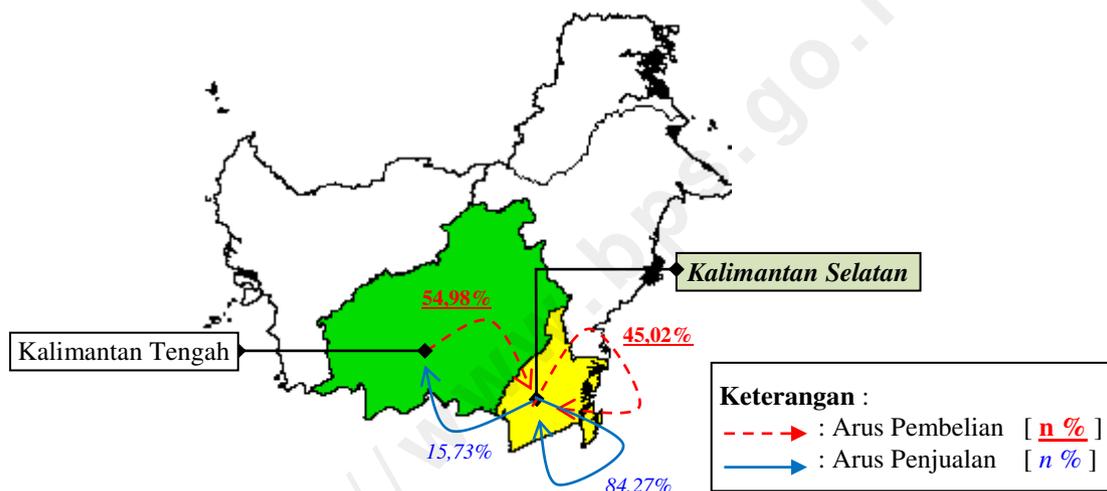
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	8.786,89	578,09	7.027,86
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	7.807,12	461,95	6.233,16
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	359,62	30,10	308,92
Rata-rata MPP (juta Rp)	979,76	116,14	794,70
Rasio MPP (%)	12,55	25,14	12,75
Rata-rata MP (juta Rp)	620,15	96,07	507,84
Rasio MP (%)	7,94	20,80	8,15

2.23 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.

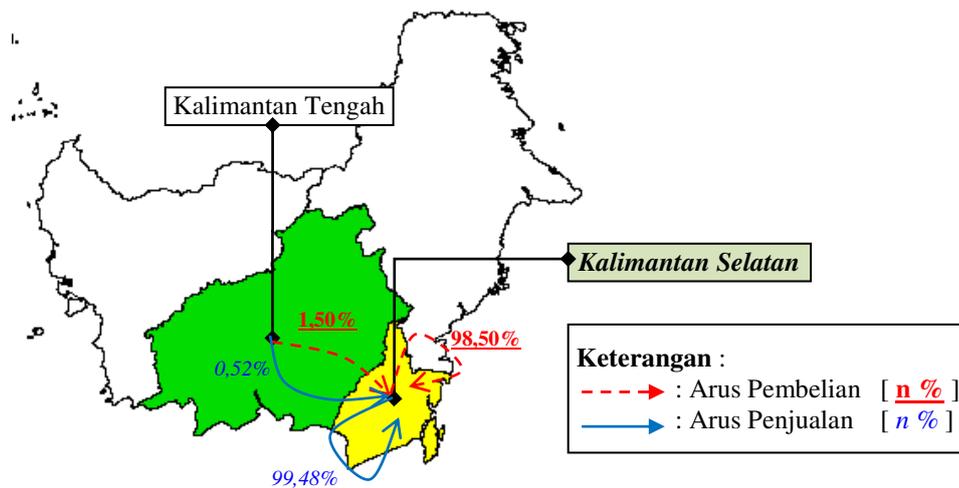
2.23.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, penggilingan padi yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh bahan baku berupa padi dari dalam Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 45,02 persen. Sedangkan 54,98 persen sisanya diperoleh dari Kalimantan Tengah. Hasil produksi yang berupa beras kemudian dijual di dalam Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 84,27 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 15,73 persen. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 81. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

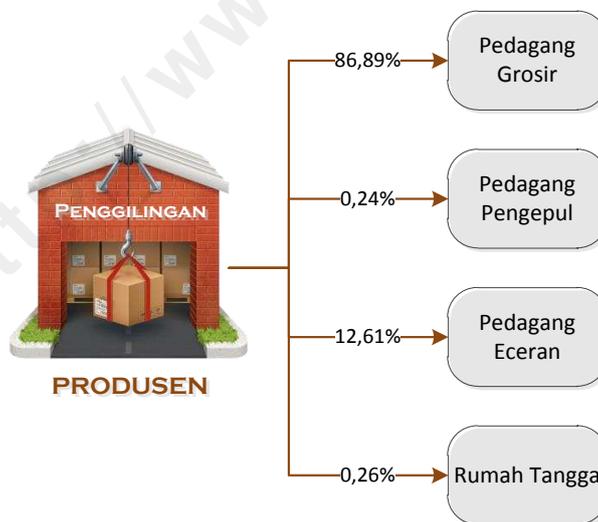
Dari sisi distribusi perdagangan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar beras yang diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari dalam wilayah sendiri. Hanya sekitar 1,50 persen saja yang dibeli para pedagang dari Provinsi Kalimantan Tengah. Beras tersebut kemudian sebagian besar dijual kembali ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian kecil sisanya, yaitu sebesar 0,52 persen dijual ke Kalimantan Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 82. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

2.23.2 Pola Distribusi

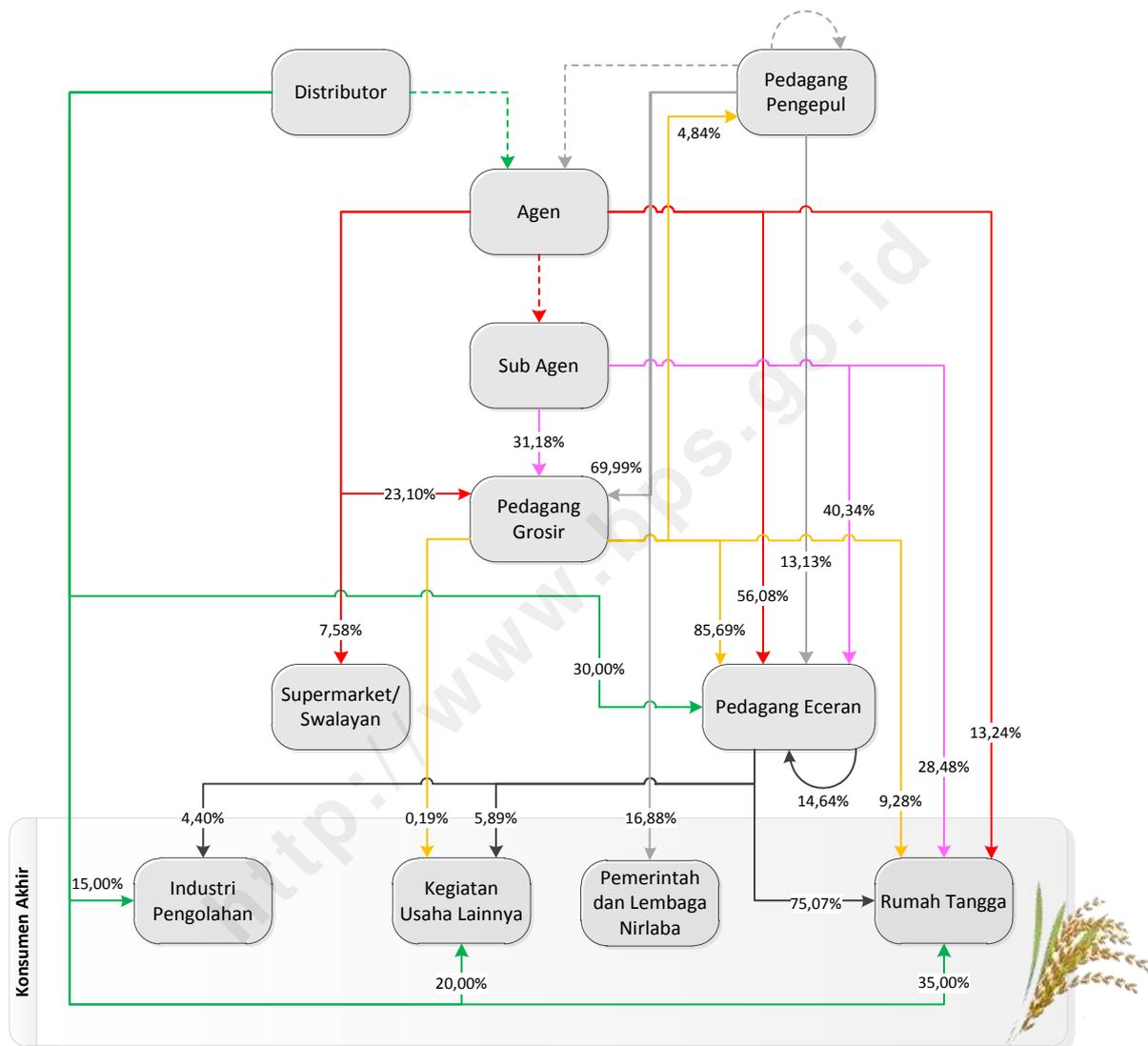
Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa sebagian besar hasil produksi perusahaan penggilingan padi yang berupa beras di Provinsi Kalimantan Selatan dijual melalui pedagang grosir, yaitu sebesar 86,89 persen. Sementara sisanya dijual melalui pedagang pengepul, pedagang eceran, maupun dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 83. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan, seperti: pedagang pengepul, distributor, agen, subagen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Sedangkan pada level konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan berasnya dari sesama pedagang pengepul di

dalam wilayah Kalimantan Selatan kemudian menjual kembali 69,99 persen dari total pembelian ke pedagang grosir. Pedagang grosir yang selain mendapat pasokan beras dari pedagang pengepul, tetapi juga dari agen kemudian menjual kembalinya 85,69 persen dari pasokan beras tersebut ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual kembali beras yang didapatnya baik langsung ke konsumen akhir maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 84. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

2.23.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 24, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 5,86 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,53 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 17,01 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 16,45 persen. Dengan demikian rata-

rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 6,42 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,07 persen.

Tabel 24. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Kalimantan Selatan

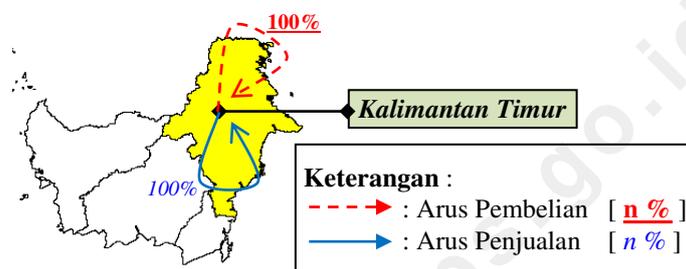
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	4.154,67	404,96	2.748,53
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	3.924,82	346,08	2.582,79
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	21,66	2,49	13,27
Rata-rata MPP (juta Rp)	229,85	58,87	165,73
Rasio MPP (%)	5,86	17,01	6,42
Rata-rata MP (juta Rp)	216,85	56,94	156,89
Rasio MP (%)	5,53	16,45	6,07

2.24 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

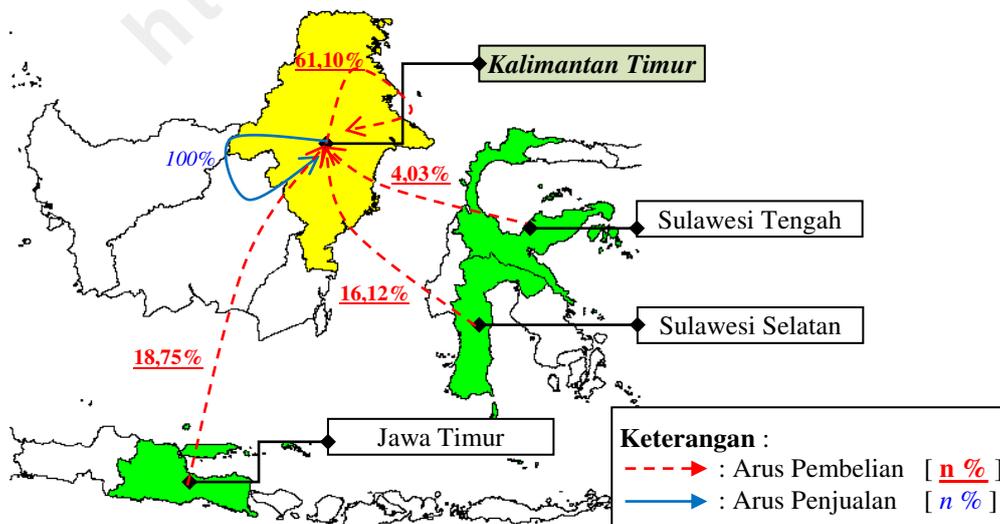
2.24.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur memperoleh seluruh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Kalimantan Timur saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 85. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Timur

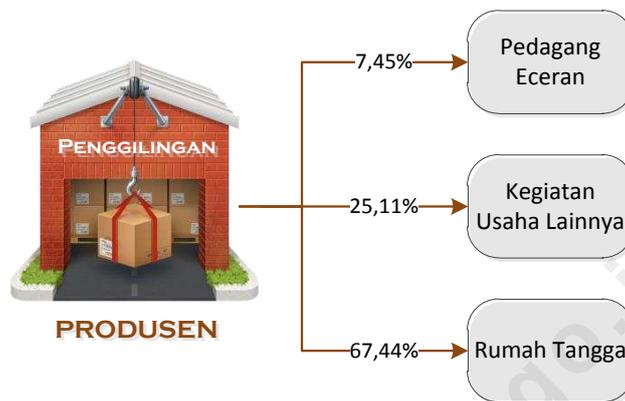
Dari hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa beras yang diperdagangkan di wilayah Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari dalam wilayah sendiri. Namun demikian, pedagang beras di Kalimantan Timur juga mendapat pasokan beras dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Semua beras tersebut kemudian seluruhnya dijual ke dalam Provinsi Kalimantan Timur saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 86. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur

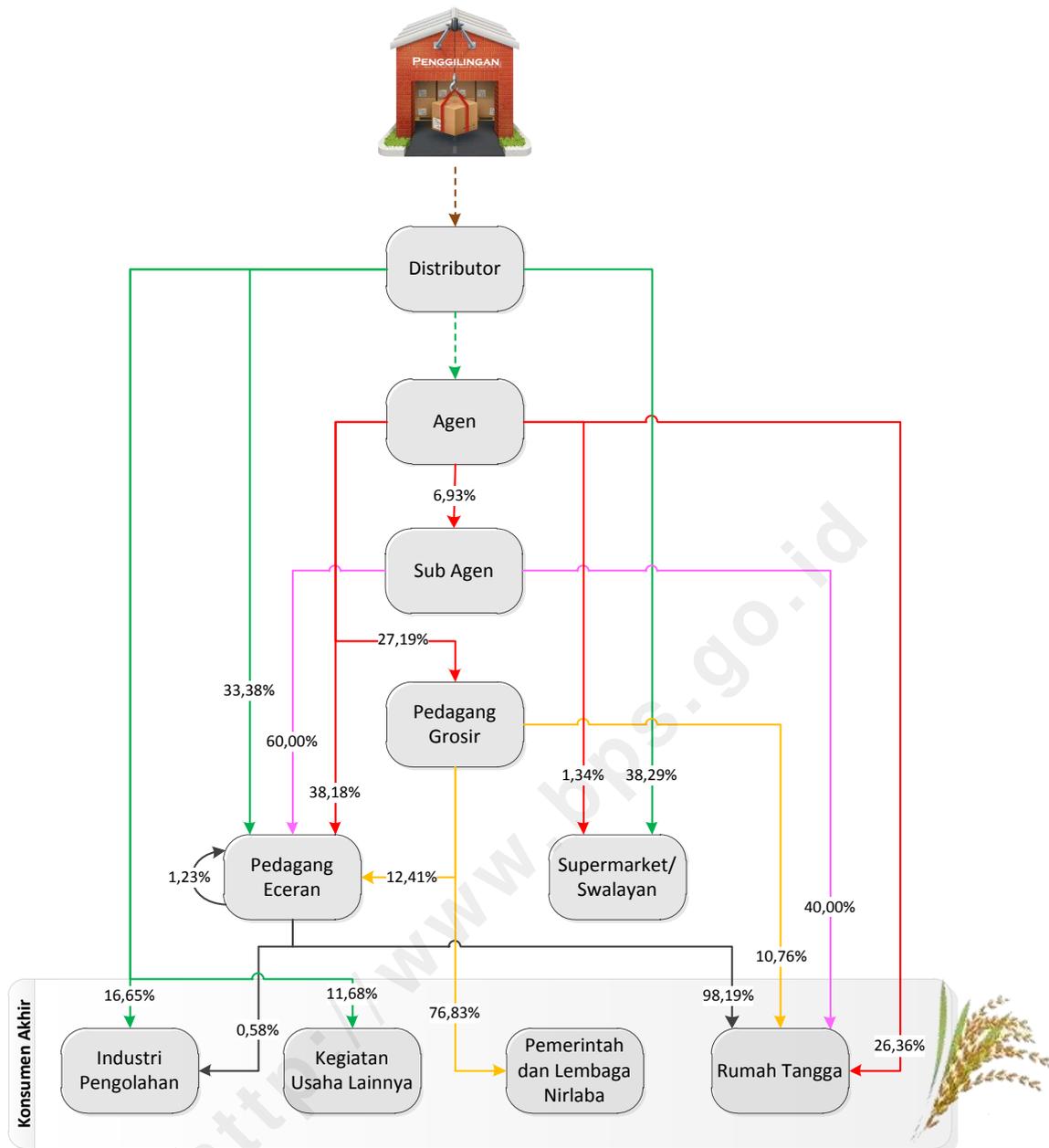
2.24.2 Pola Distribusi

Survei terhadap perusahaan penggilingan padi di Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan informasi bahwa hasil produksi yang berupa beras sebagian besar dijual langsung ke rumah tangga, yaitu sebesar 67,44 persen. Sisanya, sebesar 7,45 persen dijual ke pedagang eceran dan 25,11 dijual melalui kegiatan usaha lainnya. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 87. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan survei yang dilakukan dari sisi pedagang beras, diperoleh informasi bahwa pola penjualan distributor didominasi oleh penjualan ke supermarket/swalayan, yaitu sebesar 38,29 persen. Sementara agen dan subagen menjual kembali sebagian besar dari total beras yang dibeli ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual pasokan beras tersebut rumah tangga sebesar 98,19 persen, dan sebagian kecil sisanya dijual kembali baik ke industri pengolahan maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 88. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur

2.24.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 25, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 13,34 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 4,01 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 13,47 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 11,66 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 13,39 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,63 persen.

**Tabel 25. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Kalimantan Timur**

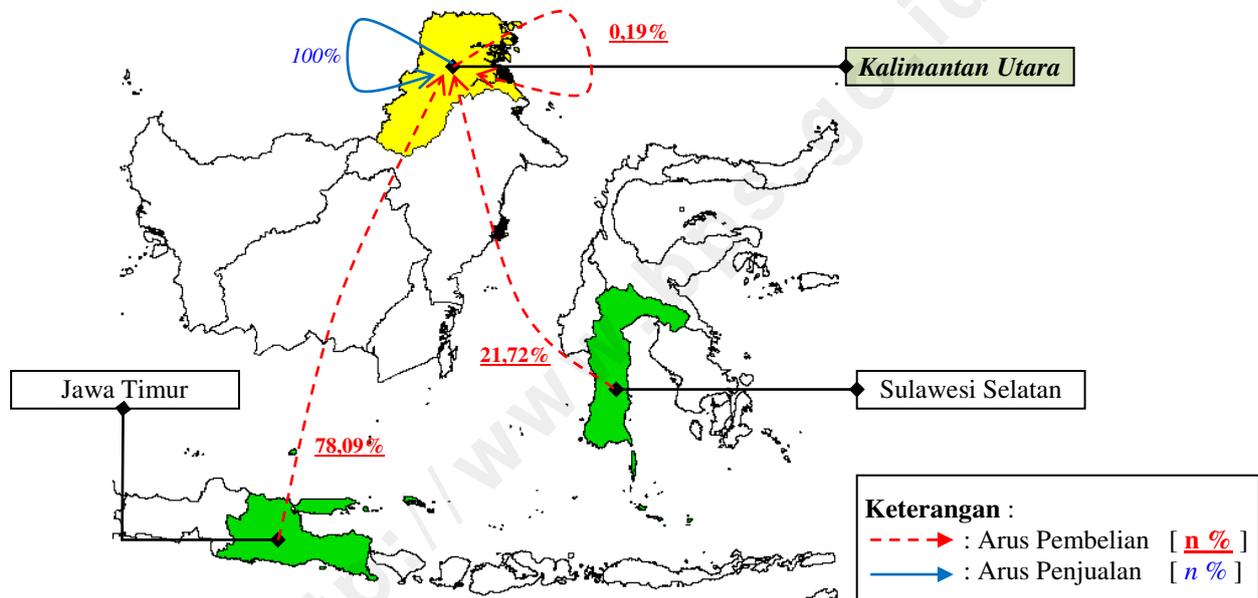
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.404,13	962,66	1.589,38
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	2.121,10	848,35	1.401,72
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	247,39	22,24	128,19
Rata-rata MPP (juta Rp)	283,03	114,30	187,66
Rasio MPP (%)	13,34	13,47	13,39
Rata-rata MP (juta Rp)	85,12	98,90	92,91
Rasio MP (%)	4,01	11,66	6,63

2.25 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan.

2.25.1 Peta Distribusi

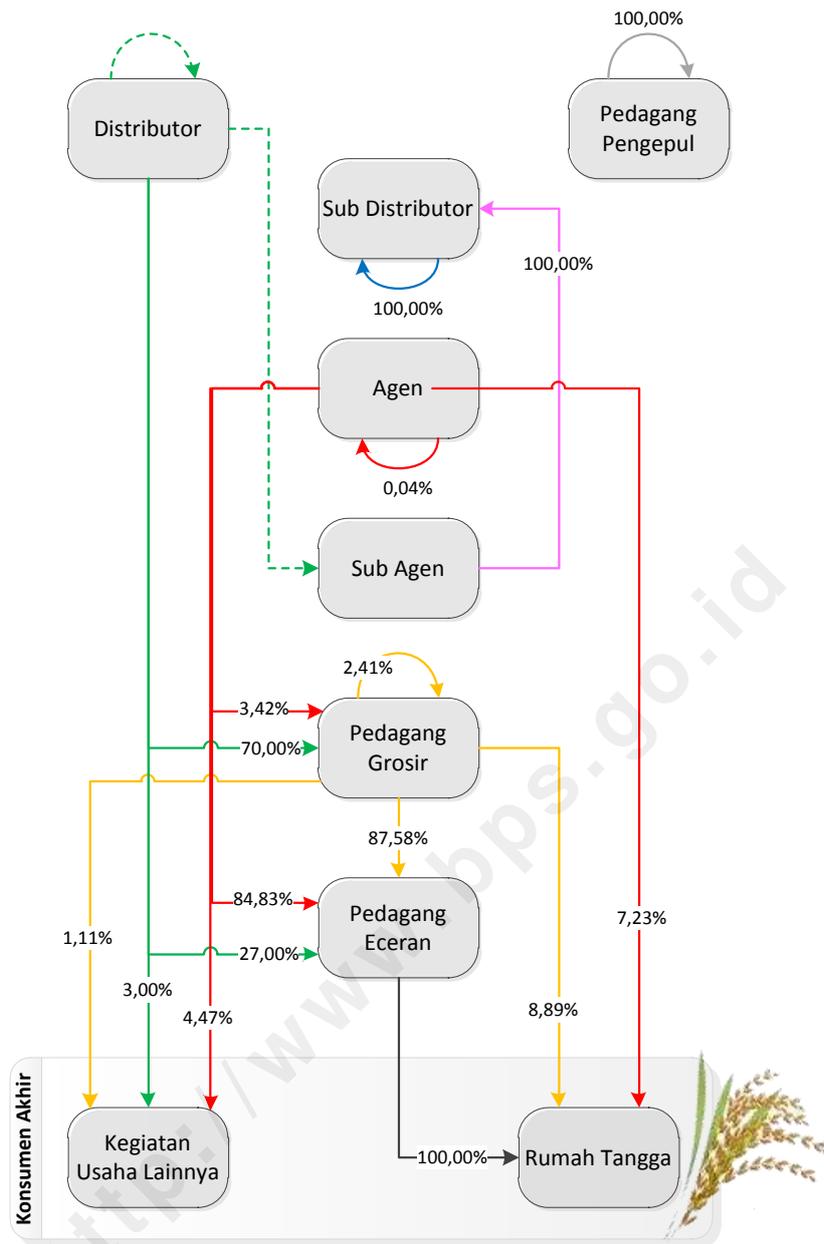
Dari hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui bahwa beras yang diperdagangkan di wilayah Kalimantan Utara sebagian besar berasal dari Jawa Timur, yaitu sebesar 78,09 persen. Selain dari Jawa Timur, pasokan beras yang cukup besar juga berasal dari Sulawesi Selatan. Hanya sebagian kecil saja beras yang dibeli dari dalam wilayah Kalimantan Utara sendiri. Semua beras tersebut kemudian dijual ke dalam Provinsi Kalimantan Utara saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 89. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara

2.25.2 Pola Distribusi

Berdasarkan survei yang dilakukan dari sisi pedagang beras, diperoleh informasi bahwa distributor beras di Kalimantan Utara yang mendapatkan pasokan beras dari sesama distributor di Jawa Timur kemudian menjual 70,00 persen dari total pembeliannya ke pedagang grosir. Pedagang grosir kemudian menjual kembali 87,58 persen dari total beras yang dibeli ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual kembali seluruh pasokan beras tersebut ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 90. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Kalimantan Utara

2.25.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 26, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 18,95 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 16,02 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 3,98 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,57 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 18,92 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 16,00 persen.

**Tabel 26. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Kalimantan Utara**

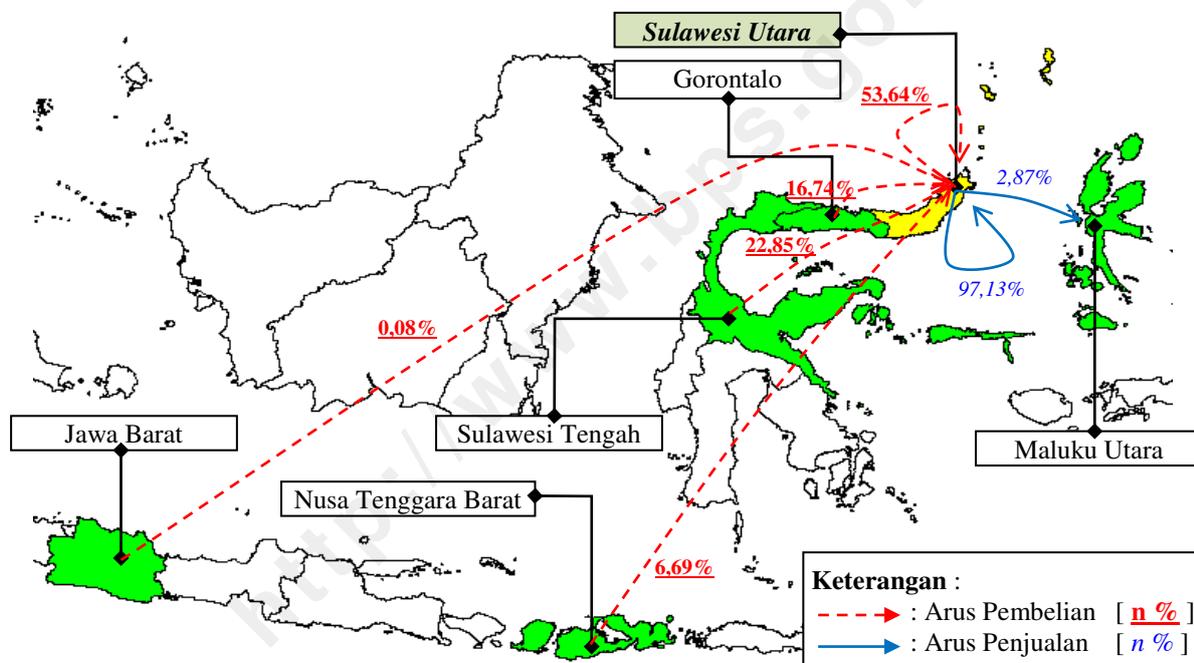
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	3.666,45	22,22	2.937,60
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	3.082,34	21,37	2.470,15
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	120,49	0,17	103,30
Rata-rata MPP (juta Rp)	584,11	0,85	467,45
Rasio MPP (%)	18,95	3,98	18,92
Rata-rata MP (juta Rp)	493,74	0,76	395,14
Rasio MP (%)	16,02	3,57	16,00

2.26 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado.

2.26.1 Peta Distribusi

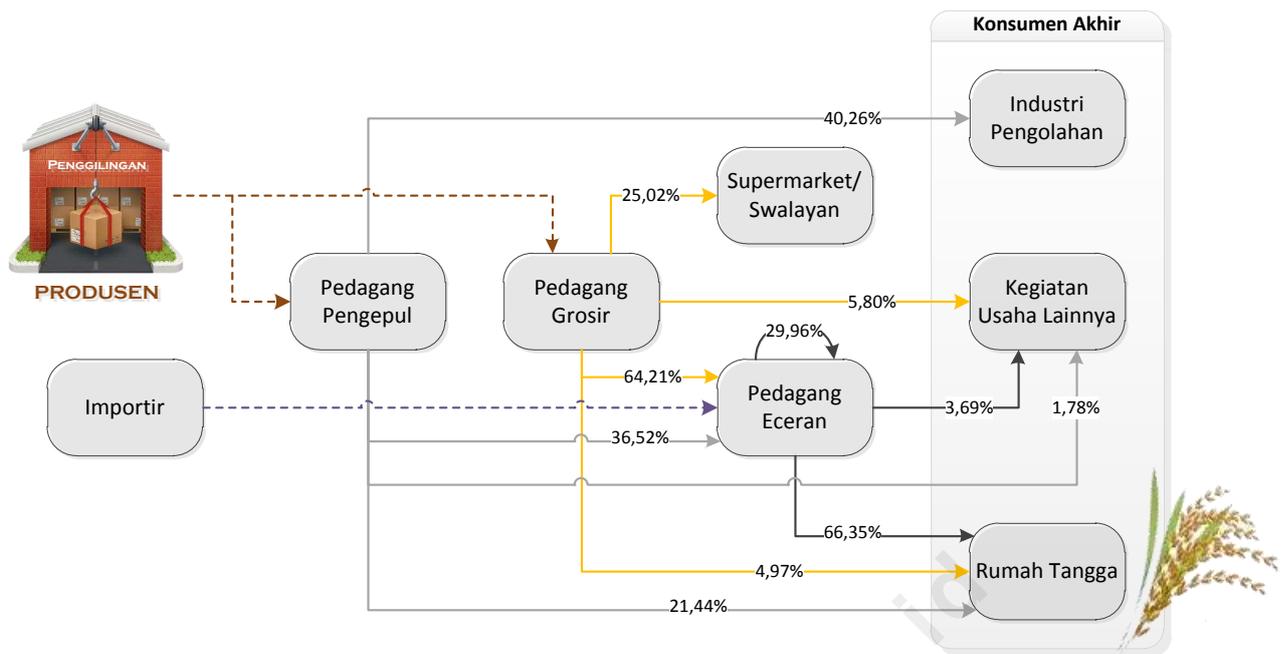
Dari hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa hampir separuh dari beras yang diperdagangkan di wilayah Sulawesi Utara berasal dalam wilayah sendiri. Sementara sisanya berasal dari beberapa provinsi lain, seperti: Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Pasokan beras tersebut kemudian dijual ke dalam Provinsi Sulawesi Utara sebesar 97,13 persen dan ke Maluku Utara sebesar 2,87 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 91. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara

2.26.2 Pola Distribusi

Berdasarkan survei yang dilakukan dari sisi pedagang beras, diperoleh informasi bahwa pedagang grosir beras di Sulawesi Utara yang mendapatkan pasokan beras dari produsen kemudian menjual kembali 64,21 persen dari total beras yang dibeli ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual kembali pasokan beras yang dibelinya dari importir, pedagang pengepul, maupun dari pedagang grosir tersebut ke rumah tangga sebesar 66,35 persen, kegiatan usaha lainnya sebesar 5,80 persen, dan ke sesama pedagang eceran sebesar 29,96 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 92. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Utara

2.26.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 27, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,83 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 8,18 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,91 persen, sedangkan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,35 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 10,21 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 8,00 persen.

Tabel 27. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Utara

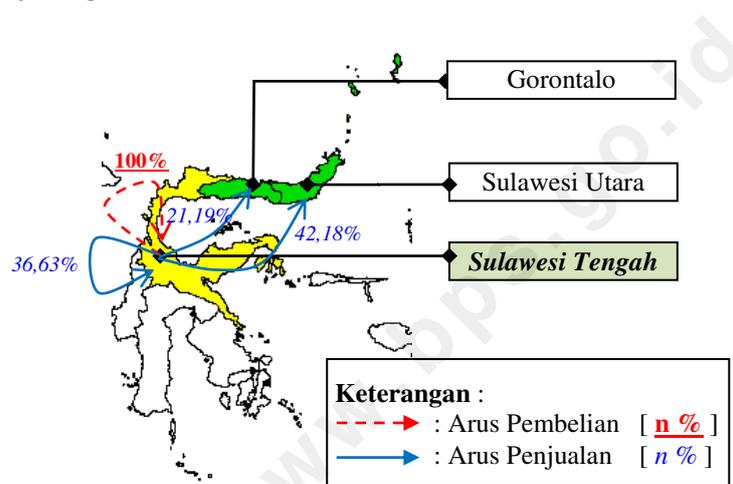
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.623,99	212,79	683,19
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.465,36	197,20	619,92
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	54,30	3,06	28,68
Rata-rata MPP (juta Rp)	158,63	15,59	63,27
Rasio MPP (%)	10,83	7,91	10,21
Rata-rata MP (juta Rp)	119.842,57	14,50	49,61
Rasio MP (%)	8,18	7,35	8,00

2.27 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.

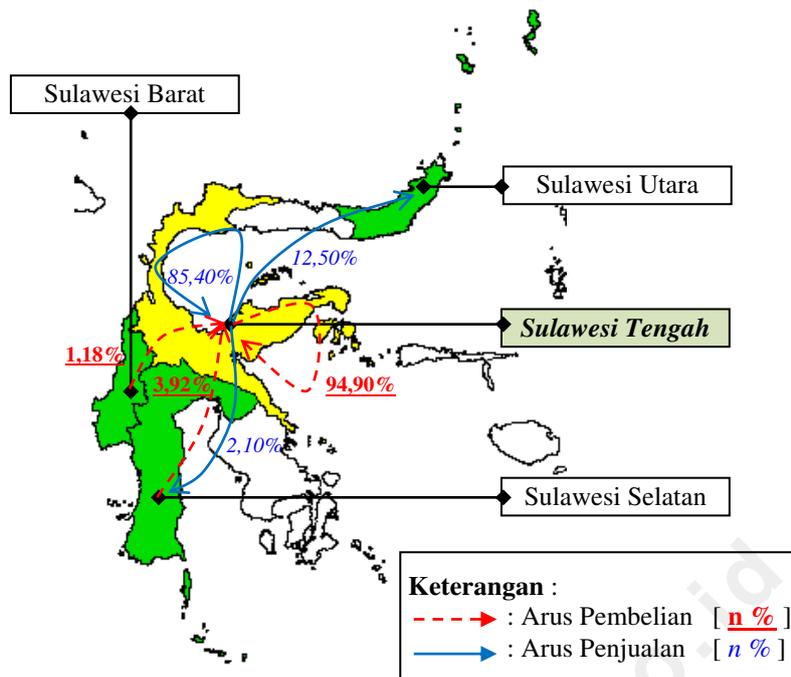
2.27.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen beras yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh seluruh padi yang kemudian digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Selanjutnya, hasil produksi yang berupa beras tersebut 36,63 persen dijual ke dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Selebihnya, sebesar 42,18 persen dijual ke Sulawesi Utara dan 21,19 persen dijual ke Gorontalo. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 93. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

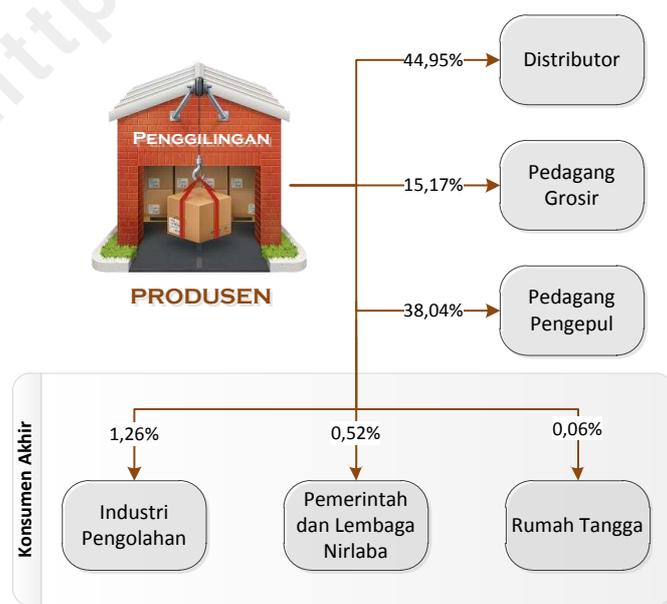
Dari sisi perdagangan, dapat diperoleh informasi bahwa 94,90 persen dari total beras yang diperdagangkan di Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari daerah lain, yaitu berasal dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dari hasil survei juga dapat diketahui bahwa 85,40 persen dari seluruh pasokan beras tersebut hanya dijual di dalam provinsi. Sedangkan sisanya dijual ke Provinsi Sulawesi Utara sebesar 12,50 persen dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,10 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 94. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

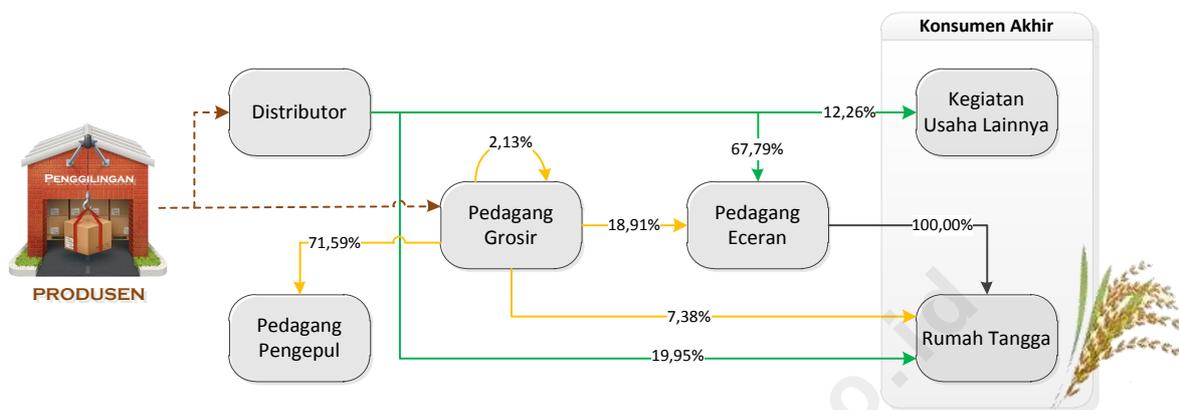
2.27.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei diperoleh hasil bahwa penggilingan padi yang dalam survei ini bertindak sebagai produsen di Provinsi Sulawesi Tengah menjual sebagian besar hasil produksi beras melalui distributor, yaitu sebesar 44,95 persen. Selain melalui distributor, beras hasil penggilingan padi tersebut juga dijual ke pedagang grosir, pedagang pengepul, serta dijual langsung ke konsumen akhir yang terdiri dari: industri pengolahan, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada Gambar 95.



Gambar 95. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

Dari hasil survei yang dilakukan dengan responden pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa alur distribusi beras di Provinsi Sulawesi Tengah cukup sederhana. Distributor yang mendapat pasokan beras dari produsen kemudian menjual sebagian besar pasokan beras tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali seluruh pasokan beras yang dibelinya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 96. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

2.27.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 28, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 27,26 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 26,61 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 41,51 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 40,53 persen. Margin yang diperoleh pedagang eceran tergolong cukup tinggi dikarenakan pedagang membeli beras pada saat harga masih rendah dan beras tersebut terjual pada saat harga cukup tinggi. Dengan demikian, rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 28,44 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 27,77 persen.

Tabel 28. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Tengah

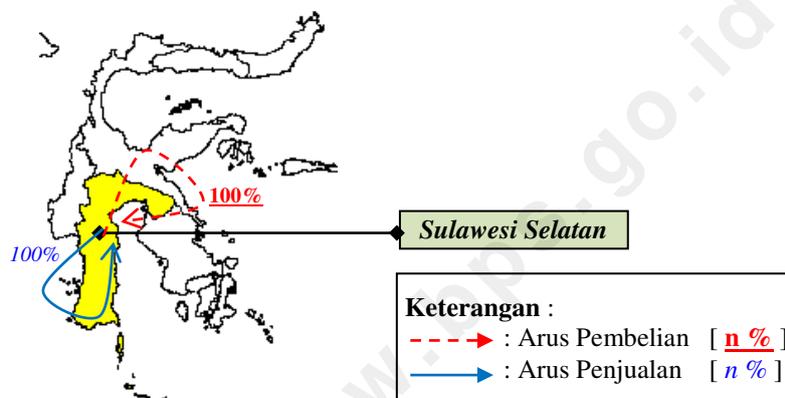
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.348,84	163,03	809,83
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.059,94	115,21	630,52
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	11,72	1,41	6,22
Rata-rata MPP (juta Rp)	288,90	47,82	179,32
Rasio MPP (%)	27,26	41,51	28,44
Rata-rata MP (juta Rp)	282,06	46,70	175,08
Rasio MP (%)	26,61	40,53	27,77

2.28 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Enrekang, Kota Makassar, dan Kota Palopo.

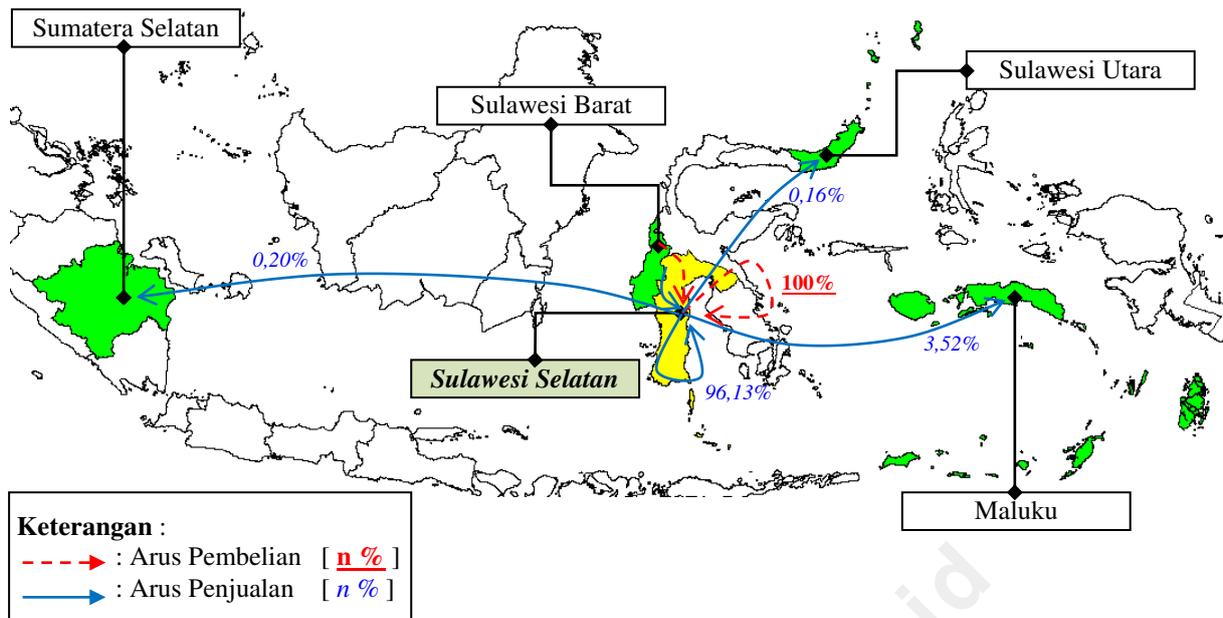
2.28.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh seluruh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Sulawesi Selatan saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 97. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

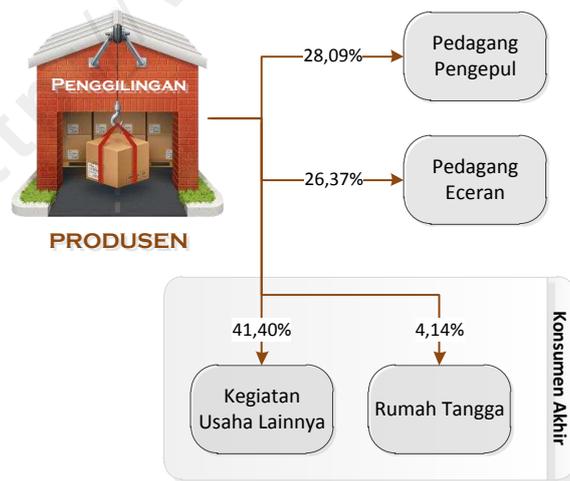
Dari sisi perdagangan, dapat diperoleh informasi bahwa hampir semua beras yang diperdagangkan di Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat sebagian kecil pasokan beras yang berasal dari daerah lain, yaitu berasal dari Sulawesi Barat. Namun dikarenakan jumlah yang sangat kecil, yaitu sekitar 4 kwintal saja jika dibandingkan dengan total pembelian beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai lebih dari 33 ton maka persentasenya menjadi sangat kecil dan mendekati nol. Dari hasil survei juga dapat diketahui bahwa 96,13 persen dari seluruh pasokan beras tersebut hanya dijual di dalam wilayah sendiri saja. Sedangkan sisanya dijual ke Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,16 persen, Provinsi Maluku sebesar 3,52 persen, dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,20 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 98. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

2.28.2 Pola Distribusi

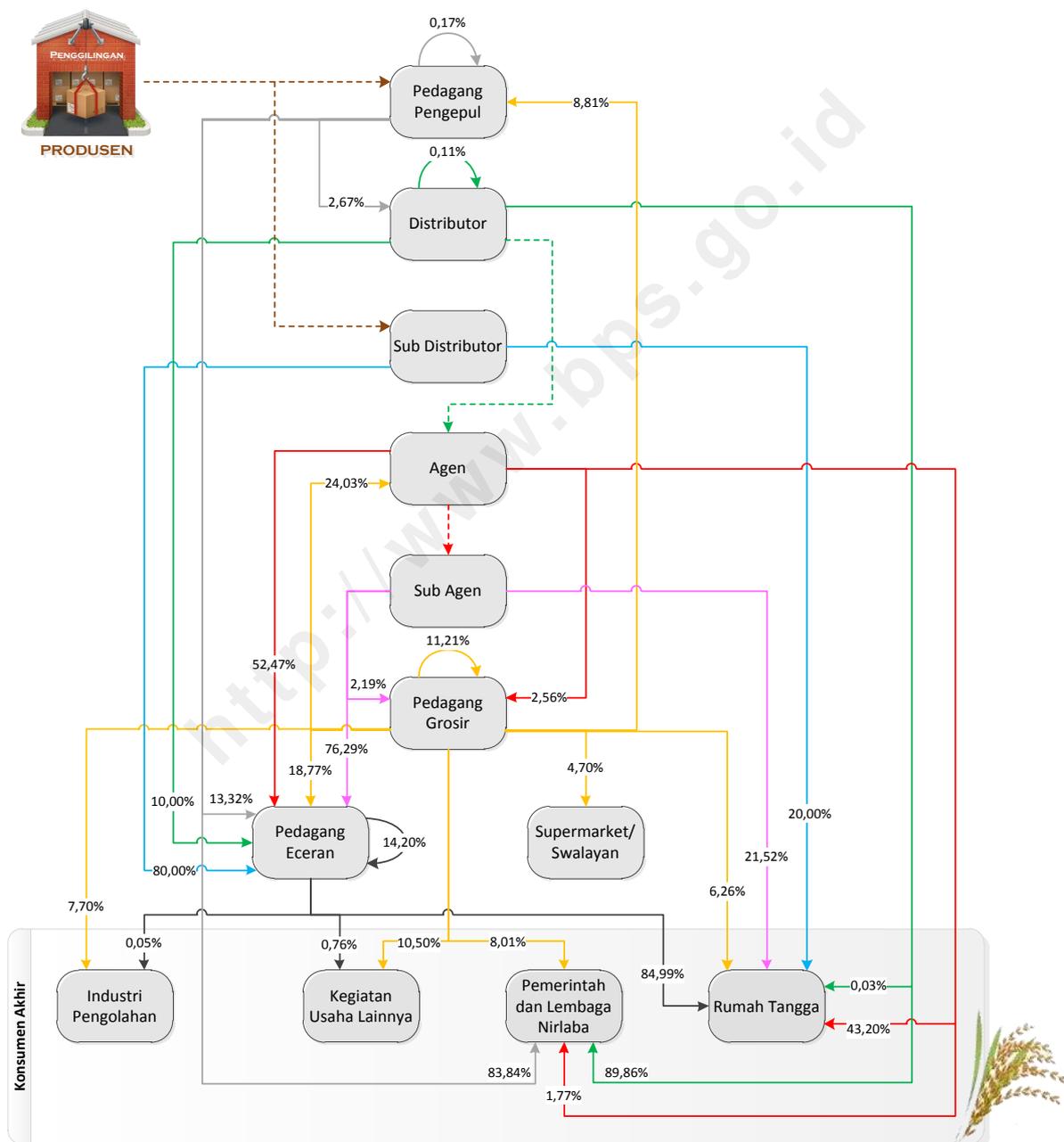
Survei terhadap perusahaan penggilingan padi di Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan informasi bahwa hasil produksi yang berupa beras sebagian besar dijual langsung ke kegiatan usaha lainnya, yaitu sebesar 41,40 persen. Sementara sisanya dijual ke pedagang pengepul, pedagang eceran, maupun dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 99. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan yang tergambar pada Gambar 100 memperlihatkan bahwa rantai distribusi beras dari produsen sampai ke konsumen di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan cukup banyak lembaga usaha perdagangan. Distribusi beras tersebut

melibatkan beberapa lembaga usaha, seperti: pedagang pengepul, distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Sedang dari konsumen akhir terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Pedagang pengepul dan distributor di Provinsi Sulawesi Selatan menjual sebagian besar pasokan beras ke pemerintah dan lembaga nirlaba. Sementara subdistributor, agen, dan subagen menjual sebagian besar pasokan beras yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali beras tersebut langsung ke konsumen akhir maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 100. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

2.28.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 29, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 4,81 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,93 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 12,17 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 11,92 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 5,05 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 4,19 persen.

Tabel 29. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Selatan

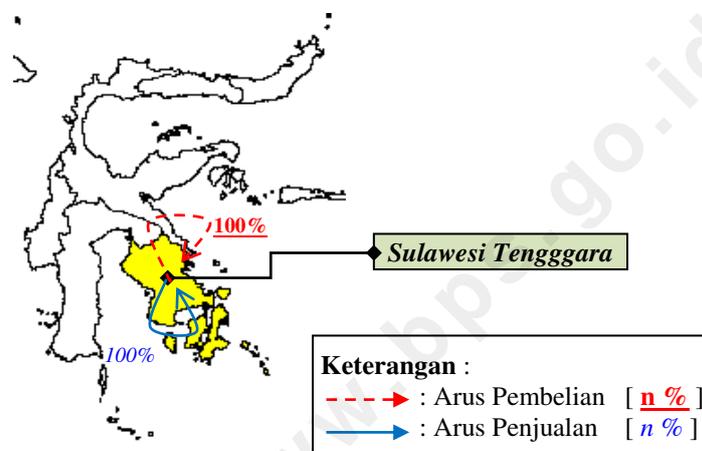
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	9.751,45	538,96	6.109,30
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	9.304,28	480,49	5.815,81
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	101,49	5,08	86,06
Rata-rata MPP (juta Rp)	447,17	58,47	293,50
Rasio MPP (%)	4,81	12,17	5,05
Rata-rata MP (juta Rp)	365,20	57,27	243,46
Rasio MP (%)	3,93	11,92	4,19

2.29 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, dan Kota Kendari.

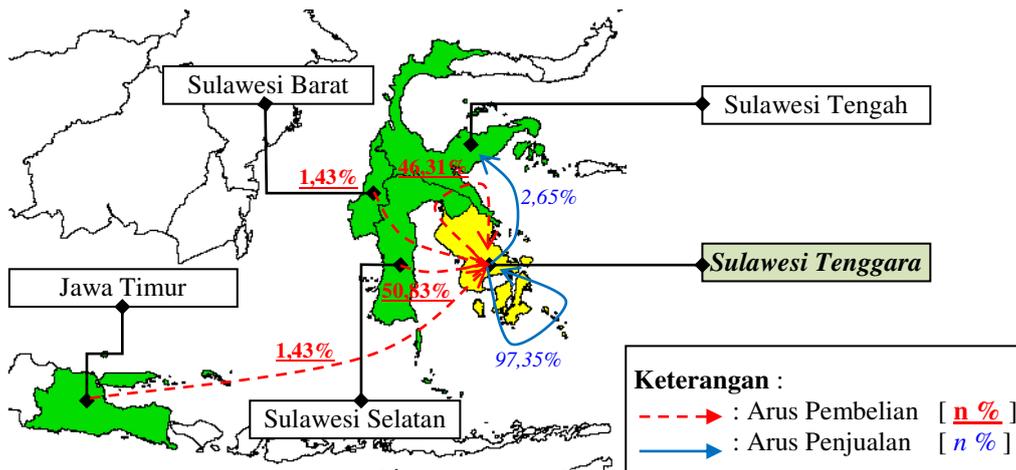
2.29.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh seluruh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Sulawesi Tenggara saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 101. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

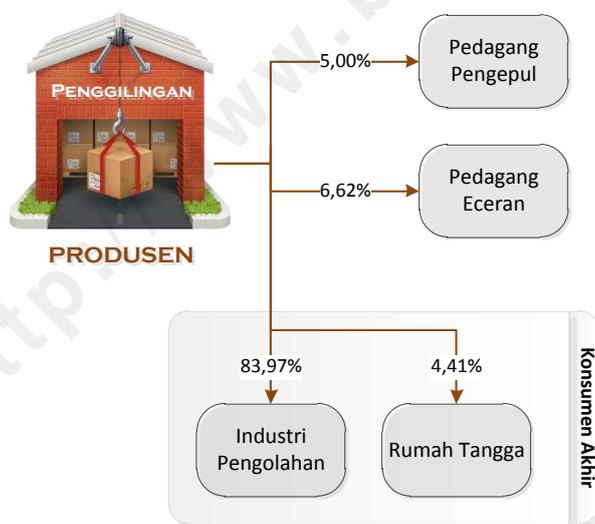
Distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa asal pasokan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 50,83 persen. Selain dari Sulawesi Selatan, pedagang juga membeli beras dari Jawa Timur, Sulawesi Barat maupun dari Sulawesi Tenggara sendiri. Beras tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri sebesar 97,35 persen. Sementara sebagian kecil lainnya dijual kembali ke Provinsi Sulawesi Tengah. Peta distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 102. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.29.2 Pola Distribusi

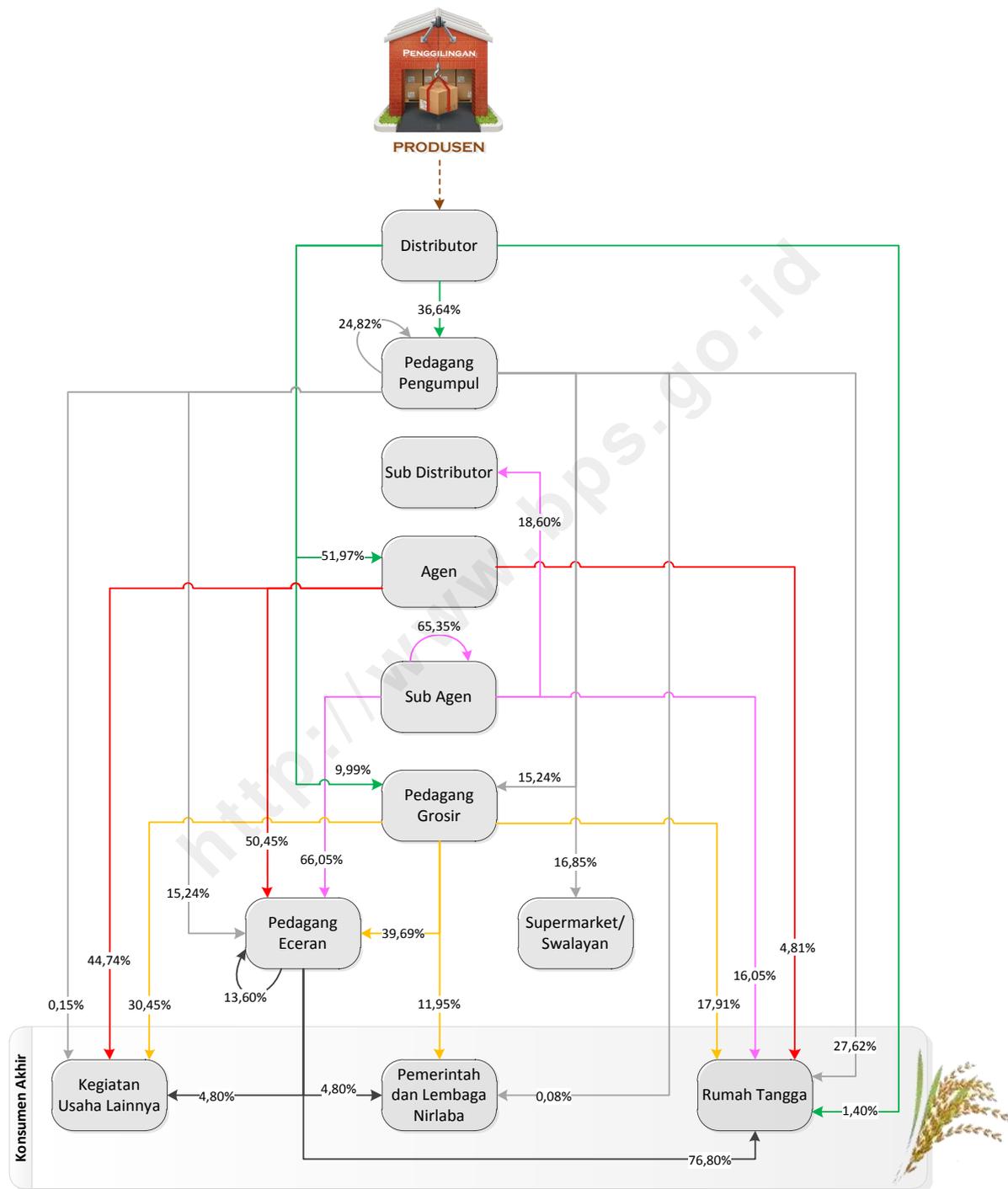
Dari hasil survei di Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh hasil bahwa hasil produksi berupa beras dijual sebagian besar ke industri pengolahan, yaitu sebesar 83,97 persen. Sisanya dijual melalui pedagang pengepul sebesar 5,00 persen. Sisanya, sebesar 4,41 persen dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 103. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergambar pada Gambar 104 memperlihatkan bahwa rantai distribusi beras dari produsen sampai ke konsumen di Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan cukup banyak lembaga usaha perdagangan. Distribusi beras tersebut melibatkan beberapa lembaga usaha, seperti: distributor, pedagang pengepul, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Sedangkan dari konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Distributor di Provinsi Sulawesi Tenggara menjual separuh dari total pasokan beras yang

dibelinya dari produsen ke agen. Agen kemudian menjual 50,45 persen dari pasokan beras yang diperolehnya dari distributor tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali beras yang dibelinya dari berbagai lembaga usaha perdagangan langsung ke konsumen akhir maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 104. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

2.29.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 30, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,73 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,75 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 14,29 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 12,16 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 9,01 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,08 persen.

Tabel 30. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Tenggara

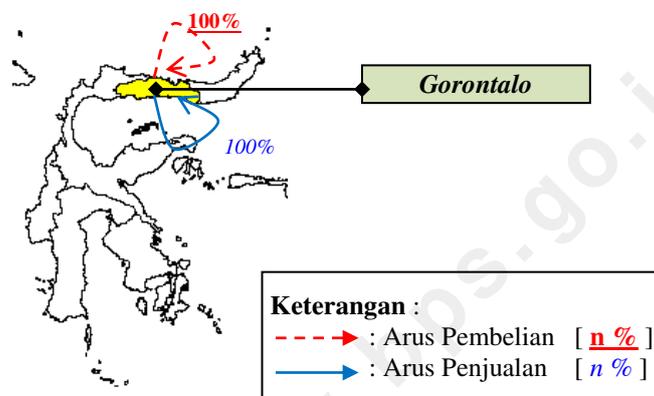
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.073,73	1.955,20	2.067,14
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.907,28	1.710,80	1.896,36
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	60,24	36,40	58,84
Rata-rata MPP (juta Rp)	166,45	244,40	170,78
Rasio MPP (%)	8,73	14,29	9,01
Rata-rata MP (juta Rp)	109,75	208,00	115,21
Rasio MP (%)	5,75	12,16	6,08

2.30 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

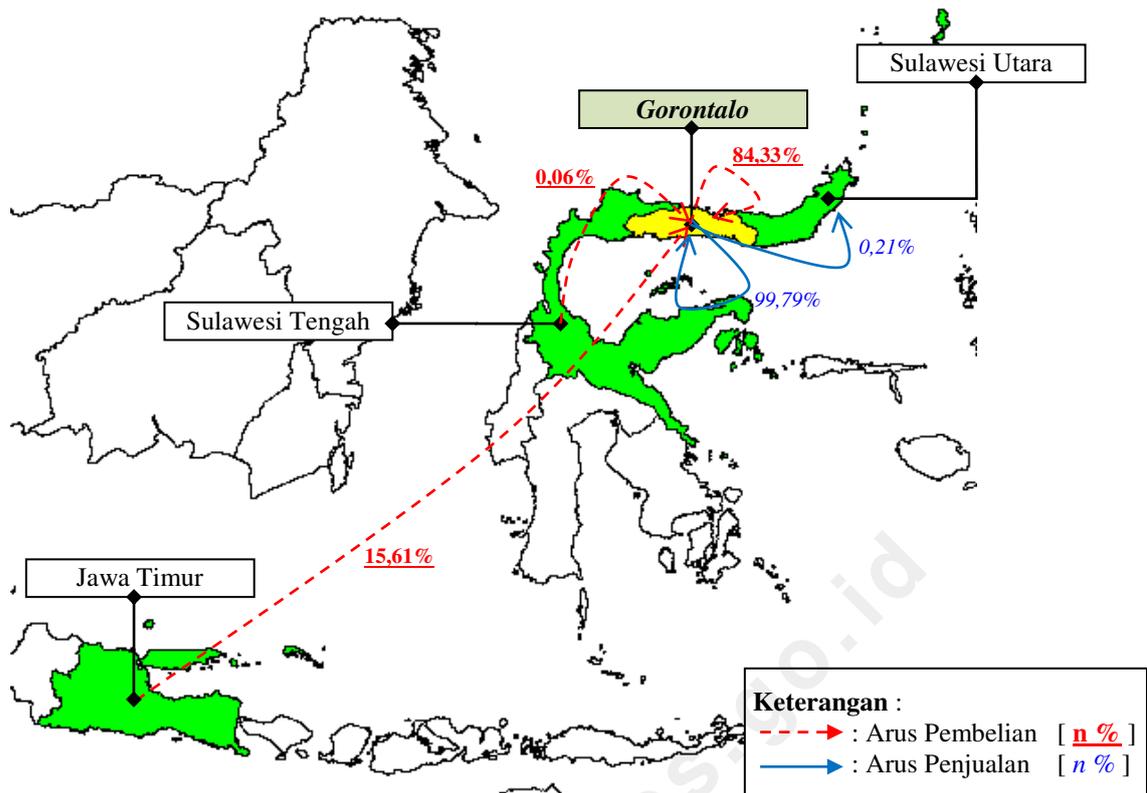
2.30.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Gorontalo memperoleh seluruh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Gorontalo sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Gorontalo saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Gorontalo secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 105. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Gorontalo

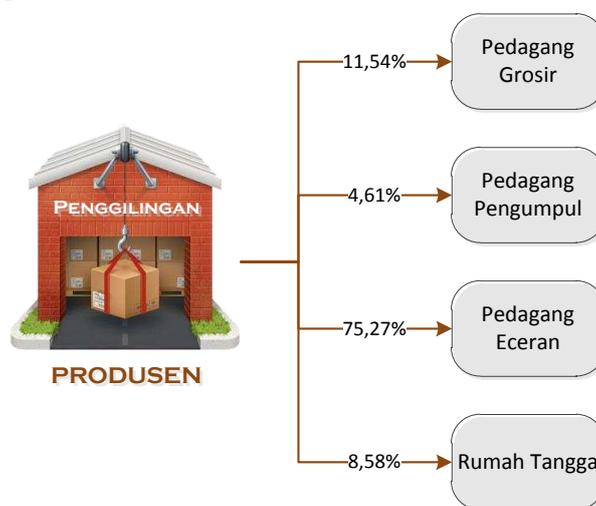
Distribusi perdagangan beras di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa asal pasokan beras di Gorontalo sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Gorontalo sendiri, yaitu sebesar 84,33 persen. Sementara sisanya, pedagang membelinya dari Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,06 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 15,61 persen. Beras tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Gorontalo sebesar 99,79 persen dan sisanya sebesar 0,21 persen dijual ke Provinsi Sulawesi Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Gorontalo secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 106. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo

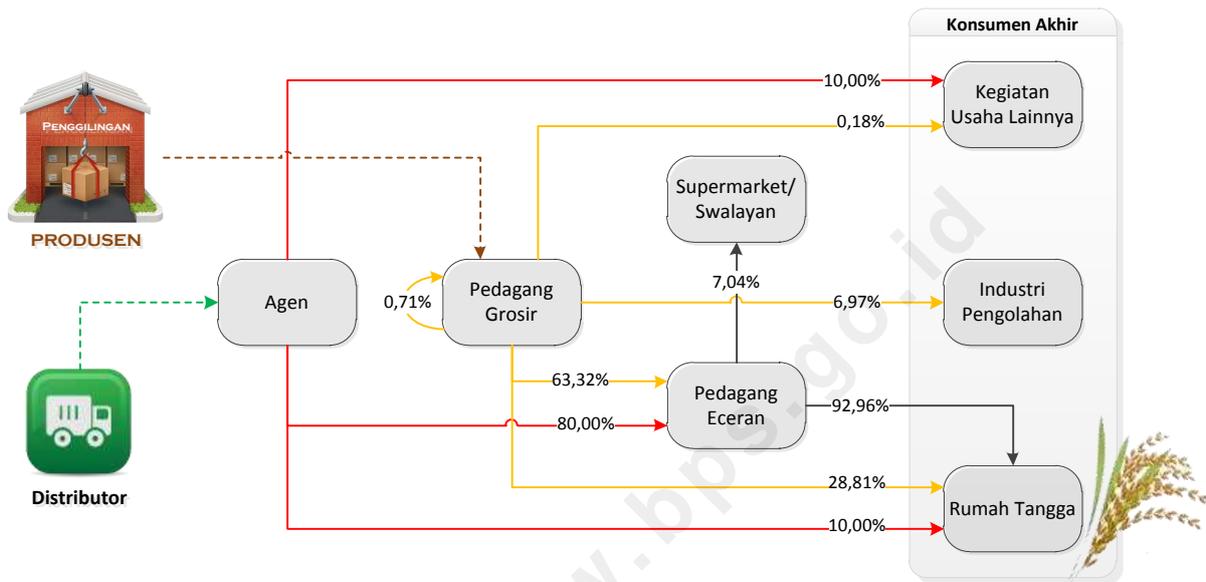
2.30.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap perusahaan penggilingan padi yang berlokasi di Provinsi Gorontalo menghasilkan informasi bahwa 75,27 persen dari total seluruh hasil produksi yang berupa beras dipasarkan melalui pedagang eceran. Sementara sisanya dipasarkan melalui pedagang grosir, pedagang pengepul, maupun langsung dikonsumsi oleh rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 107. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Gorontalo

Dari sisi pola distribusi perdagangan beras, agen di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan pasokan beras langsung dari distributor, kemudian menjual 80,00 persen dari pasokan beras tersebut ke pedagang eceran. Sejalan dengan pola penjualan agen, pedagang grosir juga menjual kembali sebagian besar dari total pasokan beras yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual 92,96 persen dari total pasokan beras yang didapatnya ke rumah tangga. Sedangkan sisanya sebesar 7,04 persen dijual ke supermarket/swalayan. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 108. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Gorontalo

2.30.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 31, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 9,1 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,41 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 16,27 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 16,08 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 9,67 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 8,09 persen.

**Tabel 31. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Gorontalo**

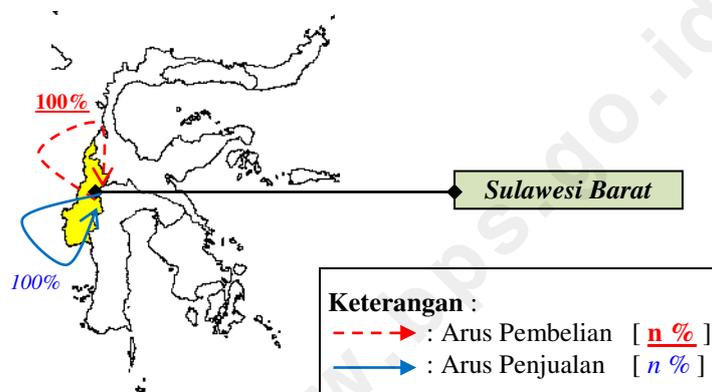
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	900,36	225,56	720,41
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	825,26	193,99	656,91
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	17,09	1,50	15,53
Rata-rata MPP (juta Rp)	75,10	31,57	63,49
Rasio MPP (%)	9,10	16,27	9,67
Rata-rata MP (juta Rp)	61,12	31,19	53,14
Rasio MP (%)	7,41	16,08	8,09

2.31 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju.

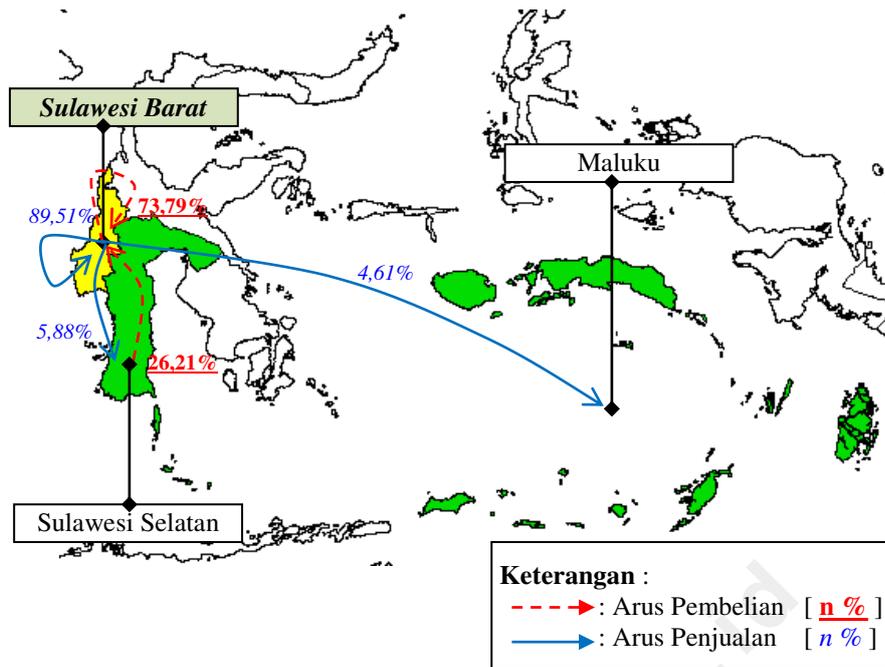
2.31.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, perusahaan penggilingan beras yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat memperoleh seluruh gabah padi untuk digiling menjadi beras dari dalam Provinsi Sulawesi Barat sendiri. Hasil produksi yang berupa beras pun seluruhnya hanya dijual di dalam Provinsi Sulawesi Barat saja. Peta wilayah penjualan produksi komoditas beras di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 109. Peta Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Barat

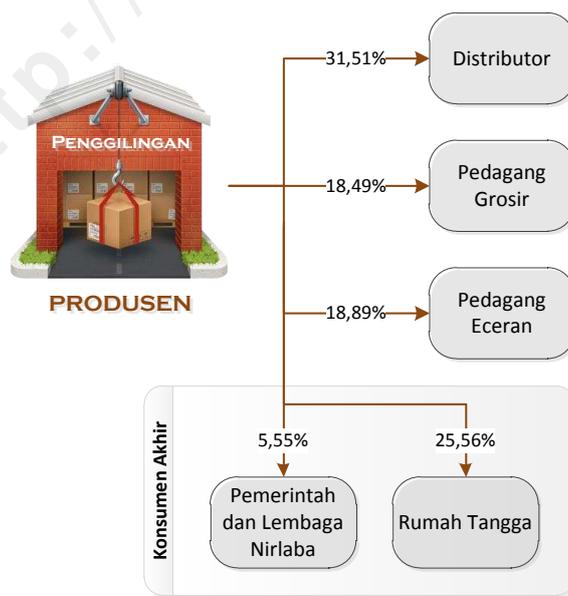
Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa 73,79 persen dari beras-beras yang diperdagangkan di Provinsi Sulawesi Barat dibeli dari dalam Provinsi Sulawesi Barat sendiri. Sementara sisanya sebesar 26,21 persen dibeli dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pasokan beras yang didapatkan pedagang beras tersebut kemudian 89,51 persen dijual kembali ke dalam Provinsi Sulawesi Barat untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah sendiri. Sedangkan sisanya, sebesar 5,88 persen dijual ke Provinsi Sulawesi Selatan dan sebesar 4,61 persen dijual ke Provinsi Maluku. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 110. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat

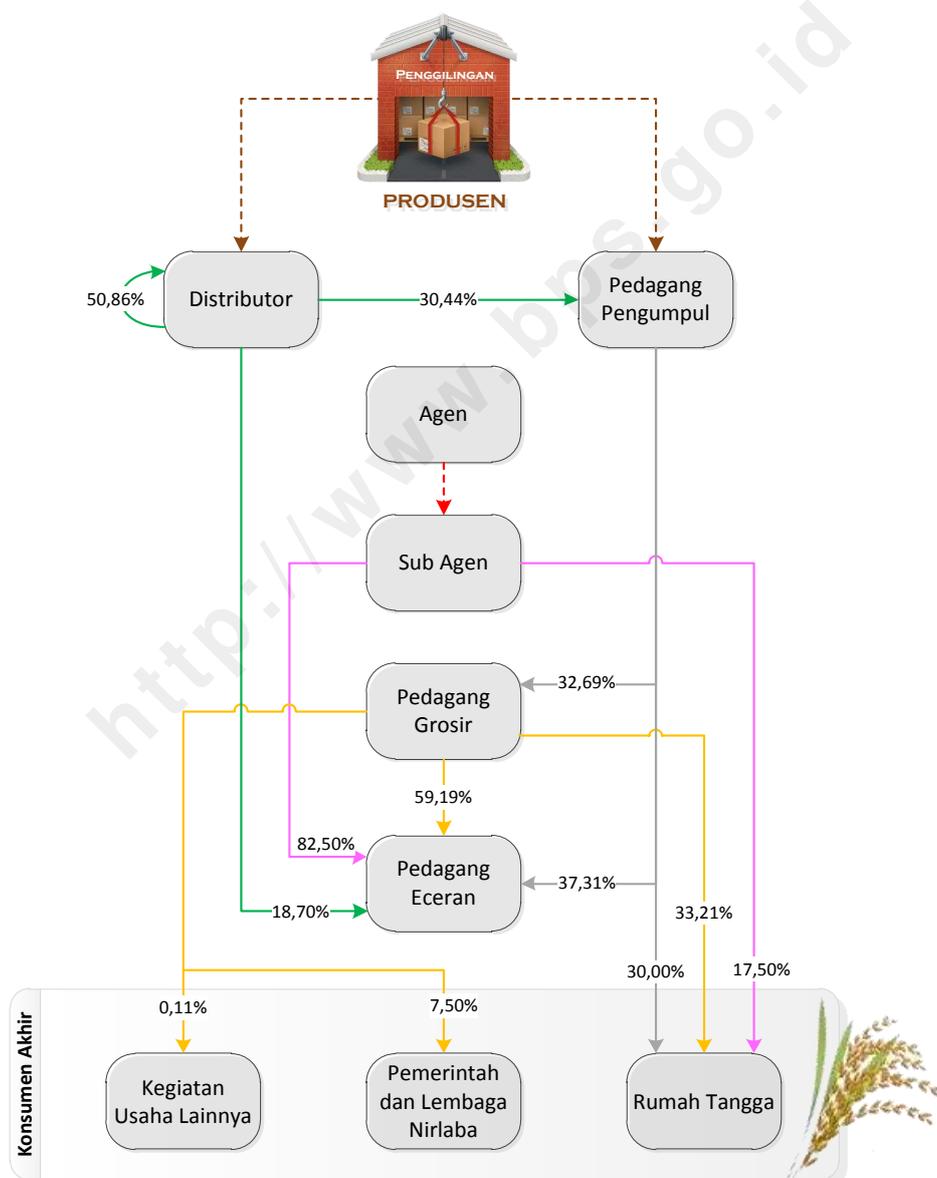
2.31.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap perusahaan penggilingan padi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat menghasilkan informasi bahwa 31,51 persen dari total seluruh hasil produksi yang berupa beras dipasarkan melalui pedagang eceran. Sementara sisanya dipasarkan melalui pedagang grosir, pedagang pengepul, maupun langsung dikonsumsi oleh rumah tangga. Pola penjualan produksi beras di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 111. Pola Penjualan Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Barat

Pola distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat yang tergambar pada Gambar 112 memperlihatkan bahwa rantai distribusi beras dari produsen sampai ke konsumen di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan, seperti: distributor, pedagang pengepul, agen, subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan pada level konsumen akhir, terdiri dari: kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Distributor di Provinsi Sulawesi Tenggara menjual separuh dari total pasokan beras yang dibelinya dari produsen ke sesama distributor. Sedangkan 30,44 persen dari pasokan beras tersebut dijual ke pedagang pengepul. Pedagang pengepul kemudian menjual 37,31 persen dari pasokan beras yang diperolehnya ke pedagang eceran. Sementara sisanya sebesar 32,69 persen dijual ke pedagang grosir dan 30,00 persen dijual langsung ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 112. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat

2.31.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 32, diperoleh informasi bahwa perolehan marjin pedagang besar beras di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 7,07 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,68 persen. Pedagang eceran dalam Tabel 32 bertanda (-) dikarenakan tidak ada sampel pedagang eceran yang dialokasikan dalam survei ini.

Tabel 32. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Barat

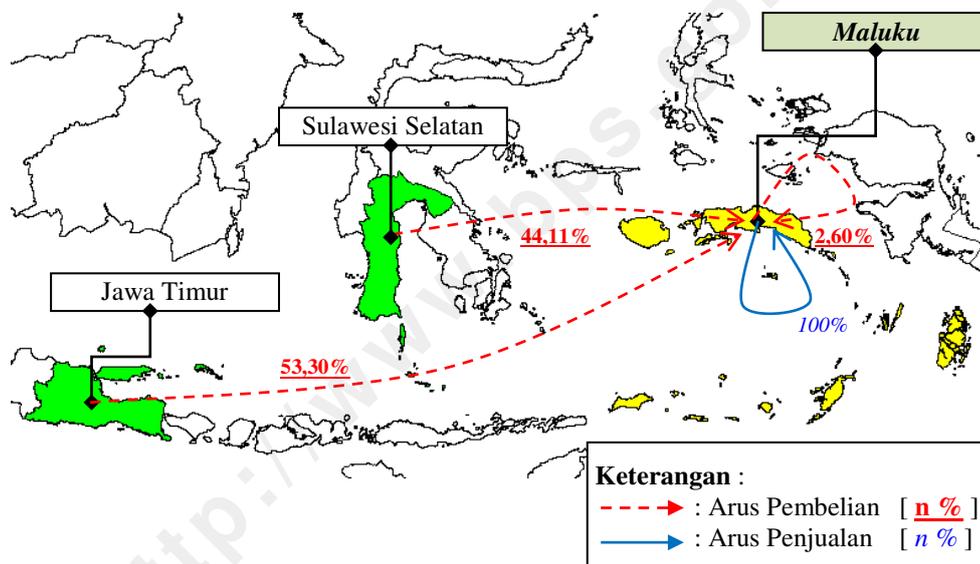
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	3.992,53	-	3.992,53
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	3.729,06	-	3.729,06
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	20,40	-	20,40
Rata-rata MPP (juta Rp)	263,47	-	263,47
Rasio MPP (%)	7,07	-	7,07
Rata-rata MP (juta Rp)	249,07	-	249,07
Rasio MP (%)	6,68	-	6,68

2.32 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon.

2.32.1 Peta Distribusi

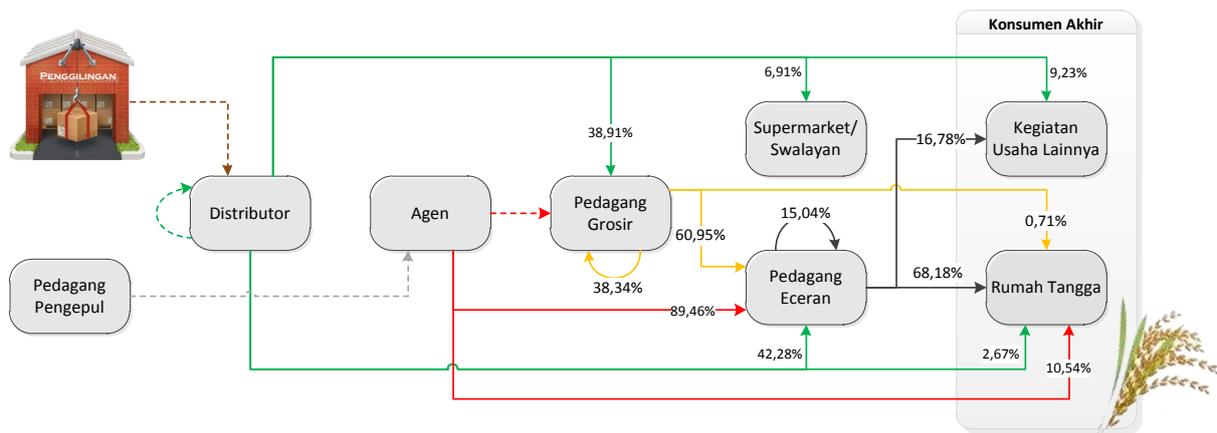
Dari hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Maluku dapat diketahui bahwa separuh dari beras yang diperdagangkan di wilayah Maluku berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pedagang beras di Maluku juga membeli pasokan beras yang cukup besar, yaitu sekitar 44,11 persen dari Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya sebagian kecil saja, yaitu sebesar 2,60 persen yang dibeli dalam wilayah Maluku sendiri. Pasokan beras tersebut kemudian seluruhnya hanya dijual ke dalam Provinsi Maluku saja untuk memenuhi kebutuhan akan beras di wilayah tersebut. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Maluku secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 113. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku

2.32.2 Pola Distribusi

Berdasarkan survei yang dilakukan dari sisi pedagang beras, diperoleh informasi bahwa distributor beras di Maluku mendapatkan sebagian besar pasokan beras dari produsen maupun dari sesama distributor di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Beras tersebut kemudian dijual kembali ke pedagang eceran sebesar 42,28 persen. Sementara agen yang mendapatkan pasokan beras dari pedagang pengepul yang berlokasi di Makassar juga menjual sebagian besar berasnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual kembali pasokan beras yang dibelinya dari berbagai macam lembaga usaha tersebut ke rumah tangga sebesar 68,18 persen, kegiatan usaha lainnya sebesar 16,78 persen, dan ke sesama pedagang eceran sebesar 15,04 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 114. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku

2.32.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 33, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,82 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 5,84 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 24,56 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 18,16 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Maluku adalah sebesar 9,1 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 6,06 persen.

Tabel 33. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Maluku

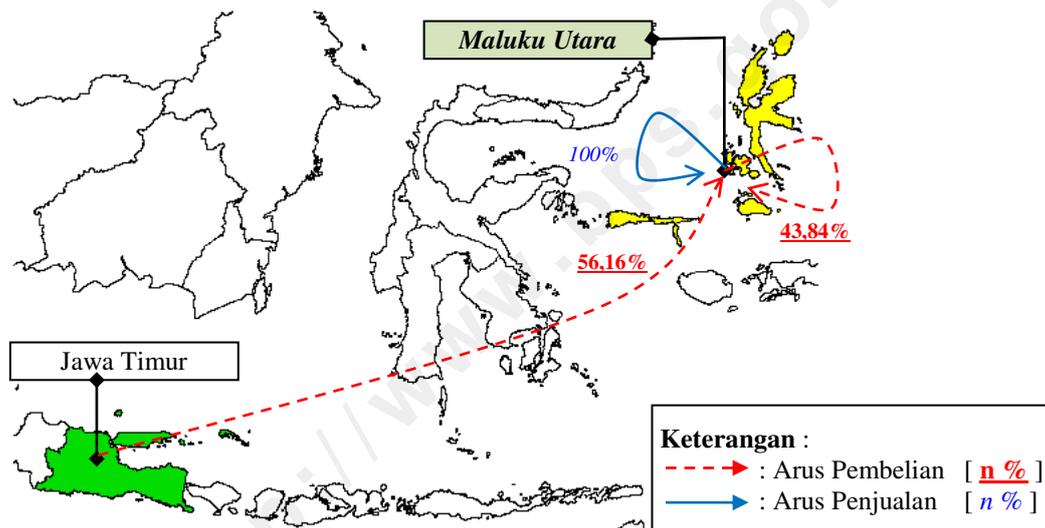
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	2.023,03	85,19	1.377,08
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.859,11	68,39	1.262,20
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	55,41	6,56	43,20
Rata-rata MPP (juta Rp)	163,92	16,80	114,88
Rasio MPP (%)	8,82	24,56	9,10
Rata-rata MP (juta Rp)	108,50	12,42	76,48
Rasio MP (%)	5,84	18,16	6,06

2.33 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Halmahera Timur, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.

2.33.1 Peta Distribusi

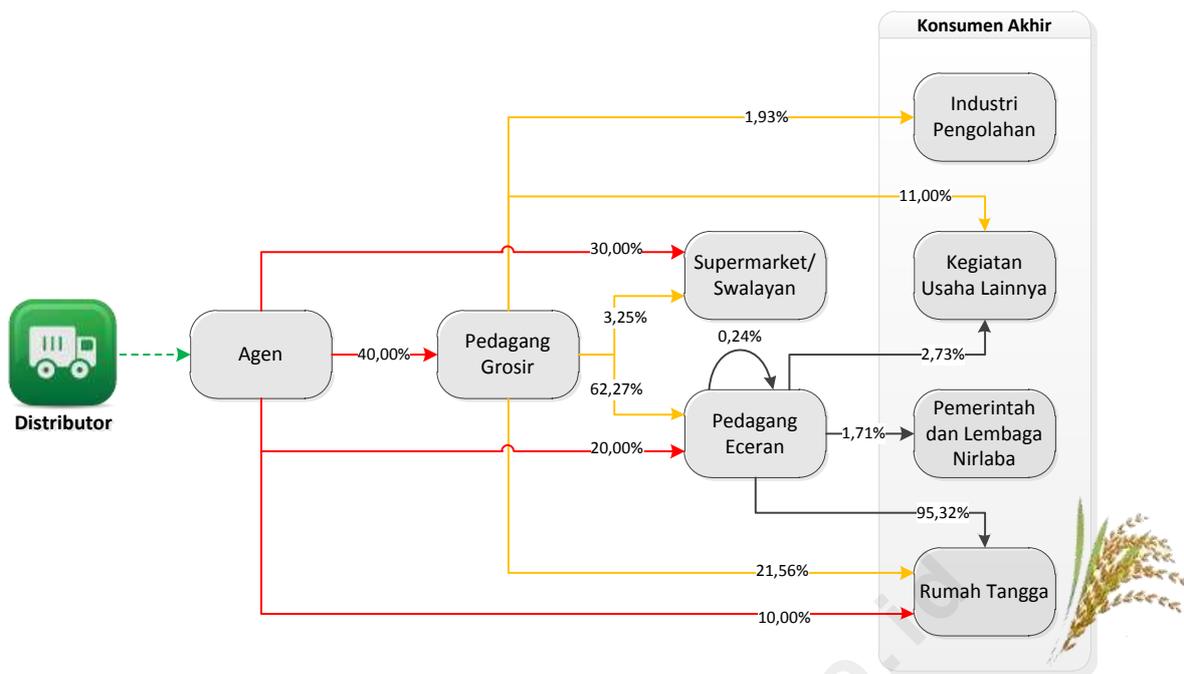
Dari hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Maluku Utara dapat diketahui bahwa lebih dari separuh dari beras yang diperdagangkan di wilayah Maluku Utara, yaitu sebesar 56,16 persen dibeli dari Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya sebesar 43,84 persen dibeli dari dalam wilayah Maluku Utara sendiri. Pasokan beras tersebut kemudian seluruhnya hanya dijual ke dalam Provinsi Maluku Utara saja untuk memenuhi kebutuhan akan beras di wilayah tersebut. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 115. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara

2.33.2 Pola Distribusi

Berdasarkan survei yang dilakukan dari sisi pedagang beras, diperoleh informasi bahwa agen beras di Maluku Utara yang mendapatkan pasokan beras dari distributor di Jawa Timur kemudian menjual kembali beras tersebut ke pedagang grosir sebesar 40,00 persen. Pedagang grosir kemudian menjual 62,27 persen dari total pasokan beras yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual kembali pasokan beras yang dibelinya dari berbagai macam lembaga usaha ke rumah tangga sebesar 95,32 persen, kegiatan usaha lainnya sebesar 2,73 persen, pemerintah dan lembaga nirlaba sebesar 1,71 persen, serta ke sesama pedagang eceran sebesar 0,24 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 116. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Maluku Utara

2.33.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 34, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 12,64 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 12,45 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 23,19 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 17,13 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 14,33 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 13,2 persen.

Tabel 34. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Maluku Utara

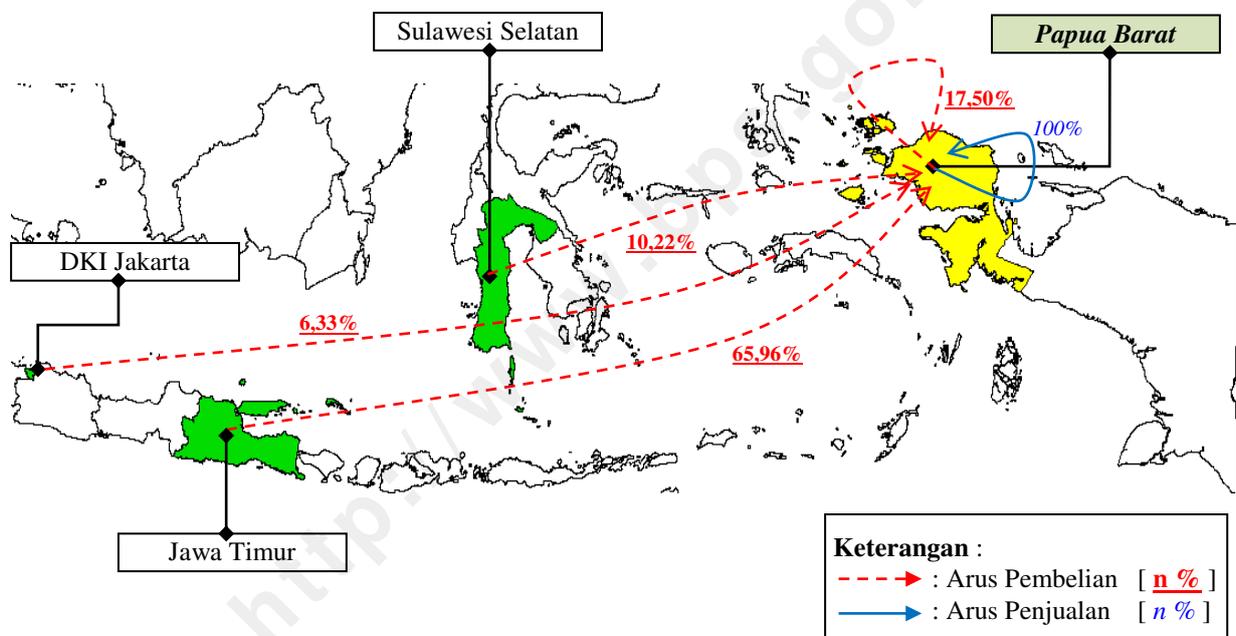
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.271,44	118,22	473,06
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.128,76	95,97	413,75
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	4,30	7,47	6,77
Rata-rata MPP (juta Rp)	142,68	22,25	59,31
Rasio MPP (%)	12,64	23,19	14,33
Rata-rata MP (juta Rp)	140,53	16,44	54,62
Rasio MP (%)	12,45	17,13	13,20

2.34 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

2.34.1 Peta Distribusi

Distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa beras yang diperdagangkan di Provinsi Papua Barat berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Pasokan beras terbesar yang masuk ke Papua Barat dibeli dari Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 65,96 persen. Sementara sisanya berasal dari DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan dari dalam wilayah Papua Barat sendiri. Sedangkan dari sisi penjualan, beras tersebut sepenuhnya dipasarkan ke dalam Provinsi Papua Barat sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

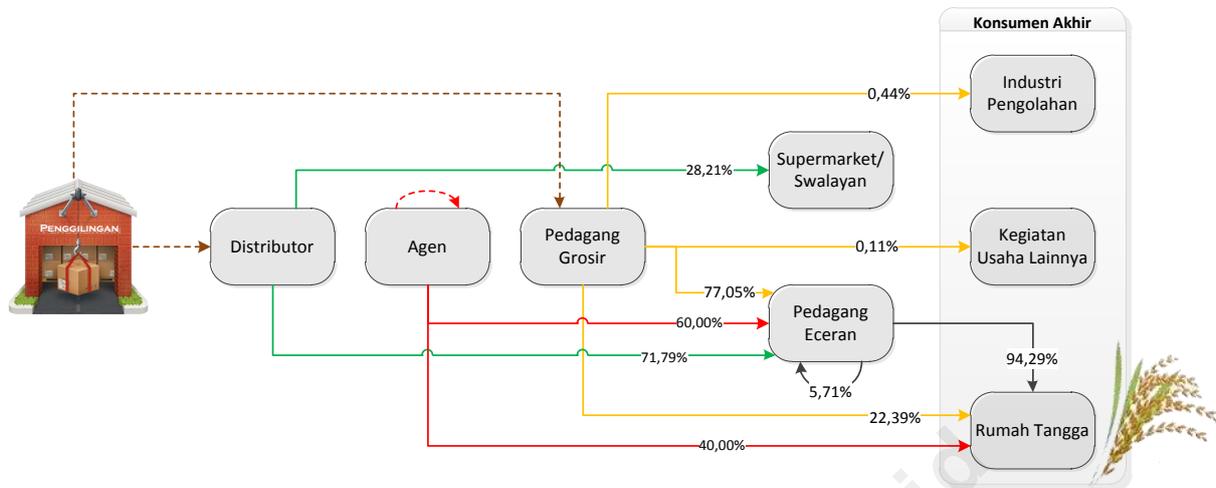


Gambar 117. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat

2.34.2 Pola Distribusi

Berdasarkan survei yang dilakukan pada beberapa responden pedagang beras di Provinsi Papua Barat, diperoleh informasi bahwa distributor beras menjual kembali sebagian besar beras yang dibelinya dari produsen ke pedagang eceran. Pola penjualan yang sama dengan yang terjadi pada level distributor beras, juga terjadi pada agen dan pedagang grosir. Agen beras yang mendapatkan pasokan beras dari sesama agen di Makassar serta pedagang grosir juga menjual kembali sebagian besar dari pasokan tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual kembali pasokan beras yang dibelinya ke rumah tangga sebesar 94,29 persen dan ke sesama pedagang

eceran sebesar 5,71 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 118. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua Barat

2.34.3 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 35, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 19,11 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 13,12 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 10,99 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 10,1 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 17,65 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 12,57 persen.

Tabel 35. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Provinsi Papua Barat

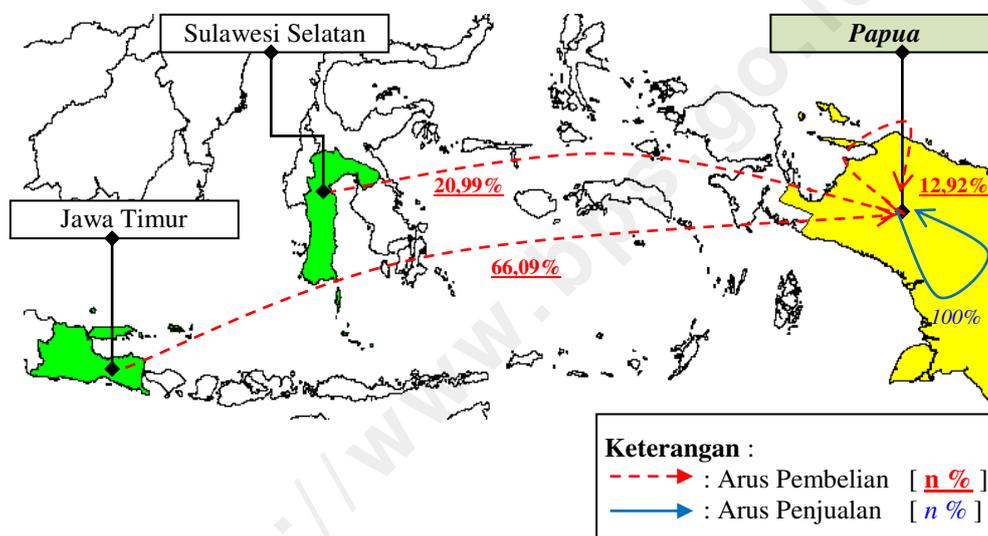
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	559,77	61,82	236,11
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	469,96	55,70	200,69
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	49,30	3,20	33,93
Rata-rata MPP (juta Rp)	89,81	6,12	35,41
Rasio MPP (%)	19,11	10,99	17,65
Rata-rata MP (juta Rp)	61,64	5,63	25,23
Rasio MP (%)	13,12	10,10	12,57

2.35 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas beras meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

2.35.1 Peta Distribusi

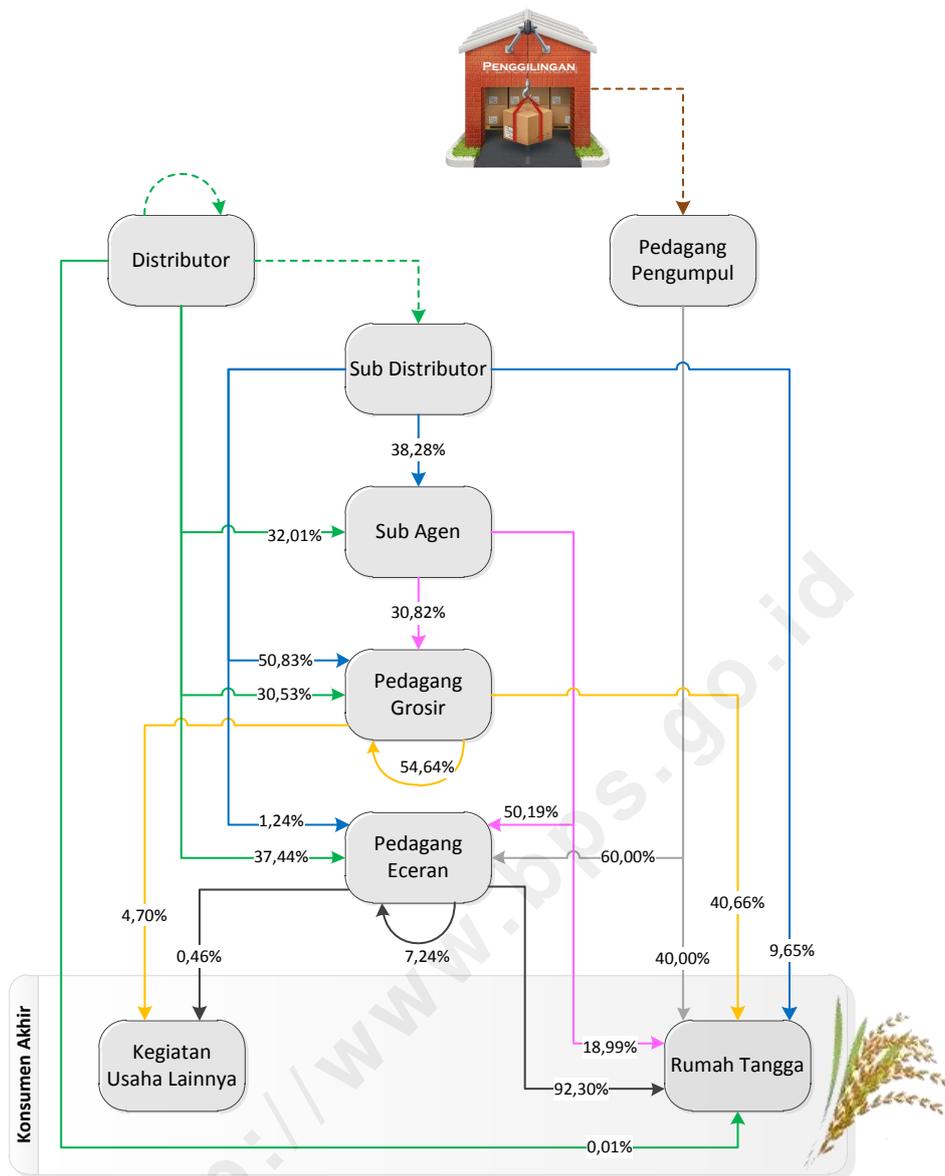
Hasil survei terhadap pedagang beras di Provinsi Papua menghasilkan informasi bahwa sekitar 66,09 persen dari total beras yang diperdagangkan di wilayah Papua dibeli dari Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya sebesar 20,99 persen dibeli dari Provinsi Sulawesi Selatan dan 12,92 persen dibeli dari dalam wilayah Papua sendiri. Pasokan beras tersebut kemudian seluruhnya hanya dijual ke dalam Provinsi Papua saja untuk memenuhi kebutuhan akan beras di wilayah tersebut. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 119. Peta Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua

2.35.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, distribusi beras di Provinsi Papua melibatkan beberapa lembaga usaha perdagangan, seperti: pedagang pengepul, distributor, subdistributor, subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan pada level konsumen akhir terdiri dari kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan beras dari produsen kemudian menjual kembali 60,00 persen dari total pembelian tersebut ke pedagang eceran. Sementara distributor yang mendapatkan pasokan beras dari sesama distributor yang berlokasi di Surabaya kemudian menjual kembali beras tersebut ke subagen, pedagang grosir, dan pedagang eceran dengan persentase penjualan yang hampir sama. Pedagang eceran sebagai rantai penghubung antar pedagang besar dan konsumen akhir, menjual kembali sebagian besar beras yang didaptnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 120. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Papua

2.35.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 36, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,31 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 3,61 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,83 persen, sedangkan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 10,53 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang beras di Provinsi Papua adalah sebesar 7,52 persen dan rata-rata perolehan margin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 4,02 persen.

**Tabel 36. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras
di Provinsi Papua**

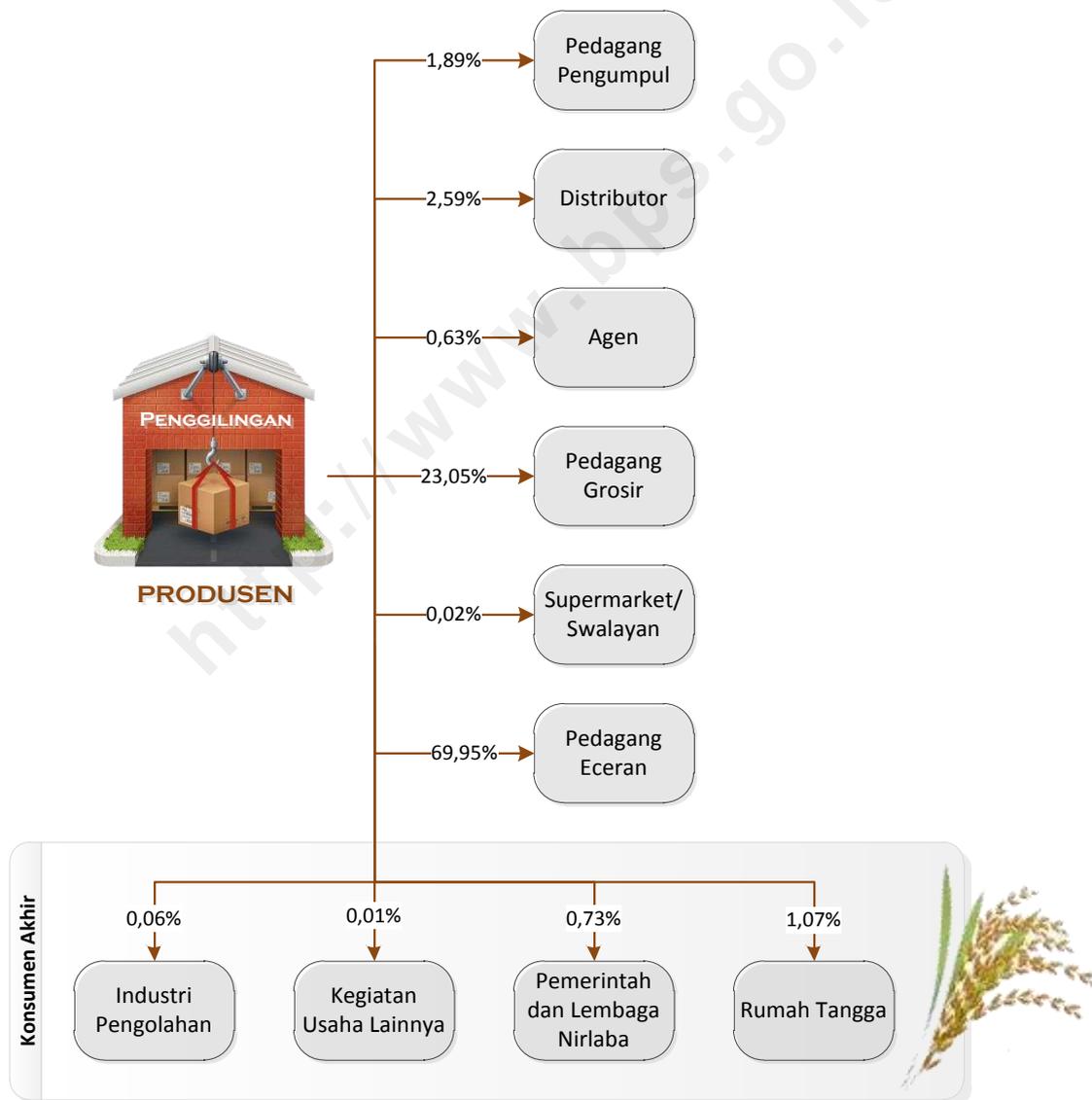
Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	1.186,59	147,26	826,82
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	1.105,80	132,88	769,02
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	69,51	1,80	58,23
Rata-rata MPP (juta Rp)	80,79	14,39	57,80
Rasio MPP (%)	7,31	10,83	7,52
Rata-rata MP (juta Rp)	39,90	13,99	30,93
Rasio MP (%)	3,61	10,53	4,02

2.36 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 152 Kabupaten/Kota di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan wilayah yang dialokasikan sebagai sampel sentra produksi beras terdapat di 72 Kabupaten/Kota. Sementara wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan beras meliputi 152 Kabupaten/Kota tersebut di seluruh Indonesia.

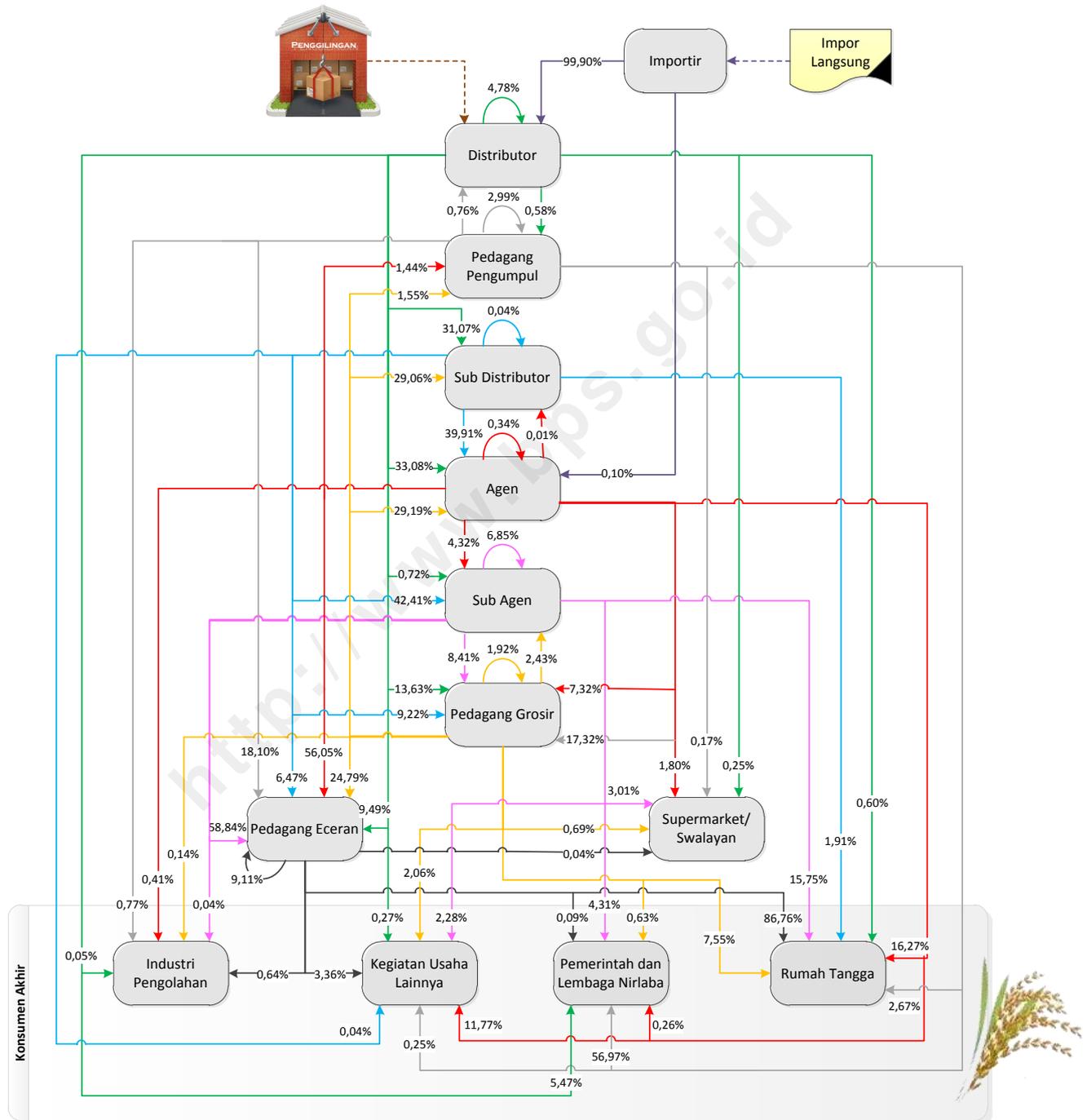
2.36.1 Pola Produksi

Survei terhadap perusahaan penggilingan padi di Indonesia menghasilkan informasi bahwa hasil produksi yang berupa beras secara garis besar dijual melalui dua jalur utama, yaitu melalui pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara sisanya dijual ke berbagai lembaga usaha lain, baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi beras di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 121. Pola Penjualan Produksi Beras di Indonesia

Dari sisi perdagangan, rantai distribusi beras di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sebagaimana tampak pada Gambar 122. Seluruh lembaga usaha perdagangan baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun level pedagang eceran ikut dalam rantai distribusi perdagangan beras di Indonesia. Terlibat juga importir, yang berfungsi memasok beras dari luar negeri, di dalam rantai distribusi beras di Indonesia. Pola distribusi perdagangan komoditas beras di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 122. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Indonesia

2.36.2 Marjin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan Tabel 37, diperoleh informasi bahwa kategori pedagang besar beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 10,50 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 9,99 persen. Adapun kategori pedagang eceran beras rata-rata memperoleh marjin (rasio MPP) sebesar 8,53 persen, sedangkan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi (rasio MP) adalah sebesar 7,92 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan marjin pedagang beras di Indonesia adalah sebesar 10,43 persen dan rata-rata perolehan marjin setelah dikurangi biaya transportasi adalah sebesar 9,92 persen.

Tabel 37. Marjin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia

Uraian	PB	PE	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Nilai Penjualan (juta Rp)	18.237,34	1.080,86	11.933,50
Rata-rata Nilai Pembelian (juta Rp)	16.504,71	995,87	10.806,27
Rata-rata Biaya Transportasi (juta Rp)	132,81	16,79	103,35
Rata-rata MPP (juta Rp)	1.732,63	84,99	1.127,23
Rasio MPP (%)	10,50	8,53	10,43
Rata-rata MP (juta Rp)	1.649,57	78,83	1.072,43
Rasio MP (%)	9,99	7,92	9,92

BAB III KESIMPULAN

Pendistribusian komoditas beras dari produsen sampai ke konsumen akhir di tiap provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Terdapat tujuh provinsi yang mempunyai pola distribusi perdagangan yang cukup sederhana. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen di tujuh provinsi tersebut hanya melewati tiga fungsi usaha perdagangan saja. Namun demikian, terdapat pula provinsi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Rantai distribusi perdagangan beras dari produsen ke konsumen di Provinsi Jawa Tengah melewati delapan fungsi usaha perdagangan sebagai intermedier. Selain itu, berperannya importir dalam pendistribusian beras di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Indonesia belum tercukupi hanya dengan pasokan dari dalam negeri saja. Akibatnya, pedagang perlu mengimpor langsung pasokan beras dari pasar internasional, seperti dari Negara India, Vietnam, maupun dari Amerika Serikat.

Ditinjau dari sisi produksi, hampir semua provinsi yang menjadi sampel produsen beras memperoleh bahan baku berupa gabah padi kering yang siap giling dari dalam provinsi masing-masing. Beras sebagai hasil produksi dari perusahaan penggilingan padi dijual sebagian besar ke beberapa fungsi usaha yang termasuk pedagang besar, seperti: distributor, pedagang grosir, dan pedagang pengepul, maupun ke pedagang eceran. Meskipun ada juga sebagian produsen yang langsung menjual hasil produksinya ke konsumen akhir.

Perolehan rata-rata marjin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan besar dan perdagangan eceran komoditas beras di Indonesia masing-masing adalah 10,50 persen dan 8,53 persen. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan rasio MPP tertinggi, yaitu sebesar 27,26 persen untuk perdagangan besar dan 41,51 persen untuk perdagangan eceran. Sedangkan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan perolehan MPP perdagangan besar terendah dan Jambi merupakan provinsi dengan perolehan MPP perdagangan eceran terendah, masing-masing sebesar 1,12 persen dan 1,60 persen.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1: Daftar VPDP15-PEDAGANG



**VPDP-15
PEDAGANG**

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

(disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT						
(1)	(2)					
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
2. Kabupaten/Kota*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
4. Kelurahan/Desa*) :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :						
7. Alamat Perusahaan/Usaha :						
Kode pos :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....)	Ext:					
Nomor Fax. : (.....)						
E-mail:						
Website:						

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>

BLOK II: KETERANGAN UMUM			
(Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)			
(1)		(2)	
1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:		VPDP-15 <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div> *) diisi oleh pemeriksa	
2. Komoditas yang diteliti:		<input type="checkbox"/>	
Beras Premium	1	1	Bawang Merah
Beras Medium	2	4	Jagung Pipilan
Cabai Merah	3	3	Daging Ayam Ras
		4	
		5	
		6	
Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 2.			
3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan:		<input type="checkbox"/>	
Distributor	1		Pedagang Pengepul
Sub distributor	2		Eksportir
Agen	3		Importir
Sub agen	4		Pedagang eceran
Pedagang grosir	5		
		6	
		7	
		8	
		9	

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2014:			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Persentase dari luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Sub distributor	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Sub agen	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang grosir	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang pengepul	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Pedagang eceran	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Perorangan	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	
2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2014:			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode*)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %
*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/koordinator lapangan			

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)

3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2014:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase	Persentase ke luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Ekspor tir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengepul	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<i>Department Store</i>	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/swalayan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2014:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemeriksa/kordinator lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2014?				
Ya	1	Tidak	2	→ ke rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Kelangkaan barang	1	Modal	16	
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2014?				
Ya	1	Tidak	2	→ ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2014:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2013)
b. Pembelian
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain		
d. Hilang/rusak
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2014)
<small>*)Satuan yang digunakan: kilogram, kwintal, ton</small>				
2. Berapa persen nilai penjualan pada Blok V Rincian 1e terhadap seluruh penjualan usaha perdagangan selama tahun 2014?				<input type="text"/>
3. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2014?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	
b. Jika "Ya", berapa nilainya?				Rp.

BLOK VI: CATATAN	

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 2: Daftar VPDP15-PRODUSEN



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS**

**VPDP-15
PRODUSEN**

Kode KBLI

--	--	--	--	--

 (disalin dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT						
(1)	(2)					
1. Provinsi :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
2. Kabupaten/Kota* :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
3. Kecamatan :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
4. Kelurahan/Desa* :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha :						
7. Alamat Perusahaan/Usaha :						
Kode pos :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>					
Nomor Telepon : (.....) Ext:	Nomor Fax. : (.....)					
E-mail:	Website:					

*) coret yang tidak sesuai

Tujuan Survei	: a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produksi. b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan. c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.
Dasar Hukum	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Kerahasiaan	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
Kewajiban	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

<p>Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:</p>

BLOK II: KETERANGAN KOMODITAS			
(Jenis komoditas harus ditentukan oleh petugas BPS)			
(1)		(2)	
1. Komoditas yang diteliti:		<input type="checkbox"/>	
Beras Premium	1	Bawang Merah	4
Beras Medium	2	Jagung Pipilan	5
Cabai Merah	3	Daging Ayam Ras	6

Pertanyaan pada Blok III sampai dengan Blok VI berkaitan dengan jenis komoditas yang diteliti pada Blok II Rincian 1 di atas

BLOK III: Bahan Baku

1. Pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2014:

No.	Asal pengadaan bahan baku utama	Persentase	Persentase dari luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Importir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produsen lain	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Produksi sendiri	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Petani/Peternak	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

2. Wilayah pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2014:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

1. Penjualan barang produksi selama tahun 2014:

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase	Persentase ke luar Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksporir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Agen	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Pedagang grosir	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang pengepul	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<i>Department Store</i>	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Supermarket/swalayan	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Industri pengolahan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Kegiatan usaha lainnya	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Rumah tangga	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2014:

No	Kabupaten/Kota/Negara	Kode *)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	<i>Lainnya (diisi pada lampiran)</i>		
Jumlah			1 0 0 %

*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Pemeriksa/Koordinator Lapangan

BLOK V: KENDALA PERUSAHAAN/USAHA				
(1)			(2)	
1. a. Apakah ada kendala dalam proses produksi selama tahun 2014?				
Ya	1	Tidak	2	→ ke Rincian 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Kesulitan modal	1	Bencana alam	16	
Tenaga kerja trampil	2	Transportasi	32	
Birokrasi administrasi	4	Lainnya	64	
Bahan baku/bibit	8	(tuliskan		
c. Kendala utama proses produksi				
2. a. Apakah ada kendala dalam penjualan barang produksi selama tahun 2014?				
Ya	1	Tidak	2	→ ke Blok VI
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	
Transportasi	4	(tuliskan		
Sarana dan prasarana produksi	8			
c. Kendala utama penjualan				

BLOK VI: NERACA PRODUKSI				
1. Produksi selama tahun 2014:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (sisa 2013)
b. Produksi
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain		
d. Hilang/rusak		
e. Penjualan
f. Stok Akhir (sisa 2014)

Satuan yang digunakan: Kilogram, Kwintal, Ton

BLOK VII: CATATAN

BLOK VIII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PERUSAHAAN
KABUPATEN / KOTA : SURAT TANDA TERIMA		
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS 2015 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP15-PEDAGANG/VPDP15-PRODUSEN yang ditujukan kepada:		
1. Nama Perusahaan : _____ 2. Alamat : _____ Telepon : _____ Pesawat : _____ HP : _____		
3. Kegiatan Usaha : _____ 4. Perkiraan Waktu Selesai *) : _____, 2015		
Identitas Petugas VPDP15 Nama : NIP :		Yang Menerima, Nama : Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota :, Telepon : atau No. HP Petugas VPDP15 :		

	BADAN PUSAT STATISTIK	UNTUK PETUGAS
KABUPATEN / KOTA : SURAT TANDA TERIMA		
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITAS 2015 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP15-PEDAGANG/VPDP15-PRODUSEN yang ditujukan kepada:		
1. Nama Perusahaan : _____ 2. Alamat : _____ Telepon : _____ Pesawat : _____ HP : _____		
3. Kegiatan Usaha : _____ 4. Perkiraan Waktu Selesai *) : _____, 2015		
Identitas Petugas VPDP15 Nama : NIP :		Yang Menerima, Nama : Jabatan :
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota :, Telepon : atau No. HP Petugas VPDP15 :		



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710 Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 – 4 Fax: 021-3857048

E-mail: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>